

ANALISIS JUMLAH PENDUDUK DAN PDRB TERHADAP PKB, BBNKB DAN PBBKB PROVINSI SULAWESI UTARA

Deasy Evangeline Christina maukar¹, Vecky A.J Masinambow², Een N Walewangko³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi

Email : daisy1201@gmail.com, vajmasinambow@unsrat.ac.id, eenwalewangko@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan PDRB terhadap PKB, BBNKB dan PBBKB. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan Eviews 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), serta PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Kata Kunci : Jumlah Penduduk, PDRB, PKB, BBNKB dan PBBKB

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of population and GRDP on PKB, BBNKB and PBBKB. The analytical method used is multiple regression analysis with the help of Eviews 8. The results showed that the population has a negative effect on motor vehicle tax revenue (PKB) and GRDP has a positive effect on motor vehicle tax revenue (PKB). The number of residents had a negativ effect on the receipt of motorized vehicle transfer fees (BBNKB) and GRDP had a positive effect on the receipt of motorized vehicle transfer fees (BBNKB). The number of residents had a negative effect on motor vehicle fuel tax revenues (PBBKB), that GRDP had a positive effect on motor vehicle fuel tax revenue (PBBKB).

Keywords: Total Population, PDRB, PKB, BBNKB and PBBKB

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Amiruddin & Sudirman, 2012). Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, membawa dampak di bidang perpajakan dalam sistem pemungutannya yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Menurut Resmi (2014).

Pajak Daerah dipungut Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna mengatur dan menertibkan Wajib Pajak selaku Objek Pajak di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada penerimaan pajak daerah yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Ketiga pajak ini memberikan kontribusi yang besar untuk pendapatan asli daerah dan berikut perkembangan pajak daerah di Sulawesi Utara.

Tabel 1 Perkembangan PKB, BBNKB dan PBBKB
Tahun 2003-2021

Tahun	PKB	BBNKB	PBBKB
2003	36,264,318	32,183,900	18,150,000
2004	45,823,880	47,364,700	18,964,636
2005	51,200,000	68,100,000	23,150,000
2006	58,063,000	53,250,000	43,250,000
2007	73,105,298	71,186,100	65,622,262
2008	84,376,775	101,850,000	79,060,225
2009	96,416,017	98,984,000	81,511,000
2010	125,648,205,260	154,808,933,900	89,647,665,069
2011	155,247,795,242	214,280,095,110	105,246,824,618
2012	178,907,115,061	239,613,927,650	129,052,355,723
2013	209,315,814,738	300,225,688,050	156,602,634,526
2014	234,627,538,763	282,997,166,250	196,938,425,823
2015	260,924,380,835	258,450,399,693	204,039,706,240
2016	274,969,214,561	266,517,066,983	187,366,177,880
2017	296,868,376,846	295,485,760,328	217,589,107,612
2018	322,627,072,314	335,746,947,725	249,032,913,395
2019	364,467,162,889	287,245,336,634	248,131,128,126
2020	324,243,394,161	197,440,014,575	215,966,167,988
2021	355,620,684,135	268,014,163,570	267,523,614,569

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perkembangan penerimaan ketiga pajak tersebut. Pertama untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) setiap tahunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor cenderung mengalami peningkatan, namun tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan karena adanya pandemic covid 19 yang masuk ke Indonesia juga ke Provinsi Sulawesi Utara. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang sangat penting kontribusinya untuk penerimaan pendapatan daerah. Pajak ini merupakan pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atas kepemilikan kendaraan bermotor dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota). Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang pajak daerah.

Selain pajak kendaraan bermotor ada juga pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang juga memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah. Pada tahun 2003- 2013 dan tahun 2018-2021 BBNKB mengalami peningkatan, menurun pada tahun 2019-2020. Marihot (2013) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak 3 atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

Penerimaan pajak daerah yang juga memberikan kontribusi yang sangat penting untuk pendapatan daerah adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pajak pajak atas bahan bakar yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor seperti pertalite, pertamax, solar, dextrite dan bahan bakar kendaraan bermotor lainnya juga disebut dengan PBBKB. Pada tahun 2003 – 2015 serta 2017-2021 PBBKB mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan pada tahun 2016.

Hasil penelitian Arianto, Suci dan Padmono (2014) >> apakah Arianto dkk saja??, bahwa jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Jumlah penduduk dan PDRB juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah baik tinggi maupun rendah. Jika di suatu daerah mempunyai jumlah penduduk yang tinggi maka proses pembangunan daerah bisa dilaksanakan lebih cepat tetapi jika sebuah wilayah mempunyai penduduk yang rendah maka pembangunan wilayah juga menjadi lama

dalam pelaksanaannya. Apabila pembangunan di sebuah wilayah berjalan cepat maka pajak yang diterima wilayah menjadi besar sebab masyarakat mengetahui bahwa pajak yang diterima pada sebuah wilayah ditujukan untuk membiayai kebijakan dan pembangunan daerah di masa yang datang (Prasetyo, 2016). Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk dan PDRB di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2
Perkembangan Jumlah Penduduk dan PDRB di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2010-2021

Tahun	Jumlah Penduduk	PDRB
2003	2,127,820	11,631,389
2004	2,154,234	12,127,463
2005	2,121,017	12,720,590
2006	2,160,641	13,506,804
2007	2,186,810	14,382,463
2008	2,208,012	15,401,402
2009	2,228,856	16,606,962
2010	2,277,691	51,721,334
2011	2,305,924	54,910,898
2012	2,333,480	58,677,587
2013	2,360,388	62,422,499
2014	2,386,604	66,360,757
2015	2,412,118	70,425,330
2016	2,436,921	74,764,661
2017	2,461,028	79,484,025
2018	2,484,392	84,249,720
2019	2,506,981	89,009,265
2020	2,621,923	88,126,374
2021	2,638,631	91,790,927

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara 2022

Berdasarkan data jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu 12 tahun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Tabel 2). Bertambahnya jumlah penduduk pada sebuah wilayah bisa mempengaruhi pajak yang diterima oleh daerah sebab seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah di sebuah wilayah dapat membuat jumlah wajib pajak pada suatu daerah mengalami peningkatan sehingga nantinya pajak yang diterima daerah juga mengalami peningkatan. Sebab adanya penambahan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah mampu memberikan dampak terhadap pajak yang diterima daerah secara langsung (Saputra, Sudjana & Djudi, 2014).>>apakah bukan Saputra dkk saja?

Berdasarkan teori perpajakan musgrave, besar kecilnya penerimaan pajak ditentukan oleh jumlah penduduk, karena penduduk adalah subjek pajak. Meningkatnya jumlah penduduk maka akan semakin banyak penduduk yang menikmati jasa pelayanan yang diberikan pemerintah, dimana jasa tersebut bersumber dari pajak daerah. Sehingga mengakibatkan penduduk tersebut wajib membayar pajak atas dasar pelayanan yang diterima. Hubungan jumlah penduduk dengan penerimaan pajak daerah adalah positif. Meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah tersebut (Artha, 2016). >>Mana yang betul, Artha dan Setiawan (2016) atau Artha (2016)???>>> Mohon dicek pada daftar Pustaka.

Selain jumlah penduduk faktor penerimaan pajak juga ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Dimana pada umumnya pertumbuhan ekonomi digambarkan oleh PDRB. Perkembangan PDRB Provinsi Sulawesi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sejak tahun 2003-2021.Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan perkapita riil yang berlangsung terus-menerus yang bersumber dari dalam daerah. Semakin tinggi PDRB secara langsung pajak daerah mengalami peningkatan, sehingga penerimaan PAD juga mengalami peningkatan (Prasedyawati, 2013).>>>tidak ada dalam daftar pustka .PDRB merupakan pencerminan kemajuan suatu daerah. Semakin besar PDRB atau semakin maju perekonomian suatu daerah maka semakin besar juga pendapatan masyarakatnya. Berdasarkan latar belakang di

atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **Analisis Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap PKB, BBNKB dan PBBKB Provinsi Sulawesi Utara.**

Tujuan Penelitian

1. Untuk menentukan besarnya pengaruh jumlah penduduk dan PDRB terhadap PKB.
2. Untuk menentukan besarnya pengaruh jumlah penduduk dan PDRB terhadap BBNKB.
3. Untuk menentukan besarnya pengaruh jumlah penduduk dan PDRB terhadap PBBKB

Tinjauan Pustaka

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu :

- a) nilai jual kendaraan bermotor; dan
- b) bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecualian objek BBNKB adalah penyerahan atas :

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan Lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- d. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan
- e. Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Termasuk penyerahan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :

- a. Untuk diperdagangkan;
- b. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeantasan Indonesia; dan
- c. Digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Subjek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12%, khusus untuk daerah setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Tarif BBNKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BBNKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran kendaraan bermotor dan bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran kendaraan bermotor baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor dan subjek Pajak PBBKB adalah konsumen PBBKB, Wajib pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB. Untuk pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB. Penyedia yang dimaksud adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Untuk dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan nilai.

Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi, untuk jenis BBKB tertentu pemerintah dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dalam rangka stabilisasi harga. Penyesuaian tarif PBBKB ditetapkan dengan Peraturan Presiden sedangkan tarif PBBKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan PBBKB dengan tarif PBBKB.

Penduduk

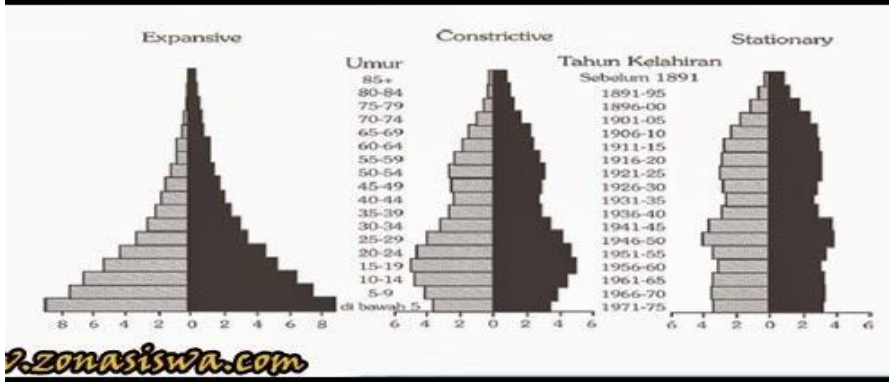
Penduduk dapat diartikan sebagai seluruh orang yang menempati suatu daerah atau negara. Banyaknya orang yang menempati suatu daerah atau negara akan menentukan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk biasanya diukur dengan jumlah penduduk per kilometer persegi.

Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel tertentu, misalnya umur, jenis kelamin, agama, mata pencarian, bahasa, tempat tinggal, dan lain-lain. Salah satu pengelompokkan yang paling sering digunakan adalah pengelompokkan penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Pengelompokkan penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Mantra (2003) Menjelaskan mengenai komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk Piramida penduduk, yaitu grafik yang dibuat untuk mencerminkan data kependudukan menurut usia dan jenis kelamin. Penggambaran piramida penduduk dimulai dengan menggambarkan dua garis yang saling tegak lurus. Garis yang vertikal menggambarkan umur penduduk mulai dari nol lalu naik. Kenaikan ini dapat tahunan, dapat pula dengan jenjang lima tahunan. Garis horizontal menggambarkan besarnya jumlah penduduk baik ditampilkan pada skala jumlah yang sebenarnya maupun dalam bentuk persentase Terdapat 3 bentuk piramida penduduk yaitu ekspansif, konstruktif dan stasioner. Menurut Mantra (2003) penjelasan komposisi penduduk tersebut adalah sebagai berikut,

- 1) Komposisi Penduduk Muda (ekspansif), dengan bentuk piramida penduduk menyerupai kerucut. Ciri-ciri komposisi penduduk ekspansif antara lain :
 - a. jumlah penduduk usia muda (0 – 19 tahun) sangat besar, sedangkan usia tua sedikit,
 - b. angka kelahiran jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian,pertumbuhan penduduk relatif tinggi,
 - c. sebagian besar negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, RRC, Mesir, dan India memiliki komposisi penduduk muda.

Gambar 1 Piramida Penduduk



- 2) Komposisi Penduduk Dewasa (stasioner), dengan bentuk piramida penduduk menyerupai Batu Nisan. Ciri-ciri komposisi penduduk stasioner antara lain :
 - a. perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia muda dan dewasa relatif seimbang,
 - b. Tingkat kelahiran tidak begitu tinggi, demikian pula angka kematian relatif rendah,
 - c. Pertumbuhan penduduk kecil,
 - d. Beberapa negara maju yang berada pada fase komposisi penduduk stasioner antara lain Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris.
- 3) Komposisi Penduduk Tua (konstruktif), dengan bentuk piramida penduduk menyerupai Guci Terbalik. Ciri-ciri komposisi penduduk konstruktif antara lain:
 - a. jumlah penduduk usia muda (0 – 19 tahun) dan usia tua (di atas usia 64 tahun) sangat kecil,
 - b. jumlah penduduk terbanyak terkonsentrasi pada kelompok usia dewasa,
 - c. angka kelahiran sangat rendah, demikian juga angka kematian,
 - d. pertumbuhan penduduk sangat rendah mendekati nol, bahkan pertumbuhan penduduk beberapa sampai negatif,
 - e. penduduk cenderung berkurang dari tahun ke tahun,
 - f. beberapa negara yang berada pada fase ini antara lain Swedia, Jerman, dan Belgia.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peningkatan nilai tambah dari suatu bahan baku (input) menjadi produk (*output*) menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu wilayah. Dalam statistik neraca nasional, perkembangan nilai tambah yang diciptakan oleh berbagai sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, jasa-jasa dsb, dicatat dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai tambah (*value added*) produksi barang dan jasa dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut (Badan Pusat Statistik, 2013).

Produk regional merupakan produk domestik setelah ditambah pendapatan yang mengalir ke dalam daerah/wilayah tersebut, kemudian dikurangi pendapatan yang mengalir ke luar daerah/wilayah. Atau dapat dikatakan bahwa produk regional merupakan produk yang betul-betul dihasilkan oleh faktor-faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal, entrepreneur) yang dimiliki penduduk daerah/wilayah yang bersangkutan. Namun karena masih terbatasnya data untuk memantau pendapatan yang mengalir dari/ke luar suatu daerah/wilayah, maka antara produk domestik dengan produk regional sampai saat ini diasumsikan sama. (Badan Pusat Statistik).

Menurut Sukirno (2004), PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau provinsi. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen factor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan produk domestik regional bruto (PDRB).

Menurut Todaro (2002), PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir dihasilkan oleh suatu perekonomian tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut).

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan antara variabel Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap PKB, BBNKB dan PBBKB di Provinsi Sulawesi Utara.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data berasal dari Badan pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Jumlah Penduduk adalah jumlah orang yang menetap di suatu daerah atau wilayah dalam waktu tertentu yang sudah tercatat secara sah. Satuan ukur jiwa.
2. PDRB merupakan jumlah nilai tambah (nilai output- nilai input) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Satuan ukur Rupiah.
3. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Satuan ukur rupiah.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 2 pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Satuan ukur rupiah

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kotamadya Manado Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilakukan 6 bulan.

Metode Analisis

Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*).

Metode kuadrat terkecil/*Ordinary least square* merupakan estimasi titik sampel, karena itu masalah verifikasi estimasi titik tersebut melalui interval estimasi maupun uji hipotesis melalui uji t. dengan menggunakan tabel distribusi t kita mendapatkan nilai t kritis (t_c) dengan signifikansi $t_{\alpha/2}$ dan df (*degree of freedom*) $n-k$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter estimasi termasuk konstanta.

Dalam hasil perhitungan regresi berganda analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kuatnya tingkat hubungan linear antara dua variabel. Untuk mengukur kuatnya hubungan (korelasi) antara dua variabel X diberi symbol r_{xy} atau r saja. Nilai letaknya antara -1 dan 1, nilai $r = 1$, berarti hubungan X dan Y sempurna dan positif. Nilai $r = 0$, berarti hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, naik turunnya X tidak dipengaruhi Y , sedangkan, kalau hubungannya positif, pada umumnya kenaikan (penurunan) X , menyebabkan kenaikan (penurunan) Y , sebaliknya untuk hubungan yang negatif pada umumnya kenaikan (penurunan) X menyebabkan penurunan (kenaikan) Y (Widarjono, 2016).

Adapun persamaan model regresi berganda tersebut adalah

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 +b_kX_k$$

Keterangan :
Y : nilai prediksi dari Y
a : bilangan konstan
b₁,b₂,,,b_k : koefisien variabel bebas
X₁, X₂, : variabel independen
Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:
$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 +b_kX_k$$

$$(Y_{1,2,3}) = a + b_1 \text{Jumlah Penduduk} + b_2 \text{PDRB}$$

Keterangan :
Y_{1,2,3} : PKB, BBNKB dan PBBKB
X₁ : Jumlah Penduduk
X₂ : Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Widarjono (2016) untuk mengetahui kebenaran hipotesis, maka perlu dilakukan uji statistik berupa uji t, uji F dan Koefisien Determinasi R² (*Goodness Of Fit*).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
Regresi Berganda

Berdasarkan hasil regresi untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk (X₁), PDRB (X₂) terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (Y₁) menggunakan model OLS (*Ordinary Least Squares*). Hasil regresi bisa dilihat pada Tabel 3 berikut:

$$Y_1 = a_1X_1 + a_2X_2 + E_1$$
$$Y_1 = -18.10479x_1 + 6.257246x_2$$

Tabel 3 Hasil Regresi
Variabel Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap PKB

Dependent Variable: Y1 Method: Least Squares Sample: 2003 2021 Included observations: 19				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-18.10479	2.167613	-8.352407	0.0000
X2	6.257246	0.177146	35.32261	0.0000
C	179.2829	28.95907	6.190907	0.0000
R-squared	0.996846	Mean dependent var	23.16675	
Adjusted R-squared	0.996452	S.D. dependent var	4.133194	
F-statistic	2528.813	Durbin-Watson stat	1.197455	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Olah Eviews 8.0

Uji Parsial (Uji t)

Hasil persamaan regresi Jumlah Penduduk (X₁) pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel jumlah penduduk (X₁) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.00Hasil ini memperlihatkan bahwa ada hubungan linier antara jumlah penduduk dengan pajak kendaraan bermotor (Y₁). Jadi, dapat disimpulkan jumlah penduduk memiliki tanda negatif dan berpengaruh terhadap pajak kendaraan bermotor.

Hasil persamaan regresi PDRB (X₂) pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel PDRB (X₂) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.00 ada hubungan linier antara PDRB dengan pajak kendaraan bermotor (Y₁). Jadi, dapat disimpulkan PDRB memiliki tanda positif dan berpengaruh terhadap pajak kendaraan bermotor.

Uji Simultan (Uji f)

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 3 dapat dijelaskan pengaruh variabel Jumlah Penduduk (X₁) dan PDRB (X₂) secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (Y₁). Hasil ini memperlihatkan bahwa Jumlah Penduduk (X₁) dan PDRB (X₂) secara simultan atau Bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (Y₁).

Uji Determinasi R²

Nilai R² yang diperoleh sebesar 0.99. artinya, variasi perubahan jumlah penduduk dan PDRB mempengaruhi pajak kendaraan bermotor sebesar 99%, sedangkan sisanya (1%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukan dalam model.

Berikut hasil regresi untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk (X₁), PDRB (X₂) terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Y₂) menggunakan model OLS (*Ordinary Least Squares*). Hasil regresi bisa dilihat pada Tabel 4 berikut:

$$Y_2 = a_1X_1 + a_2X_2 + E_1$$
$$Y_2 = -24.94401x_1 + 6.726125x_2$$

Tabel 4 Hasil Regresi
Variabel Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap BBNKB

Dependent Variable: Y2 Method: Least Squares Sample: 2003 2021 Included observations: 19					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
X1	-24.94401	2.458942	-10.14421	0.0000	
X2	6.726125	0.200954	33.47095	0.0000	
C	271.4029	32.85118	8.261587	0.0000	
R-squared	0.995922	Mean dependent var			23.20091
Adjusted R-squared	0.995412	S.D. dependent var			4.123003
F-statistic	1953.603	Durbin-Watson stat			1.187208
Prob(F-statistic)	0.000000				

Hasil Olah Eviews 8.0

Uji Parsial (Uji t)

Hasil persamaan regresi Jumlah Penduduk (X₁) pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa variabel jumlah penduduk (X₁) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.00. Hal ini menunjukkan adanya hubungan linier antara jumlah penduduk dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Y₂). Jadi, dapat disimpulkan jumlah penduduk memiliki tanda negatif dan berpengaruh terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Hasil persamaan regresi PDRB (X₂) pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa variabel PDRB (X₂) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.00Hal ini memperlihatkan adanya hubungan linier antara PDRB dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Y₂). Jadi, dapat disimpulkan PDRB memiliki tanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Uji Simultan (Uji f)

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4 dapat dijelaskan pengaruh variabel Jumlah Penduduk (X₁) dan PDRB (X₂) secara simultan berpengaruh terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Y₂). Hal ini memperlihatkan bahwa Jumlah Penduduk (X₁) dan PDRB (X₂) secara simultan berpengaruh terhadap BBNKB (Y₂).

Uji Determinasi R²

Nilai R² yang diperoleh sebesar 0.99, artinya variasi perubahan jumlah penduduk dan PDRB mempengaruhi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 99%, sedangkan sisanya (1%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Berikut hasil regresi untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk (X₁), PDRB (X₂) terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Y₃) menggunakan model OLS (*Ordinary Least Squares*). Hasil regresi bisa dilihat pada Tabel 5 berikut:

$$Y_3 = a_1X_1 + a_2X_2 + E_1$$
$$Y_3 = -17.58020x_1 + 6.301199x_2$$

Tabel 5 Hasil Regresi
Variabel Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap PBBKB

Dependent Variable: Y3 Method: Least Squares Sample: 2003 2021 Included observations: 19					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
X1	-17.58020	2.446047	-7.187188	0.0000	
X2	6.301199	0.199900	31.52171	0.0000	
C	170.4654	32.67891	5.216374	0.0001	
R-squared	0.996116	Mean dependent var	22.80904		
Adjusted R-squared	0.995630	S.D. dependent var	4.202586		
F-statistic	2051.605	Durbin-Watson stat	1.066992		
Prob(F-statistic)	0.000000				

Hasil Olah Eviews 8.0

Uji Parsial (Uji t)

Hasil persamaan regresi Jumlah Penduduk (X₁) pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa variabel jumlah penduduk (X₁) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.00. ini memperlihatkan adanya hubungan linier antara jumlah penduduk dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Y₃) dan disimpulkan bahwa jumlah penduduk memiliki tanda negatif dan berpengaruh terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Hasil persamaan regresi PDRB (X₂) pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa variabel PDRB (X₂) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.00. Hal ini memperlihatkan bahwa ada hubungan linier antara PDRB dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Y₃), dandisimpulkan PDRB memiliki tanda positif dan berpengaruh terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Uji Simultan (Uji f)

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 5 dapat dijelaskan pengaruh variabel Jumlah Penduduk (X₁) dan PDRB (X₂) secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Y₃). Hal ini memperlihatkan bahwa Jumlah Penduduk (X₁) dan PDRB (X₂) secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Y₃).

Uji Determinasi R²

Nilai R² yang diperoleh sebesar 0,99, artinya, variasi perubahan jumlah penduduk dan PDRB mempengaruhi pajak kendaraan bermotor sebesar 99 %, sedangkan sisanya (1 %) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pembahasan

Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara jumlah penduduk dengan PKB. Artinya apabila jumlah penduduk meningkat, pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*. Teori Hansen mengenai stagnasi (*secular stagnation*) menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Penduduk tidak selalu menjadi penghambat pembangunan ekonomi suatu daerah. Jika tingkat perkembangan penduduk tinggi maka untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan akan tinggi pula. Berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah. Akan tetapi hasil penelitian jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PKB. Artinya jika jumlah penduduk meningkat maka penerimaan PKB menurun begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*. Pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Utara dan kebutuhan akan transportasi khususnya kendaraan bermotor juga tentu meningkat akan tetapi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara menurun. Hal ini diduga kelalaian masyarakat akan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga walaupun jumlah penduduk meningkat akan tetapi penerimaan pajak kendaraan bermotor turun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan PKB artinya, apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bertambah atau mengalami kenaikan akan menyebabkan penerimaan PKB meningkat *ceteris paribus*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember. Ketika terjadi penambahan PDRB maka semakin besar potensi pajak daerah tersebut. Disamping itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar pajak (*ability to pay*) antara lain pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap BBNKB. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara jumlah penduduk dengan BBNKB. Artinya apabila jumlah penduduk meningkat, BBNKB juga akan meningkat begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*. Teori Hansen mengenai stagnasi (*secular stagnation*) menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Penduduk tidak selalu menjadi penghambat pembangunan ekonomi suatu daerah. Jika tingkat perkembangan penduduk tinggi maka untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan akan tinggi pula. Berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah. Akan tetapi hasil penelitian jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap BBNKB. Artinya jika jumlah penduduk meningkat maka penerimaan BBNKB menurun begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*. Pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Utara dan kebutuhan akan transportasi khususnya kendaraan bermotor juga tentu meningkat akan tetapi penerimaan BBNKB di Provinsi Sulawesi Utara menurun. Hal ini diduga bahwa banyak kendaraan bermotor yang kepemilikannya belum diganti atau masih atas nama pemilik yang lama. Sehingga walaupun jumlah penduduk meningkat didukung dengan jumlah kendaraan bermotor meningkat akan tetapi penerimaan pajak BBNKB turun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan BBNKB. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan BBNKB artinya, apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bertambah atau mengalami kenaikan akan menyebabkan penerimaan BBNKB meningkat *ceteris paribus*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember. Ketika terjadi penambahan PDRB maka semakin besar potensi pajak daerah tersebut. Disamping itu, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar pajak (*ability to pay*) antara lain pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap PBBKB. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara jumlah penduduk dengan PBBKB. Artinya apabila jumlah penduduk meningkat, PBBKB juga akan meningkat begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*. Teori Hansen mengenai stagnasi (*secular stagnation*) menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Penduduk tidak selalu menjadi penghambat pembangunan ekonomi suatu daerah. Jika tingkat perkembangan penduduk tinggi maka untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan akan tinggi pula. Berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBBKB. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan PBBKB artinya, apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bertambah atau mengalami kenaikan akan menyebabkan penerimaan PBBKB meningkat *ceteris paribus*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember. Ketika terjadi penambahan PDRB maka semakin besar potensi pajak daerah tersebut. Disamping itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar pajak (*ability to pay*) antara lain pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap PKB.
2. Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan BBNKB.
3. Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). PDRB berpengaruh positif terhadap PBBKB.

Saran

Sebaiknya pemerintah daerah lebih meningkatkan lagi pengelolaan pajak daerah khususnya yang memiliki keunggulan komparatif, seperti PKB, BBNKB, dan PBBKB. PKB, BBNKB, dan PBBKB bisa juga dijadikan sebagai ekstensifikasi dan prioritas utama untuk dikembangkan potensinya karenamaksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin & Sudirman. 2012. Perpajakan pendekatan teori dan praktik di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat Dua Media

- Arianto, P. Suci, & Padmono, Y. 2014.** Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Volume 3, Nomor 1.
- Artha, K. G., & Setiawan, P. E. 2016.** Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.2, 913- 937.
- Mantra, I.B. 2003.** Demografi Umum. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Siahaan, Marihot Pahala 2013.** Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Prasedyawati. 2013.** Analisis penerimaan Pajak Reklame Di kota Semarang”
- Prasetyo, A. 2016.** Konsep dan Analisis Rasio Pajak. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Saputra, Sudjana & Djudi. 2014.** Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung). Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 Desember 2014, Hal 1-8
- Suharyadi dan Purwanto. 2011.** ”Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2”. Jakarta : Salemba Empat.
- Sukirno. 2004.** Makroekonomi, Teori Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Todaro, M.P. 2002.** Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H. Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,** Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Widarjono. 2016.** Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi kedua. Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD KOTA KOTAMOBAGU TERHADAP PAD SEKTOR KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU

Hendri D. Kolopita¹, Een N. Walewangko², Mauna Th. B. Maramis³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email : kolopitahendri.cipta@gmail.com, eenwalewangko@unsrat.ac.id, maunamaramis@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya meliputi beberapa interaksi dari komponen sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan lain-lain yang bersangkutan. Sejak di terapkannya Otonomi Daerah di Indonesia, pemerintah daerah di berikan wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini adalah sumber pembiayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh pendapatan klaim JKN dan pendapatan klaim pelayanan Kesehatan Umum terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Metode Analisis yang digunakan Analisis dengan Analisis Regresi Dummy Variabel. Uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dengan nilai Durbin Watson statistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, dapat dilihat nilai Prob (F-statistik) $17,64037 > \alpha = 0.05$ yang berarti pendapatan klaim JKN dan pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum secara bersama – sama berpengaruh terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Kata Kunci : PAD; Pelayanan Kesehatan; Sektor Kesehatan.

ABSTRACT

Economic growth basically includes several interactions of the components of human resources, natural resources, capital, technology, and other related components. Since the implementation of Regional Autonomy in Indonesia, regional governments have been given the authority to manage and arrange their own regional government affairs. Delegation of various authorities within the context of decentralization is a source of financing Local Revenue (PAD). In order to maximize the local revenue, the government strive to find potential sources of income while optimizing the sources of income that have been collected all this time. The purpose of this study is to see the effect of JKN claim revenue and public health service claim revenue on PAD Health Sector in Kotamobagu City.

The analytical method used analysis with dummy variable regression analysis. The autocorrelation test is carried out by testing the Durbin Watson test value to find the autocorrelation in a regression model with the Durbin Watson statistical value. The results of the study show that simultaneously, it can be seen in the Prob value (F-statistic) is $17.64037 > \alpha = 0.05$, which means JKN claim revenue and general health service claim revenue have an effect on PAD Health Sector in Kotamobagu City.

Keywords: PAD; Health services; Health Sector.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengurangi kemiskinan dan menghasilkan sumber daya yang diperlukan bagi pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan. Perekonomian mengalami ekspansi jika ada pertumbuhan positif. Sebaliknya, perekonomian mengalami kontraksi jika pertumbuhannya negatif. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin pembangunan manusia. Selain pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam statistik Produk Domestik Bruto dan pendapatan per kapita, diperlukan adanya

jaminan keamanan, tersedianya akses pendidikan dan layanan kesehatan dan pendidikan. Maka, berkembanglah konsep indeks pembangunan manusia (IPM).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu sistem dari kegiatan ekonomi yang mengalami perubahan kearah yang lebih baik dari waktu ke waktu sehingga barang dan jasa yang diproduksi akan bertambah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya meliputi beberapa interaksi dari komponen sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan lain-lain yang bersangkutan. Suatu pertumbuhan harus mencerminkan perubahan secara total masyarakat atau kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok yang ada didalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara sosial, maupun material. (Hasan, M, 2016).

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari keberhasilan kebijakan yang di putuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih di kenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata (Kuncoro, 2010).

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 Tahun 1999.

Karena otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini.

Tabel 1
Target PAD Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2021 (dalam jutaan rupiah)

No	Nama Objek	2018	2019	2020	2021
1	BPKD	20.138	26.092	23.146	24.111
2.	Dinas Kesehatan	3.717	5.581	6.406	4.584
3.	RSUD Kotamobagu	37.000	38.000	31.277	49.108
4.	Dinas Lingkungan Hidup	780	948	924	930
5.	Dinas Perdagangan	768	935	814	893
6.	Dinas Perhubungan	1.832	2.083	2.557	3.721
7.	Satpol PP	62	112	60	85
8.	Dinas Pekerjaan Umum	1.025	1.397	1.087	1.156
9.	Dinas Pertanian	122	158	130	169
10.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	560	506	298	223
	TOTAL	66.005	76.643	66.702	84.984

Sumber : Laporan Target dan Realisasi PAD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2021

Berdasarkan Hasil Tabel. 1 terlihat bahwa PAD Kota Kotamobagu terus meningkat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya penambahan target pendapatan asli daerah khususnya pada Rumah Sakit umum daerah kotamobagu di Tahun 2021 ditambah dengan klaim pelayanan Pasien dengan Covid-19, sebelumnya target PAD hanya diperoleh melalui Pendapatan Pelayanan Kesehatan Umum (Retribusi Pelayanan Kesehatan)

berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015, Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan berdasarkan klaim pelayanan pasien BPJS Kesehatan.

Penelitian oleh Brata, Aloysius (2004) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena daerah lebih leluasa dalam memanfaatkan PAD sesuai dengan agenda pembangunan ekonominya. Akan tetapi hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya. Sebagaimana diketahui, belakangan ini banyak pihak, khususnya dunia usaha, yang mengeluhkan soal begitu banyaknya pajak dan/atau retribusi yang justru menekan daya saing daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dijelaskan mengenai jenis pendapatan retribusi daerah adalah; (1) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi Jasa Umum atas jasa yang diberikan atau disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan, (2) Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta, (3) Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (A.Yani,2008,). Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini. (a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu, (b) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, (c) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, dan (d) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Salah satu yang termasuk dalam retribusi jasa umum adalah salah satunya retribusi pelayanan kesehatan.

Tabel 2
Realisasi Penerimaan PAD RSUD Kota Kotamobagu

No	Jenis Pendapatan	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
TARGET PAD		37.000.000.000	38.000.000.000	31.277.000.000	49.108.000.000
1.	Retibusi Pelayanan Kesehatan	3,875,484,851	3,557,184,704	3,441,998,432	3,384,368,629
2.	Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan	32,228,279,761	19,756,727,277	34,522,736,653	26,286,471,527
3.	Covid-19				30,042,358,100
TOTAL		36,103,791,614	23,313,911,981	37,964,735,085	59,713,198,256

Sumber : Laporan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kotamobagu Tahun 2018-2021

Paparan pada Tabel 2 menjelaskan bahwa jumlah realisasi penerimaan PAD di Rumah Sakit Kotamobagu pada tahun 2020 – 2021 melampaui dari target yang diharapkan, namun tahun 2018 dan 2019 menunjukkan ketidakcapaian target yang diharapkan yaitu tahun 2018 target Rp. 37.000.000.000 dengan realisasi Rp. 36,103,791,614 (97,58%), begitu juga dengan tahun 2019 target yang diharapkan sebesar Rp. 38.000.000.000 tetapi yang terealisasi hanya sejumlah Rp. 23.313.911.981 (61.35%). Hal ini disebabkan karena menurunnya kunjungan pasien ke Rumah Sakit kotamobagu terutama pada Tahun 2019 pada masa awal pandemi covid-19.

Berdasarkan penelitian Annisa, 2018 hasil uji asumsi klasik maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Meski pun retribusi daerah tidak mempengaruhi secara keseluruhan namun jumlah pendapatan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar berpengaruh positif terhadap total PAD Kabupaten Tanah Datar dan tentunya juga didukung dengan komponen-komponen pendapatan asli daerah lainnya seperti Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan. 2. Berdasarkan hasil hipotesis uji t dapat disimpulkan bahwa pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Yang mana dari perhitungan diperoleh t table -2.002 sedangkan t hitung 3.622. Jadi nilai $-t \text{ Tabel} < -t \text{ hitung}$ ($-2.002 < 3.622$), maka dapat disimpulkan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Nilai signifiakan yang diperoleh adalah 0,001. Ini berarti nilai $\text{Sig} < 0,05$ maka kesimpulan H_0 ditolak. Artinya ada pengaruh antara pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah tersebut.

Tabel 3
Realisasi PAD Dinas Kesehatan dan 5 (Lima) Puskesmas
Wilayah Kotamobagu Tahun 2021

No	Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000	160.033.000
1.	Retribusi Pelayanan Non Kapitasi	205.545.802	157.709.400
2.	Pendapatan Dana Kapitasi (BPJS Kesehatan)	4.129.200.000	3.851.055.216
JUMLAH		4.584.745.802	4.168.797.616

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kotamobagu 2021

Berdasarkan tabel 3 realisasi PAD di dinas kesehatan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dari total target sejumlah Rp. 4.584.745.802 di tahun 2021 hanya dapat dipenuhi sejumlah Rp. 4.168.797.616.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu sebagai Rumah Sakit Rujukan wilayah Bolaang Mongondow Raya dan Sebagian Minahasa Tenggara melalui surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 347 Tahun 2014 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Pelayanan Kesehatan Regional Di Provinsi Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Izin Operasional dan penetapan RSUD Kelas C. Visi UPTD RSUD Kota Kotamobagu adalah “Menjadi Rumah Sakit Unggulan, Mandiri dan Berdaya Saing.

Objek pendapatan Asli daerah tertinggi di Kota Kotamobagu adalah pendapatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kota Kotamobagu , Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan “Analisis Pengaruh Pendapatan Pelayanan Kesehatan Terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu”.

Perumusan Masalah

Bagaimanakah Pengaruh Pendapatan Pelayanan Kesehatan Terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu sebelum dan dimasa Pandemi COVID 19?”

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Pengaruh pendapatan klaim JKN terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.
- b. Pengaruh pendapatan klaim pelayanan Kesehatan Umum terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.
- c. Pengaruh pendapatan klaim JKN dan pendapatan klaim pelayanan Kesehatan Umum terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada :

- a. Penelitian di Indonesia khususnya tentang pengaruh Pendapatan Pelayanan Kesehatan Terhadap PAD Sektor Kesehatan.
- b. Masukkan terhadap Pemerintah Kota Kotamobagu terutama tentang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Rumah Sakit.
- c. Sebagai acuan untuk penetapan PAD bagi Rumah Sakit.
- d. Masukkan terhadap Pemerintah Kota Kotamobagu dalam penyusunan tarif Peraturan daerah pelayanan kesehatan (Peraturan Daerah Retribusi Kesehatan) di Rumah Sakit.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pendapatan / Retribusi Pelayanan Kesehatan

Jenis Pelayanan Retribusi dalam Pasal 88 (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, meliputi:

- a) pelayanan kesehatan;
- b) pelayanan kebersihan;
- c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d) pelayanan pasar; dan
- e) pengendalian lalu lintas.

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum atau pendapatan pelayanan kesehatan di Rumah sakit umum daerah kotamobagu diperoleh melalui a). Retribusi Pelayanan Kesehatan b). Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan (Non kapitasi) c). Pelayanan Pasien dengan penyakit Covid – 19.

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi pelayanan kesehatan diperoleh berdasarkan pelayanan pada pasien umum dengan dasar pemungutan retribusi menggunakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015. Dengan kata lain pembayaran pelayanan pasien umum menggunakan Metode pembayaran retrospektif adalah metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasar pada setiap aktifitas layanan yang diberikan, semakin banyak layanan kesehatan yang diberikan semakin besar biaya yang harus dibayarkan. Contoh pola pembayaran retrospektif adalah Fee For Services (FFS)

b) Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan (Non kapitasi) dan Pelayanan Pasien dengan penyakit Covid – 19.

Metode pembayaran prospektif adalah metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang besarnya sudah diketahui sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Contoh pembayaran prospektif adalah global budget, perdiem, kapitasi dan case based payment.

Pada pelayanan pasien BPJS Kesehatan menggunakan Tarif INA-CBG, Tarif INA-CBG merupakan tarif paket yang meliputi seluruh komponen sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan baik medis maupun non-medis. Penghitungan tarif INA-CBG berbasis pada data costing dan data koding rumah sakit. Data costing merupakan data biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit baik operasional maupun investasi, yang didapatkan dari rumah sakit terpilih yang menjadi representasi rumah sakit. Sedangkan data koding diperoleh dari data klaim JKN.

Peneliti Terdahulu

Penelitian (Geralda J.P. Sulung, Een Walewangko, Irawaty Masloman, 2022) Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki tanda negatif akan tetapi tidak signifikan secara teori terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila pendapatan asli daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan turun begitupula sebaliknya ceteris paribus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana transfer memiliki tanda negatif akan tetapi tidak signifikan secara teori terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila dana transfer meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan turun begitupula sebaliknya ceteris paribus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana transfer secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.

Penelitian (Watulingas, Kindangen, & Engka, 2018) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara dengan metode analisis regresi berganda, disimpulkan bahwa Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sulawesi utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Sulawesi utara berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sumber-sumber PAD yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang diharapkan dan diupayakan menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya. Terdapat kegiatan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Rori, Luntungan dan Niode (2016) menganalisis Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan (13 tahun) yang dipublikasikan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas atau Pendapatan Asli Daerah pengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau Pertumbuhan Ekonomi.

Sutianingsih, 2020 menganalisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan analisis deskriptif, melalui Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 masing-masing diperoleh data sebesar 16,82 persen, 22,83 persen, 7,88 persen, 6,16 persen, 6,76 persen dan 2,69 persen. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2014 termasuk kategori kurang baik, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2015 termasuk kategori cukup baik, dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2016 sampai dengan 2019 termasuk kategori sangat kurang baik karena kurang dari 10 persen. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 sampai dengan 2019 berada pada kategori sangat kurang baik sampai kategori cukup baik.

Hasil penelitian Sudarmana & Sudiarta (2020) tentang Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Badung

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Meski pun retribusi daerah tidak mempengaruhi secara keseluruhan namun jumlah pendapatan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar berpengaruh positif terhadap total PAD Kabupaten Tanah Datar dan tentunya juga didukung dengan komponen-komponen pendapatan asli daerah lainnya seperti Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan. Berdasarkan hasil hipotesis uji t dapat disimpulkan bahwa

pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. (Annisa, 2018)

Eka Sri Mulyani, 2001. Berdasarkan analisis diperoleh nilai $\text{sig } 0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} = 7,587 > t_{tabel} = 2,101$ menunjukkan terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, selain itu semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonomi meningkat. Peningkatan PAD diperlukan dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki, agar dapat membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini, total pendapatan klaim JKN dan total pendapatan klaim pelayanan Kesehatan Umum sebagai variabel X1 dan X2 yang akan dilihat korelasinya dengan Variabel Y yaitu Target PAD Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu. Hubungan pengaruh antara kedua jenis variable ini digambarkan sebagai berikut :



Hipotesis Penelitian

- a. Diduga terdapat pengaruh pendapatan klaim JKN terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.
- b. Diduga terdapat pengaruh pendapatan klaim pelayanan Kesehatan Umum terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.
- c. Diduga terdapat pengaruh pendapatan klaim JKN dan pendapatan klaim pelayanan Kesehatan Umum terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data dan Sumber Data Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan data yang sebenarnya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

Sumber data berasal dari berbagai sumber antara lain, Bagian Keuangan RSUD Kotamobagu, Bagian JKN RSUD Kotamobagu, jurnal-jurnal ilmiah dan literatur - literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Tempat dan Waktu Penelitian

Bagian Keuangan RSUD Kotamobagu, Bagian JKN RSUD Kotamobagu, jurnal-jurnal ilmiah dan literatur - literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Waktu penelitian yang digunakan sejak Bulan Oktober 2022 sampai dengan November 2022.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dengan mendatangi instansi terkait dan melakukan pengumpulan data sekunder di instansi tersebut. Melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan literatur/teori bahkan beberapa studi empiris sebelumnya yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pelayanan kesehatan.

Metode Analisis Regresi Dummy Variabel

Alat analisa yang dipakai untuk mengetahui ada tidaknya paradoks pertumbuhan ekonomi menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah salah satu teknik statistika yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen yang bersifat linier terhadap satu variabel dependen. Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) yaitu mengestimasi garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Gujarati, 2012).

Analisis dengan variabel dummy dilakukan untuk objek penelitian yaitu Pendapatan Pelayanan Kesehatan RSUD Kotamobagu sebagai Variabel independen dan target PAD Sektor Kesehatan Pemerintah Kota Kotamobagu sebagai variabel dependen. Dan adanya kondisi pandemi COVID 19 sebagai dummy variable.

Persamaan matematis untuk model regresi berganda dengan dummy variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 D_1 + e$$

Dimana:

- Y = PAD Kesehatan
- X₁ = Pendapatan Klaim JKN
- X₂ = Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan Umum
- D₁ = Dummy Pandemi COVID 19
- e = Error term
- β₀ = Intersep
- β₁- β₄ = koefisien regresi

Pengujian Hasil Persamaan Regresi

Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H₀ ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H₀ diterima. Dalam analisis regresi terdapat tiga jenis kriteria ketetapan (godness of fit): (i) koefisien determinasi (ii) uji statistik F, dan (iii) uji statistik t.

Koefisien Determinasi.

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Formula menghitung koefisien determinasi adalah:

$$R^2 = (TSS - SSE) / TSS = SSR / TSS$$

Keterangan:

- TSS = total jumlah kuadrat
- SSE = jumlah pangkat error
- SSR = jumlah pangkat karena regresi

Uji signifikan simultan (Uji statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H₀) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a), tidak semua parameter secara simultan sama

dengan nol, atau:

$$H_a: b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Pyndick, 1998)

Uji signifikansi individual (Uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau:

$$H_0: b_i = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen.

Hipotesis alternatif parameter suatu variabel tidak sama dengan nol.

$$H_a: b_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2013:244).

Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

Pengujian model terhadap asumsi klasik diberlakukan pada persamaan struktural yang meliputi:

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan melihat normal probability plot yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas, menurut Frisch dikemukakan bahwa suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang perfect atau exact di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Terjadinya multikolinieritas yang rawan pada model regresi bisa dideteksi keberadaannya bila R^2 dari auxiliary regression melebihi R^2 regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu jika nilai varian inflation faktor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas.

Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedasitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas (Y_i) meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas (X_i), maka varian dari Y_i adalah tidak sama. Gejala heteroskedasitas lebih sering dalam data cross section dari pada time series. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-rata. Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedasitas digunakan metode grafik scatter plot, uji White, dimana apabila nilai probabilitas $n(p \text{ value})$ observasi R^2 lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5\%$), maka residual digolongkan homoskedasitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Dalam data time series observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu, besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antara dua observasi sangat pendek. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM test) dimana apabila probabilitas $f \text{ hitung} > \alpha$ (5%), maka bebas dari autokorelasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adapun Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Model persamaan dalam penelitian ini adalah model regresi dengan dummy variable adalah sebagai berikut :
Sehingga model emi log (model Lin-Log), dimana transformasi hanya dilakukan terhadap variable bebas saja atau X₁, X₂ dan X₃ sementara variable Y tetap dalam bentuk linier. Dengan demikian persamaan model ini dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3D1 +e$$

Tabel 4
Hasil Regresi

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/08/22 Time: 02:29
Sample (adjusted): 2 48
Included observations: 47 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.51E+09	95918252	26.12983	0.0000
X1	4.25E+08	2.03E+08	2.096704	0.0418
X2	4.20E+08	2.10E+08	1.996706	0.0521
D01	2.79E+08	1.40E+08	1.990673	0.0529
R-squared	0.756869	Mean dependent var	2.64E+09	
Adjusted R-squared	0.713963	S.D. dependent var	4.88E+08	
S.E. of regression	4.79E+08	Akaike info criterion	42.89451	
Sum squared resid	9.88E+18	Schwarz criterion	43.05197	
Log likelihood	-1004.021	Hannan-Quinn criter.	42.95376	
F-statistic	17.64037	Durbin-Watson stat	0.360485	
Prob(F-statistic)	0.000018			

Persamaan regresi yang terbentuk dari hasil pengolahan data menggunakan EViews 12 adalah sebagai berikut :

$$Y = 2,51E+09 + 4,25E+08X_1 + 4,20E+08 X_2 + 2,79E+08 D1 +e$$

Uji Statistic F

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap variabel tetap. Dari hasil pengolahan menggunakan evIEWS dapat dilihat Prob (F-statistik) 0,00018. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.01$, Prob (F-statistik) $0,000018 > \alpha = 0.01$,
 $H_a: b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$

Yang artinya semua variabel bebas (X₁, dan X₂) secara bersama – sama atau simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

Uji Statistic t

Berdasarkan hasil t pada tabel analisis regresi berganda dengan aplikasi evIEWS menunjukkan adanya tingkat signifikansi Variabel pendapatan klaim JKN (X₁) dan jumlah klaim pelayanan kesehatan umum (X₂) terhadap PAD Sektor Kesehatan di Kota Kotamobagu.

1. Variabel Pendapatan klaim JKN (X₁) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0418. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas X₁ $0,0418 > 0,05$, berarti H₀ ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Klaim JKN (X₁) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.
2. Variabel Pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum (X₂) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0521 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,1$, Nilai probabilitas X₂ $0,0521 < 0,01$, berarti H₀ ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel klaim pelayanan kesehatan

- umum (X_2) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.
3. Variabel Dummy Pandemi COVID 19 (D_1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0529 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, nilai probabilitas D_1 0,0529 < 0,05, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel dummy pandemi (D_1) mampu membedakan PAD sektor kesehatan dimasa sebelum pandemi dan dimasa pandemi di Kota Kotamobagu.

Koefisien Determinasi

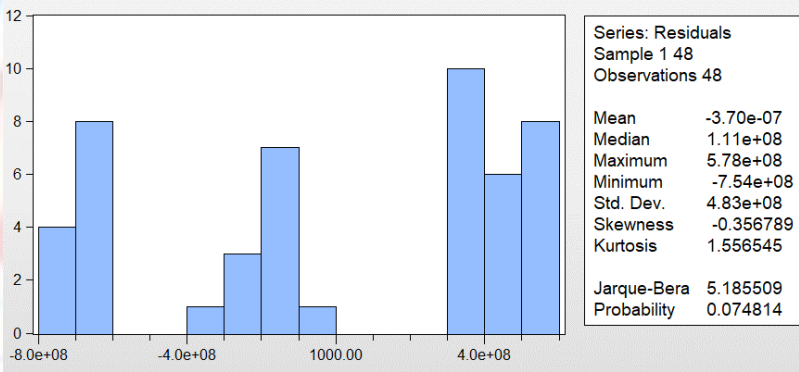
Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adj. R^2) sebesar 0.713963 atau 71,39 % . Hal ini menunjukkan bahwa variabel – variabel independent dalam hal ini pendapatan klaim JKN (X_1), dan pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum (X_2) secara bersama – sama memiliki pengaruh 71,39% terhadap PAD Sektor kesehatan Kota Kotamobagu. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

• Pengujian Model dengan Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan melihat normal probability plot yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

Untuk menguji data pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque Bera test (J-B).

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (5,15m7) $0, > \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

Tabel 5
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 12/08/22 Time: 03:10
Sample: 1 48
Included observations: 48

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.46E+16	6.970427	NA
X2	0.275918	6.970427	1.000000

Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Untuk melihat apakah model mengalami multikolinearitas, jika nilai varian inflation faktor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas. Dari hasil uji multikolinearitas pada model ini, inflation faktor (VIF) pada X_1 , $X_2 < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Heteroskeditas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Tabel 6
Uji White

Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.654015	Prob. F(3,10)	0.2391
Obs*R-squared	4.642991	Prob. Chi-Square(3)	0.1999
Scaled explained SS	1.030337	Prob. Chi-Square(3)	0.7939

Sumber : Hasil olah data Eviews

Dari hasil uji Heteroskedastisitas dengan uji white menggunakan Eviews dapat dilihat bahwa nilai probabilitas observasi R^2 sebesar 0,1999 jika dibandingkan dengan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5 \%$), $0,1999 > 0,05$ artinya residual digolongkan homoskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dengan nilai Durbin Watson statistic. Hasil run evIEWS menunjukkan bahwa nilai DW statistic adalah 0,360485 atau kurang dari 2 artinya tidak ada autokorelasi.

Berdasarkan Persamaan dan hasil pengujian – pengujian diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Secara parsial, pendapatan klaim JKN berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD sektor kesehatan. Nilai koefisien regresi pendapatan klaim JKN sebesar 4,25E+08.
2. Secara parsial, pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum signifikan dan positif terhadap PAD sektor kesehatan. Nilai koefisien regresi pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum adalah sebesar 4,20E+08.
3. Secara parsial, terdapat perbedaan PAD kesehatan sebelum pandemi dan dimasa pandemi COVID 19 yang ditandai dengan adanya perbedaan pendapatan yang diperoleh dari klaim JKN dan klaim pelayanan kesehatan umum saat pandemi.

4. Secara simultan, dapat dilihat nilai Prob (F-statistik) $17,64037 > \alpha = 0.05$ yang berarti pendapatan klaim JKN dan pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum secara bersama – sama berpengaruh terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Pembahasan

Berdasarkan hasil olahan data, ternyata pendapatan klaim JKN dan klaim pelayanan kesehatan umum mempengaruhi PAD kesehatan, sama seperti hasil penelitian Watulingas (2018), Sutianingsih (2020), Sartika dkk (2019), Sudarman dan Sudiarta (2020), Anissa (2018).

Berdasarkan hasil Analisis regresi linier berganda dapat dilihat hasil analisis pengaruh dari masing – masing variabel independen (X_1 , X_2) terhadap variable dependen (Y) sebagai berikut :

Pengaruh pendapatan klaim JKN terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Variabel Pendapatan klaim JKN (X_1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0418. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas X_1 0,0418 $> 0,05$, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Klaim JKN (X_1) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Pengaruh pendapatan klaim pelayanan Kesehatan Umum terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Variabel Pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum (X_2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0521 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas X_2 0,0521 $< 0,05$, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel klaim pelayanan kesehatan umum (X_2) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Pengaruh pendapatan klaim JKN dan pendapatan klaim pelayanan Kesehatan Umum terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dengan nilai Durbin Watson statistic. Hasil run eviews menunjukkan bahwa nilai DW statistic adalah 0,360485 atau kurang dari 2 artinya tidak ada autokorelasi. Secara simultan, dapat dilihat nilai Prob (F-statistik) $17,64037 > \alpha = 0.05$ yang berarti pendapatan klaim JKN dan pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum secara bersama – sama berpengaruh terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan klaim JKN berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD Sektor Kesehatan di Kota Kotamobagu.
2. Pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD Sektor Kesehatan di Kota Kotamobagu.
3. Secara bersama-sama klaim JKN dan klaim pelayanan kesehatan umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Sektor kesehatan di Kota Kotamobagu.

Saran

1. Jasa layanan kesehatan merupakan upaya yang esensial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat. peningkatan inflasi dimana tingkat inflasi tahunan rata-ratanya dalam kurun waktu 10 tahun adalah sebesar 4,23%, perlu untuk dilakukan revisi tarif retribusi kesehatan. Dengan adanya revisi tarif maka pendapatan dari klaim pelayanan kesehatan umum dan klaim JKN akan meningkat dan otomatis berpengaruh pada target PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.
2. RSUD kotamobagu terus meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan pendapatan pelayanan kesehatan melalui : Pendaftaran Online (SIMRS

online), Pembayaran pelayanan kesehatan umum online, penambahan Ruangan/ Kamar operasi dengan teknologi yang lebih canggih, Pelayanan Operasi katarak, Pelayanan Operasi THT, alat penunjang Pemeriksaan jantung dengan tehnik *treadmill* dan *echo*, Poli rehab medik dengan sarana terlengkap yang ada di kotamobagu, Jejaring pemeriksaan Laboratorium dengan PT. prodia, Pelaksanaan Diklat dan In house Training bagi Tenaga Kesehatan dan Non kesehatan RSUD Kotamobagu serta penambahan tenaga Dokter Spesialis

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2008**, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, cet. III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Annisa Nabilatul Khaira, 2018**, Pengaruh Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Tanah Datar, Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004**. Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/9061>
- Eka Sri Mulyani, 2020**, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur 2020, Universitas Mulawarman
- Geralda J.P Sulung1 , Een N. Walewangko2 , Irawaty Masloman, 2022**, Jurnal Berkala Efisiensi Volume 22 No. 5 Bulan Juli 2022, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado,
- Hasan, M, 2016**, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 4 No. 11
- Kuncoro, Mudrajad 2010**. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Fokusmedia, Jakarta
- Risky Joko Manaida, Adisti A. Rumayar, Grace D. Kandou. 2017**. analisis prosedur pengajuan klaim badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan di rawat inap rumah sakit umum pancaran kasih gmim manado. Vol 6, no 3.
- Rory, C. F., Luntungan, A. Y., & Niode, A. O. (2016)**. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No.02.
- Sulaiman, M. 2020**, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan. Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Mulawarman
- Supit Watulingas, C. A., Kindangen, P., & Engka, D. S. (2018)**. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Volume 19 No.3.
- Sutianingsih, Shinta Eka Kartika, Widowati, 2020**, Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, Mataram, Indonesia Regional Retribution and Revenue
- Sudarmana, I Putu. A, Sudiarta, G. M. 2020**. Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia. E-Jurnal Manajemen, Vol. 9, No. 4, 2020 : 1338-1357.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2004. Undang - Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah.

ANALISIS PENGARUH BANTUAN SOSIAL, PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA BITUNG

Jessy Wensen¹, Tri Oldy Rotinsulu², Ita Pingkan F. Rorong³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi ,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email : jessywensen1@gmail.com, o_rotinsulu@unsrat.ac.id, itapingkan@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis pengaruh bantuan sosial PKH dan BPNT terhadap tingkat kesejahteraan yaitu kemiskinan, pendidikan dan kesehatan di Kota Bitung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner atau angket sedangkan alat analisis menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, Metode kuadrat terkecil/*Ordinary least square* merupakan estimasi titik sampel, karena itu masalah verifikasi estimasi titik tersebut melalui interal estimasi maupun uji hipotesis melalui uji t. dengan menggunakan table distribusi t kita mendapatkan nilai t kritis (t_c) dengan signifikansi $t_{\alpha/2}$ dan df (*degree of freedom*) $n-k$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter estimasi termasuk konstanta. Dalam penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah untuk menguji kualitas data berupa uji validitas dan reliabilitas. Dari hasil uji validitas yang dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 26 menunjukkan bahwa koefisien korelasi *Person Moment* untuk setiap item butir pertanyaan dengan skor total variabel PKH (X_1), BPNT (X_2), Kemiskinan (Y_1) Pendidikan (Y_2) dan Kesehatan (Y_3). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PKH dan BPNT berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, pendidikan dan kesehatan di Kota Bitung. Pentingnya pemerintah mengoptimalkan kualitas pelayanan PKH dan BPNT agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Kata Kunci: PKH, BPNT, Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of PKH and BPNT social assistance on welfare levels, namely poverty, education and health in Bitung City. The data used in this study are primary data in the form of questionnaires or questionnaires while the analysis tool uses Multiple Linear Regression Analysis. The Ordinary least squares method is an estimation of sample points, therefore the problem is verifying the point estimates through internal estimation and hypothesis testing through t tests. . by using the t distribution table we get the critical t value (t_c) with significance $t_{\alpha/2}$ and df (*degree of freedom*) $n-k$ where n is the number of observations and k is the number of estimated parameters including constants. In the research that has been collected then processed to test the quality of the data in the form of validity and reliability tests. From the results of the validity test carried out with the help of the SPSS version 26 program, it shows that the Person Moment correlation coefficient for each question item item with a total score of PKH (X_1), BPNT (X_2), Poverty (Y_1) Education (Y_2) and Health (Y_3) variables . The research results show that PKH and BPNT have a significant effect on poverty, education and health in Bitung City. It is important for the government to optimize the quality of PKH and BPNT services so that the desired goals are achieved.

Keywords: PKH, BPNT, Poverty, Education and Health

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat berupa program bantuan sosial yang merupakan program yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dan tidak mampu dengan tujuan meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan. Bantuan sosial dapat

berupa bantuan tunai maupun non tunai yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Masyarakat berhak untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan yang layak untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Berikut ini adalah perkembangan dana Belanja Bantuan Sosial Kota Bitung Tahun 2016 sampai 2021:

Tabel 1
Belanja Bantuan Sosial Kota Bitung
Tahun 2016-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2016	Rp. 5.633.350.000	Rp. 4.346.800.000	77,16
2017	Rp. 9.000.000.000	Rp. 8.440.600.000	93,78
2018	Rp. 7.315.000.000	Rp. 7.161.500.000	97,90
2019	Rp. 3.750.000.000	Rp. 3.451.500.000	92,04
2020	Rp. 3.500.000.000	Rp. 2.678.000.000	76,51
2021	Rp. 1.250.000.000	Rp. 936.000.000	74,88

Sumber :Laporan Realisasi APBD T.A 2016 s/d 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Bitung masih kecil dilihat dari presentase realisasi yang belum mencapai 100%. Tahun 2016 presentasi realisasi belanja bantuan sosial Kota Bitung hanya mencapai 77,16% tahun 2017 meningkat menjadi 93,78% dan tahun 2019 meningkat menjadi 97,90%. Pada tahun 2019 presentase realisasi belanja bantuan sosial Kota Bitung turun menjadi 92,04% tahun 2020 juga turun menjadi 76,51% dan tahun 2021 hanya sebesar 74,88%.

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007. PKH sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara. Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif, dan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Program BPNT merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam perubahan pola pengeluaran rumah tangga yaitu dengan peningkatan konsumsi pangan maupun non pangan rumah tangga.

Tabel 2
Penerima PKH dan BPNT di Kota Bitung Tahun 2021

KECAMATAN	KPM	%
MAESA	1.401	20,84
AERTEMBAGA	1.060	15,76
GIRIAN	867	12,89
MADIDIR	766	11,39
MATUARI	765	11,39
LEMBEH SELATAN	663	9,86
LEMBEH UTARA	640	9,52
RANOWULU	560	8,33
JUMLAH	6.722	

Sumber : Dinas Sosial Kota Bitung

Dari data penerima PKH Tahun 2021 di 8 Kecamatan di Kota Bitung tampak penerima terbanyak Kecamatan Maesa 1.401 (20.84 %) , Kecamatan Aertembaga 1.060 (15,76 %) dan Kecamatan Girian 867 (12,89 %). Dilihat dari jumlah penerima PKH dan BPNT di kota Bitung Tahun 2021 sebanyak 6.722 KPM. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait judul **“Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bitung”**.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk meneliti pengaruh PKH dan BPNT terhadap kemiskinan di Kota Bitung.
- 2. Untuk meneliti pengaruh PKH dan BPNT terhadap pendidikan di Kota Bitung.
- 3. Untuk meneliti pengaruh PKH dan BPNT terhadap kesehatan di Kota Bitung.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti :

- 1. Kepada pemerintah dimana untuk bahan referensi dan informasi dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan kesejahteraan masyarakat.
- 2. Sebagai referensi atau masukan bagi peneliti, untuk penelitian lebih lanjut.

Tinjauan Pustaka
Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan, kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.

Menurut Sunarti (2006), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kemiskinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak –hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk, Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

- 1) Kemiskinan Absolut
Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.
- 2) Kemiskinan Relatif
Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.
- 3) Kemiskinan Kultural
Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.
- 4) Kemiskinan Struktural
Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya di singkat (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan / atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin di olah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan di tetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sasaran PKH merupakan keluarga dan / atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan / atau kesejahteraan sosial (Permensos no 1 tahun 2018).

PKH adalah sebuah model perlindungan sosial berbasis keluarga. Secara konseptual PKH termasuk dalam kategori bantuan sosial (*social assistance*), yakni program jaminan sosial (*social security*) yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada keluarga rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Keluarga miskin, pengangguran, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kaum minoritas, yatim-piatu, kepala keluarga tunggal, pengungsi, dan korban konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok sasaran bantuan sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah kebijakan program yang dirumuskan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk di Indonesia. Merujuk pada Nugroho (2004), untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat diperlukan kebijakan sebagai realisasi dari fungsi dan tugas negara serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan (dalam konteks peran Pemerintah sebagai pemangku otoritas publik) dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ada di ranah publik. Dan untuk itu dibutuhkan bukan hanya perumusan (rencana) program, tetapi juga implementasi program guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Karena itu kebijakan perlindungan sosial mestinya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. Responsif terhadap realitas kebutuhan dan kondisi kehidupan kelompok sasaran;
- b. Terjangkau dalam konteks perencanaan anggaran jangka pendek dan panjang;
- c. Berkelanjutan, baik secara finansial dan politik;
- d. Adanya kelembagaan dalam struktur pemerintahan yang berkelanjutan maupun kelembagaan di tingkat implementasi terutama di struktur masyarakat sipil;
- e. Dibangun dengan prinsip memanfaatkan kemampuan individu, rumah tangga dan komunitas serta menghindari penciptaan ketergantungan dan stigma dan;
- f. Mampu menanggapi skenario yang berubah cepat dan munculnya tantangan baru;

Bantuan Pangan Non Tunai

Sebelum adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah dalam menangani kemiskinan yaitu dengan adanya program Raskin. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program lanjutan dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), dimana pemerintah hanya memberikan beras 10 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI NO. 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Pangan Non Tunai.

Tahun 2017 pemerintah menjalankan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Rastra diganti dengan program Voucher Pangan. Voucher pangan dapat digunakan untuk menembus atau membeli berbagai bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng dan lainnya di pasar, di warung, di toko atau agen khusus yang diberi nama e-warung. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Dengan adanya reformasi ini, rakyat yang belum sejahtera dan belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan yang bisa membeli sembako di pasar ataupun di toko dengan kualitas yang lebih serta juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Yang Dilakukan Oleh Firda Wiku, Tri Oldy Rotinsulu, Een N Walewangko (2020) Analisis Pengaruh Bantuan Sosial (Pkh Dan Kube) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode analisis yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (Ols). Hasil penelitian variasi perubahan peningkatan kesejahteraan rumah tangga 65,4% disebabkan oleh variasi perubahan jumlah bantuan sosial (Pkh Dan Kube) yang diterima rumah tangga. 34,6% disebabkan oleh bantuan-bantuan sosial lainnya yang diberikan pemerintah baik pusat dan daerah pada keluarga penerima manfaat di kabupaten Minahasa Tenggara.

Penelitian Yang Dilakukan Oleh Helvine Gultom, Paulus Kindangen, George M.V. Kawung (2020) Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan pangan non tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan artinya, apabila bantuan pangan non tunai mengalami kenaikan maka kemiskinan akan naik begitu sebaliknya *Ceteris Paribus*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keluarga harapan berpengaruh positif terhadap kemiskinan akan tetapi tidak signifikan secara statistik artinya, apabila Program Keluarga Harapan naik maka tingkat kemiskinan akan naik *Ceteris Paribus*. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antara program keluarga harapan terhadap kemiskinan. Akan tetapi hasil ini tidak signifikan secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan.

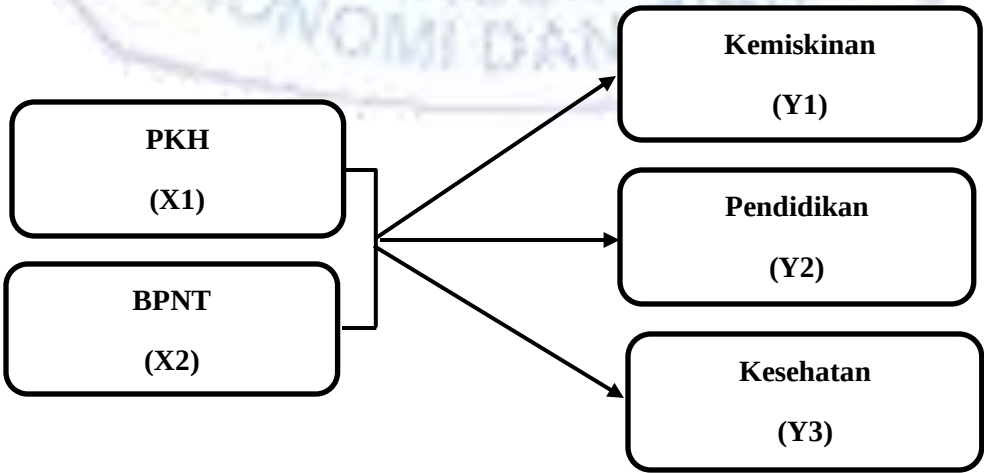
Penelitian Yang Dilakukan Oleh Risky Pratama, Paulus Kindangen, Een N. Walewangko (2017) Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan analisis Path.Hasil analisis menunjukkan investasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi begitu juga dengan tenaga kerja yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan investasi memberikan pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, akan tetapi Tenaga Kerja secara tidak langsung belum bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara.

Penelitian Yang Dilakukan Oleh Elvira Handayani Jacobus, Paulus Kindangen, Een N. Walewangko (2018) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara.Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda.Hasil penelitian yang didapat pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Rumah Tangga. Kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Rumah Tangga. Kepemilikan aset berpengaruh positif signifikan terhadap Kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Prabin Khanal(2013) yang berjudul *The nature of chronic and transient Poverty: analyzing poverty dynamics In Nepal*. Cross sectional data are widely applied for studying and analyzing poverty at a particular point in time. However, it does not incorporate the changes in welfare level of an individual over a period in time.This paper uses the concept of poverty dynamics for studying the chronic and transient nature of poverty in different areas of Nepal.Using the data of Nepal Living Standard Survey (NLSS) of 1995/96 and 2003/04,this study reveals that the concentration of chronic poverty is larger than the transient poverty.Policies required for taking out chronic and transient poor from the state of poverty should be applied in a different way.

Penelitian yang dilakukan oleh Martin Ravallion (2001) yang berjudul *Growth, Inequality and Poverty Looking Beyond Averages*. The available evidence suggests that the poor in developing countries typically do share in the gains from rising aggregate affluence, and in the losses from aggregate contraction. But there are large differences between countries in how much poor people share in growth, and there are diverse impacts among the poor in given country. Crosscountry correlations are clouded in data problems, and undoubtedly hide welfare impact, they can be deceptive fordevelopment policy. There is a need for deeper micro emprical work on growth and distributional change.

Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Hipotesis

- 1. Diduga bahwa PKH dan BPNT berpengaruh terhadap Kemiskinan.

- 2. Diduga bahwa PKH dan BPNT berpengaruh terhadap Pendidikan
- 3. Diduga bahwa PKH dan BPNT berpengaruh terhadap Kesehatan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan antara PKH dan BPNT terhadap kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan di Kota Bitung.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Bitung dengan pengambilan data melalui Dinas Sosial Kota Bitung dan juga penyebaran kuesioner. Waktu penelitian dilakukan selama tahun 2022.

Populasi, Besaran Sampel dan Teknik Sampling

Populasi menurut Sugiyono (2017:80) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penentuan populasi merupakan tahapan penting dalam penelitian. Populasi dapat memberikan informasi atau data yang berguna bagi suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana dan jumlah populasi yang sangat banyak Maka peneliti harus mengambil sampel yang benar-benar representatif (dapat mewakili). Untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dari populasi peneliti menggunakan rumus yang dikemukakan oleh slovin dalam Mustafa (2010:90) dengan tingkat kepercayaan 90% dengan nilai e=5% adalah sebagai berikut:

Rumus :
$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana :

- n = Jumlah Sampel
- N = Jumlah Populasi
- e = Tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang ditolelir sebesar 5%

Terdapat teknik dalam pengambilan sampel untuk melakukan penelitian, menurut Sugiyono (2017:81) menjelaskan bahwa teknik sampel merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian,terdapat beberapa teknik sampling yang digunakan.

Teknik sampling dibagi menjadi dua kelompok yaitu probability sampling dan non probability sampling. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan probability sampling. Menurut Sugiyono (2017:82) “probability sampling adalah Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”. Probability sampling terdiri dari simple random sampling, propionate stratified random sampling, disproportionate stratified random, sampling area (*cluster*) sampling. Pada penelitian ini peneliti menggunakan simple random sampling, kemudian menurut Sugiyono (2017:82) Simple Random Sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari perseorangan maupun individu, contohnya dari hasil penelitian kuesioner atau dari hasil wawancara yang biasa di lakukan peneliti (Ferdinand ,2006).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas angket atau kuesioner dan dokumentasi.

1. Angket atau kuesioner untuk mencari data langsung dari penerima bantuan sosial. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pengertian metode angket menurut Arikunto “Angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui” (Arikunto, 2002:151). Angket atau kuesioner dibedakan menjadi dua macam: yaitu angket/ kuesioner dengan item pertanyaan secara terbuka dan angket/kuesioner dengan pertanyaan tertutup (Sukardi, 2004:77). Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner tertutup yaitu menyediakan beberapa alternatif jawaban, yang cocok bagi responden. Sehingga responden tinggal memilih dari jawaban yang ada yang paling mendekati pilihan responden. Adapun pilihan yang disediakan terdiri dari 4 alternatif jawaban seperti pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Alternatif Jawaban, Skor dan Keterangan Instrumen

Alternatif Jawaban	Skor	Keterangan
Sangat Setuju (SS)	5	Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan/ pertanyaan itu lebih banyak terjadi daripada tidak terjadi
Setuju (S)	4	Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan/ pertanyaan bisa terjadi dan bisa tidak terjadi
Kurang Setuju (KS)	3	Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan/ pertanyaan bisa terjadi dan lebih sering tidak terjadi
Tidak Setuju (TS)	2	Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan/pertanyaan terjadi sekali saja
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan/ pertanyaan tidak pernah terjadi

Semakin tinggi skor yang diperoleh dari angket, maka akan semakin baik keadaan yang bersangkutan pada variabel X dan Y. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh maka akan semakin buruk keadaan yang bersangkutan pada variabel X dan Y.

2. Dokumentasi, yaitu koleksi dokumen-dokumen yang terkait dengan kebutuhan penelitian seperti buku-buku dan laporan, lembaga resmi pemerintah dan catatan lapangan fasilitator.

Metode Analisis
Analisis Regresi Berganda

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*).

Metode kuadrat terkecil/*Ordinary least square* merupakan estimasi titik sampel, karena itu masalah verifikasi estimasi titik tersebut melalui interal estimasi maupun uji hipotesis melalui uji t. dengan menggunakan table distribusi t kita mendapatkan nilai t kritis (t_c) dengan signifikansi $t_{\alpha/2}$ dan df (*degree of freedom*) $n-k$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter estimasi termasuk konstanta. (Widarjono, 2016 : 59).

Didalam hasil perhitungan regresi berganda analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kuatnya tingkat hubungan linear antara dua variabel. Untuk mengukur kuatnya hubungan (korelasi) antara dua variabel X diberi symbol r_{xy} atau r saja. Nilai letaknya antara -1 dan 1, nilai

$r = 1$, berarti hubungan X dan Y sempurna dan positif. Nilai $r = 0$, berarti hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, naik turunnya X tidak dipengaruhi Y, sedangkan, kalau hubungannya positif, pada umumnya kenaikan (penurunan) X, menyebabkan kenaikan (penurunan) Y, sebaliknya untuk hubungan yang negative pada umumnya kenaikan (penurunan) X menyebabkan penurunan (kenaikan) Y. (Widarjono, 2013 : 7).

1. Uji Statistik

Menurut Widarjono (2016) untuk mengetahui kebenaran hipotesis, maka perlu dilakukan uji statistik berupa uji t, uji F dan Koefisien Determinasi R^2 (*Goodness Of Fit*).

2. Uji t – test Statistik

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual dan untuk mengetahui dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain konstan atau tetap. Langkah – langkah pengujiannya sebagai berikut : Hipotesis :

- 1) $H_0 : \beta_i = 0$, artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) $H_a : \beta_i \neq 0$, artinya variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 3) Nilai t tabel dapat dicari dengan rumus : T tabel : $t_{\alpha : n-k}$. Dimana : α = derajat signifikan, n = jumlah sampel (observasi) k = banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta
- 4) T hitung dapat dicari dengan rumus : Dimana : $t = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$, β_i = koefisien regresi, $Se(\beta_i)$ = standar error Koefisien Regresi.
- 5) Kriteria pengujian :
 - a) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima. Berarti variabel independen tersebut secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
 - b) jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji F- test Statistik

Uji F dilakukan untuk mengetahui proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama, dilakukan pengujian hipotesis secara serentak dengan menggunakan uji F. Hipotesis :

- 1) $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 3) Nilai F table dapat dicari dengan rumus : F table : $F_{\alpha : n-k : k-1}$, Dimana : α = derajat signifikan, n = jumlah sampel (observasi), k = banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta, F-hitung diperoleh dengan rumus : $F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$. Dimana : R^2 = koefisien determinasi, n = jumlah sampel (observasi), k = banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta. Kriteria pengujian :
 - a) Jika $F \text{ hitung} < F \text{ table}$, maka H_0 diterima. Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
 - b) Jika $F \text{ hitung} > F \text{ table}$, maka H_0 ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

4. Koefisien Determinasi R^2

R^2 adalah suatu besaran yang lazim dipakai untuk mengukur kebaikan kesesuaian (*goodness of fit*), yaitu bagaimana garis regresi mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Didalam regresi sederhana kita juga akan menggunakan koefisien determinasi untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang kita punyai. Dalam hal ini kita mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Formula untuk

menghitung koefisien determinasi (R^2) regresi sederhana. $R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{TSS-SSR}{TSS}$, $R^2 = 1 - \frac{ESS}{TSS}$, $1 - \frac{\sum \hat{e}_i^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}$. (Widarjono 2013 : 24)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas Data

Dalam penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah untuk menguji kualitas data berupa uji validitas dan reliabilitas. Dari hasil uji validitas yang dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 26 menunjukan bahwa koefisien korelasi *Person Moment* untuk setiap item butir pertanyaan dengan skor total variabel PKH (X_1), BPNT (X_2), Kemiskinan (Y_1) Pendidikan (Y_2) dan Kesehatan (Y_3), Instrumen untuk mengukur variable Bantuan Tunai dalam penelitian ini berupa angket dengan 5 butir pertanyaan disetiap variabel Butir pertanyaan dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Secara ringkas hasil uji validitas variabel dapat dilihat pada tabel 4. berikut ini

Tabel 4.
Hasil Uji Validitas Variabel PKH

No	Koefisien Korelasi		
	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item 1	0.680	0,0978	Valid
Item 2	0.848	0,0978	Valid
Item 3	0.783	0,0978	Valid
Item 4	0.873	0,0978	Valid
Item 5	0.891	0,0978	Valid

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Berdasarkan tabel 4. untuk hasil uji validitas variabel PKH dimana membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Diketahui bahwa r hitung setiap item pertanyaan lebih besar dari r tabel, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dapat disimpulkan bahwa item 1 sampai dengan item 5 dinyatakan valid. Selanjutnya instrumen untuk mengukur BPNT dalam penelitian ini berupa angket dengan 5 butir pertanyaan disetiap variabel Butir pertanyaan dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Secara ringkas hasil uji validitas variabel dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel BPNT

No	Koefisien Korelasi		
	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item 1	0.601	0,0978	Valid
Item 2	0.576	0,0978	Valid
Item 3	0.758	0,0978	Valid
Item 4	0.734	0,0978	Valid
Item 5	0.739	0,0978	Valid

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Berdasarkan tabel 5 untuk hasil uji validitas variabel BPNT dimana membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Diketahui bahwa r hitung setiap item pertanyaan lebih besar dari r tabel, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dapat disimpulkan bahwa item 1 sampai dengan item 5 dinyatakan valid. Selanjutnya instrumen untuk mengukur variable Kemiskinan dalam penelitian ini berupa angket dengan 5 butir pertanyaan disetiap variabel Butir pertanyaan dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Secara ringkas hasil uji validitas variabel dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Variabel Kemiskinan

No	Koefisien Korelasi		
	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Item 1	0.750	0.0978	Valid
Item 2	0.720	0.0978	Valid
Item 3	0.777	0.0978	Valid
Item 4	0.671	0.0928	Valid
Item 5	0.867	0.0978	Valid

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Berdasarkan tabel 6 untuk hasil uji validitas variabel Kemiskinan dimana membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Diketahui bahwa r hitung setiap item pertanyaan lebih besar dari r tabel, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dapat disimpulkan bahwa item 1 sampai dengan item 5 dinyatakan valid. Selanjutnya instrumen untuk mengukur variable Pendidikan dalam penelitian ini berupa angket dengan 5 butir pertanyaan disetiap variabel Butir pertanyaan dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Secara ringkas hasil uji validitas variabel dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Variabel Pendidikan

No	Koefisien Korelasi		
	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Item 1	0.923	0.0978	Valid
Item 2	0.892	0.0978	Valid
Item 3	0.883	0.0978	Valid
Item 4	0.879	0.0978	Valid
Item 5	0.642	0.0978	Valid

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Berdasarkan tabel 7 untuk hasil uji validitas variabel Pendidikan dimana membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Diketahui bahwa r hitung setiap item pertanyaan lebih besar dari r tabel, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dapat disimpulkan bahwa item 1 sampai dengan item 5 dinyatakan valid. Selanjutnya instrumen untuk mengukur variable Kesehatan dalam penelitian ini berupa angket dengan 5 butir pertanyaan disetiap variabel Butir pertanyaan dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Secara ringkas hasil uji validitas variabel dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Hasil Uji Validitas Variabel Kesehatan

No	Koefisien Korelasi		
	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Item 1	0.712	0.0978	Valid
Item 2	0.535	0.0978	Valid
Item 3	0.917	0.0978	Valid
Item 4	0.917	0.0978	Valid
Item 5	0.917	0.0978	Valid

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Berdasarkan tabel 8 untuk hasil uji validitas variabel Kesehatan dimana membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Diketahui bahwa r hitung setiap item pertanyaan lebih besar dari r tabel, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dapat disimpulkan bahwa item 1 sampai dengan item 5 dinyatakan valid. Setelah melakukan uji validitas kemudian harus dilakukan lagi uji reliabilitas.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *One Shot*, artinya satu kali pengukuran saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan yang lainnya atau

dengan kata lain mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Berikut adalah hasil uji reliabilitas.

Tabel 9
Hasil Uji Reliabilitas Variabel PKH

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.873	5

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Berdasarkan tabel 9 hasil uji reliabilitas untuk variabel PKH memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke 5 item pertanyaan angket. Dari tabel diatas diketahui ada N of Item (banyaknya item atau butir pertanyaan angket) ada 5 buah dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,873. Karena nilai *Cronbach's Alpha* $0,873 > 0,60$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa ke 5 atau semua item pertanyaan angket untuk variabel pendapatan adalah reliabel atau konsisten. Selanjutnya uji reliabilitas variabel BPNT pada tabel 10

Tabel 10
Hasil Uji Reliabilitas Variabel BPNT

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.618	5

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Berdasarkan tabel 10 hasil uji reliabilitas untuk variabel BPNT memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke 5 item pertanyaan angket. Dari tabel diatas diketahui ada N of Item (banyaknya item atau butir pertanyaan angket) ada 5 buah dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,618. Karena nilai *Cronbach's Alpha* $0,618 > 0,60$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa ke 5 atau semua item pertanyaan angket untuk variabel bantuan non tunai adalah reliabel atau konsisten. Selanjutnya uji reliabilitas variabel kemiskinan pada tabel 11:

Tabel 11
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kemiskinan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.811	5

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Berdasarkan tabel 11 hasil uji reliabilitas untuk variabel kemiskinan memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke 5 item pertanyaan angket. Dari tabel diatas diketahui ada N of Item (banyaknya item atau butir pertanyaan angket) ada 5 buah dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,811. Karena nilai *Cronbach's Alpha* $0,811 > 0,60$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa ke 5 atau semua item pertanyaan angket untuk variabel kemiskinan adalah reliabel atau konsisten. Selanjutnya uji reliabilitas variabel Pendidikan pada tabel 12:

Tabel 12
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pendidikan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.902	5

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Berdasarkan tabel 12 hasil uji reliabilitas untuk variabel Pendidikan memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke 5 item pertanyaan angket. Dari tabel diatas diketahui ada N of Item (banyaknya item atau butir pertanyaan angket) ada 5 buah dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,902. Karena nilai *Cronbach's Alpha* $0,902 > 0,60$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa ke 5 atau semua item pertanyaan angket untuk variabel kemiskinan adalah reliabel atau konsisten. Selanjutnya uji reliabilitas variabel Kesehatan pada tabel 13:

Tabel 13
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesehatan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.629	5

Sumber : Hasil Olah SPSS 26

Berdasarkan tabel 13 hasil uji reliabilitas untuk variabel kemiskinan memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke 5 item pertanyaan angket. Dari tabel diatas diketahui ada N of Item (banyaknya item atau butir pertanyaan angket) ada 5 buah dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,629. Karena nilai *Cronbach's Alpha* $0,629 > 0,60$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa ke 5 atau semua item pertanyaan angket untuk variabel kemiskinan adalah reliabel atau konsisten.

Regresi Berganda

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*). Berikut hasil regresi untuk mengetahui pengaruh PKH (X_1), BPNT (X_2) terhadap KemiskinN (Y_1) menggunakan model OLS (*Ordinary Least Suares*). Hasil regresi bisa dilihat pada tabel 14 berikut:

$$Y_1 = a_1X_1 + a_2X_2 + E_1$$
$$Y_1 = 0.181x_1 + 0.636x_2$$

Tabel 14 Hasil Regresi
Variabel PKH dan BPNT terhadap Kemiskinan

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	3.003	.996		3.014
	X1	.138	.028	.181	4.922
	X2	.719	.042	.636	17.252

a. Dependent Variable: Y1

Hasil Olah SPSS 26

Uji Parsial (Uji t)

Hasil persamaan regresi PKH (X_1) pada tabel 14 dapat diketahui bahwa variabel PKH (X_1) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari $\alpha 1\%$, maka H_a diterima H_o ditolak. Variabel PKH (X_1) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 4,922 dan t_{tabel} 1.965 dengan df 397 ($n-k= 400-3= 397$). Jadi, $t_{hitung} 4,922 > t_{tabel} 1.965$ Artinya ada hubungan linier antara PKH dengan kemiskinan (Y_1). Jadi, dapat disimpulkan PKH memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil persamaan regresi BPNT (X_2) pada tabel 14 dapat diketahui bahwa variabel BPNT (X_2) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari $\alpha 1\%$, maka H_a diterima H_o ditolak. Variabel BPNT (X_2) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 17,252 dan t_{tabel} 1.965 dengan df 397 ($n-k= 400-3= 397$). Jadi, $t_{hitung} 17,252 > t_{tabel} 1.965$ Artinya ada hubungan linier antara BPNT dengan kemiskinan (Y_1). Jadi, dapat disimpulkan BPNT memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan.

Uji Simultan (Uji f)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 15 dapat dijelaskan pengaruh variabel PKH (X_1) dan BPNT (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y_1).

Tabel 15
Uji F Statistik

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	910.537	2	455.269	190.234
	Residual	950.103	397	2.393	
	Total	1860.640	399		

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Hasil Olah SPSS 26

Nilai F-statistik yang diperoleh 190.234 sedangkan F-tabel 3,018. Nilai F table berdasarkan besarnya $\alpha 5\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/3-1)= 2$ dan df untuk denominator $(n-k/400-3)=397$. Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya bahwa PKH (X_1) dan BPNT (X_2) secara simultan atau Bersama-sama berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y_1).

Uji Determinasi R²

Tabel 16
Uji Determinasi R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.700 ^a	.489	.487	1.54700

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Hasil Olah SPSS 26

Nilai R² yang diperoleh sebesar 0.489. artinya, variasi perubahan PKH dan BPNT mempengaruhi kemiskinan sebesar 48,9%, sedangkan sisanya (51,1%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukan dalam model.

Berikut hasil regresi untuk mengetahui pengaruh PKH (X₁) dan BPNT (X₂) terhadap Pendidikan (Y₂) menggunakan model OLS (*Ordinary Least Suares*). Hasil regresi bisa dilihat pada tabel 17 berikut:

$$Y_2 = a_1X_1 + a_2X_2 + E_1$$
$$Y_2 = 0.233x_1 + 0.741x_2$$

Tabel 17
Hasil Regresi Variabel PKH dan BPNT terhadap Pendidikan

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-3.908	1.056		.000
	X1	.239	.030	.233	.000
	X2	1.128	.044	.741	.000

a. Dependent Variable: Y2

Hasil Olah SPSS 26

Uji Parsial (Uji t)

Hasil persamaan regresi PKH (X₁) pada tabel 17 dapat diketahui bahwa variabel PKH (X₁) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari α1%, maka Ha diterima Ho ditolak. Variabel PKH (X₁) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 8.028 dan t_{tabel} 1.965 dengan df 397 (n-k= 400-3= 397). Jadi, t_{hitung} 8.028 > t_{tabel} 1.965 Artinya ada hubungan linier antara PKH dengan pendidikan (Y₂).Jadi, dapat disimpulkan PKH memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pendidikan.

Hasil persamaan regresi BPNT (X₂) pada tabel 17 dapat diketahui bahwa variabel BPNT (X₂) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari α1%, maka Ha diterima Ho ditolak. Variabel BPNT (X₂) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 25,529 dan t_{tabel} 1.965 dengan df 397 (n-k= 400-3= 397). Jadi, t_{hitung} 25,529 > t_{tabel} 1.965 Artinya ada hubungan linier antara BPNT dengan pendidikan (Y₂).Jadi, dapat disimpulkan BPNT memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Pendidikan.

Uji Simultan (Uji f)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 18 dapat dijelaskan pengaruh variabel PKH (X₁) dan BPNT (X₂) secara simultan berpengaruh terhadap Pendidikan (Y₂).

Tabel 18
Uji F Statistik

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2298.607	2	1149.303	427.154	.000 ^b
	Residual	1068.171	397	2.691		
	Total	3366.778	399			

a. Dependent Variable: Y2
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Hasil Olah SPSS 26

Nilai F-statistik yang diperoleh 427.154 sedangkan F-tabel 3,018. Nilai F table berdasarkan besarnya $\alpha 5\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/3-1)= 2$ dan df untuk denominator $(n-k/400-3)=397$. Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya bahwa PKH (X_1) dan BPNT (X_2) secara simultan atau Bersama-sama berpengaruh terhadap Pendidikan (Y_2).

Uji Determinasi R²

Tabel 19
Uji Determinasi R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.826 ^a	.683	.681	1.64031

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Hasil Olah SPSS 26

Nilai R² yang diperoleh sebesar 0.683. artinya, variasi perubahan PKH dan BPNT mempengaruhi pendidikan sebesar 68.3%, sedangkan sisanya (31,7%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukan dalam model.

Berikut hasil regresi untuk mengetahui pengaruh PKH (X_1) dan BPNT (X_2) terhadap Kesehatan (Y_3) menggunakan model OLS (*Ordinary Least Suares*). Hasil regresi bisa dilihat pada tabel 20 berikut:

$$Y_2 = a_1X_1 + a_2X_2 + E_1$$
$$Y_2 = 0.230x_1 + 0.739x_2$$

Tabel 20
Hasil Regresi Variabel PKH dan BPNT terhadap Kesehatan

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-3.878	1.070		-3.625	.000
	X1	.237	.030	.230	7.864	.000
	X2	1.128	.045	.739	25.218	.000

a. Dependent Variable: Y3

Hasil Olah SPSS 26

Uji Parsial (Uji t)

Hasil persamaan regresi PKH (X_1) pada tabel 20 dapat diketahui bahwa variabel PKH (X_1) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari $\alpha 1\%$, maka Ha diterima Ho ditolak. Variabel PKH (X_1) mempunyai nilai t hitung yakni 7.864 dan t tabel 1.965

dengan $df\ 397\ (n-k= 400-3= 397)$. Jadi, $t_{hitung}\ 7.864 > t_{table}\ 1.965$ Artinya ada hubungan linier antara PKH dengan Kesehatan (Y_3).Jadi, dapat disimpulkan PKH memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Kesehatan.

Hasil persamaan regresi BPNT (X_2) pada tabel 20 dapat diketahui bahwa variabel BPNT (X_2) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari $\alpha 1\%$, maka H_0 diterima H_0 ditolak. Variabel BPNT (X_2) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 25,218 dan $t_{tabel}\ 1.965$ dengan $df\ 397\ (n-k= 400-3= 397)$. Jadi, $t_{hitung}\ 25,218 > t_{tabel}\ 1.965$ Artinya ada hubungan linier antara BPNT dengan kesehatan (Y_3). Jadi, dapat disimpulkan BPNT memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Kesehatan.

Uji Simultan (Uji f)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 21 dapat dijelaskan pengaruh variabel PKH (X_1) dan BPNT (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap Kesehatan (Y_3).

Tabel 21
Uji F Statistik

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2294.387	2	1147.193	415.843	.000 ^b
	Residual	1095.211	397	2.759		
	Total	3389.597	399			

a. Dependent Variable: Y3
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Hasil Olah SPSS 26

Nilai F-statistik yang diperoleh 415.843 sedangkan F-tabel 3,018. Nilai F table berdasarkan besarnya $\alpha 5\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/3-1)= 2$ dan df untuk denominator $(n-k/400-3)=397$. Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya bahwa PKH (X_1) dan BPNT (X_2) secara simultan atau Bersama-sama berpengaruh terhadap Kesehatan (Y_3).

Uji Determinasi R²

Tabel 22
Uji Determinasi R

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.823 ^a	.677	.675	1.66094

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Hasil Olah SPSS 26

Nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0.677. artinya, variasi perubahan PKH dan BPNT mempengaruhi pendidikan sebesar 67.7%, sedangkan sisanya (32,3%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukan dalam model.

Pembahasan

1. PKH dan BPNT terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa PKH dan BPNT berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Bitung. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah langkah asistensi atau bantuan sosial yang diperuntukkan kepada keluarga-keluarga dengan spesifikasi atau kualifikasi tertentu dengan tujuan dasar perubahan taraf kehidupan ekonomi dan sosial. PKH bertujuan mengubah perilaku miskin. Program ini merupakan bantuan yang

didasarkan pada kriteria tertentu penerima bansos yang telah diputuskan pemerintah. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yakni bantuan dari pemerintah untuk KPM yang telah melewati serangkaian proses administrasi dan verifikasi. KPM merupakan sebagian masyarakat yang dinilai masih membutuhkan pendampingan terutama dari segi material untuk menunjang perekonomian. Tiap bulan, pemerintah menransfer sejumlah dana bantuan (elektronik) yang hanya boleh digunakan untuk membeli pangan di warung tertentu. Warung-warung tersebut sudah beroperasi dengan bank penyalur yang ditunjuk pemerintah. Program ini merupakan program baru pengganti program sembako diharapkan dengan adanya PKH dan BPNT ini dapat membantu masyarakat miskin yang ada di Kota Bitung untuk merubah kondisi ekonomi mereka sehingga bisa lebih baik lagi.

2. PKH dan BPNT terhadap Pendidikan

Hasil penelitian PKH dan BPNT berpengaruh signifikan terhadap pendidikan masyarakat di Kota Bitung. Sasaran dari program pemerintah khususnya PKH ialah pendidikan anak sehingga keluarga-keluarga yang masih memiliki anak bersekolah ditanggung semua biaya pendidikan melalui PKH yang sekarang disebut KIP. Dimana anak-anak bisa bersekolah sampai jenjang sarjana sehingga dengan adanya program PKH sangat membantu masyarakat Kota Bitung untuk dapat menyekolahkan anak-anak mereka tanpa memikirkan biaya pendidikan yang mahal. Karena PKH telah mengcover biaya pendidikan sampai dengan keperluan sekolah anak begitu juga dengan BPNT juga sangat membantu orang tua untuk dapat memberikan gizi yang cukup kepada anak-anaknya melalui BPNT dimana setiap bulannya masyarakat penerima PKH dan BPNT menerima baik berupa uang maupun sembako sehingga mereka tidak lagi dipusingkan dengan kebutuhan sehari-hari.

3. PKH dan BPNT terhadap Kesehatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH dan BPNT berpengaruh signifikan terhadap kesehatan masyarakat di Kota Bitung. Dengan adanya bantuan pemerintah melalui PKH dan BPNT yang sangat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat karena mulai dari makan minum pendidikan sampai kesehatan di tanggung oleh program pemerintah yaitu PKH dan BPNT. Program ini sangat membantu masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari . khususnya dari segi kesehatan mereka sudah terpenuhi dengan BPNT yang diterima dalam bentuk sembako setiap bulannya juga dalam bentuk uang tunai yaitu dari PKH yang setiap bulannya di transfer ke rekening masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu kuatir lagi terhadap kebutuhan sehari-hari dan kesehatan mereka pun terjamin dengan bantuan-bantuan yang diberikan. Dari hasil yang didapat dimana PKH dan BPNT berpengaruh positif signifikan terhadap Kesehatan artinya apabila PKH meningkat dan BPNT juga meningkat maka kesehatan juga meningkat begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*. Peningkatan PKH dan BPNT sangat diharapkan pemerintah bisa membantu kehidupan masyarakat sehari-hari dan juga diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan setiap program yang ada untuk merubah kehidupan ekonomi mereka lebih baik lagi sehingga dikemudian hari mereka bisa hidup mandiri dengan perekonomian keluarga yang lebih baik lagi

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH dan BPNT berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Bitung.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH dan BPNT berpengaruh signifikan terhadap Pendidikan di Kota Bitung.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH dan BPNT berpengaruh signifikan terhadap Kesehatan di Kota Bitung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pentingnya pemerintah di setiap kecamatan di Kota Bitung untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan PKH dan BPNT sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga. Perlu diadakan sosialisasi yang mendalam dari para pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT kepada peserta penerima program PKH dan BPNT agar kedepannya dapat berjalan dengan baik.
2. Diharapkan kepada warga masyarakat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT supaya menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya dan jika ada keluhan mengenai keluarga harapan ini segera melaporkan pendamping PKH untuk dicarikan solusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto S. 2002.** Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Firda Wiku, Tri Oldy Rotinsulu , Een N Walewangko, 2020.** Analisis Pengaruh Bantuan Sosial (Pkh Dan Kube) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Tenggara
- Ferdinand 2006.** Metode Penelitian Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Helvine Gultom, Paulus Kindangen, George M.V. Kawung, 2020.** Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara
- Meiryani. 2021.** *Memahami Koefisien Determinasi Dalam Regresi Linear*, 12 agustus 2021 ([https : //accounting. Binus. ac. Id / 2021 / 08 /12/memahami-koefisien-determinasi-dalam-regresi-linear/](https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-koefisien-determinasi-dalam-regresi-linear/))
- Meiryani, 2021.** *Memahami Uji (T) Dalam Regresi Linear* : [https ://accounting. binus. ac. id/ 2021/ 08/12/memahami-uji-t-dalam-regresi-linear/](https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-uji-t-dalam-regresi-linear/))
- Meiryani, 2021.** *Memahami Uji F (Uji Simultan) dalam Regresi Linear* ([https: //accounting. binus.ac.id/2021/08/12/memahami-uji-f-uji-simultan-dalam-regresi-linear/](https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-uji-f-uji-simultan-dalam-regresi-linear/))
- Permensos No 1 Tahun 2018** Tentang Program Keluarga Harapan
- Permensos No 11 Tahun 2018** Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- Perpres No 63 Tahun 2017** Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Prabin Khanal, 2013.** *The nature of chronic and transient Poverty: analyzing poverty dynamics In Nepal*
- Sugiyono, 2017.** Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sunarti E, 2006.** Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan Evaluasi dan Keberlanjutannya (Naskah Akademis) Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor
- Suryawati, 2004.** Teori Ekonomi Mikro. UPP AMP YKPN Yogyakarta : Jarnasy
- Widarjono, 2016.** Ekonometrika : Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis
- Risky Pratama, Paulus Kindangen, Een N. Walewangko, 2017** Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara
- Ravallion, Martin. 2001.** *Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages.* World Development.

ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA KOTAMOBAGU

Andry Mokoginta¹, Daisy S.M. Engka², Mauna Th. B. Maramis³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado

E-mail: andry.muafa@gmail.com, daisyengka@unsrat.ac.id, maunamaramis@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Belanja modal adalah salah satu jenis pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana sumber dananya dapat berasal dari transfer Pemerintah Pusat ke daerah berupa dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dengan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh empat variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dimana didapati secara parsial variabel belanja modal, berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, secara parsial dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya belanja modal, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

ABSTRACT

Capital expenditure is a type of expenditure in the Regional Revenue and Expenditure Budget where the source of funds can come from transfers from the Central Government to the regions in the form of balancing funds consisting of Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds and Special Allocation Funds with the intention of increasing economic growth which will have an impact on improving social welfare.

In this study, multiple regression analysis was used to determine how much influence the four independent variables had on the dependent variable. Where it is found partially that the capital expenditure variable has a significant negative effect on economic growth, partially profit-sharing funds, general allocation funds, and special allocation funds have a positive and significant effect on economic growth. Furthermore, capital expenditure, profit-sharing funds, general allocation funds, and special allocation funds simultaneously affect economic growth.

Keywords: Economic Growth, Capital Expenditures, Profit Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus pada suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan nasional yang diakibatkan adanya pertumbuhan penduduk yang selalu bertambah dan disertai dengan adanya perubahan dalam struktur perekonomian suatu negara (Rustan, 2019).

Perekonomian suatu negara dapat dikatakan sehat apabila pertumbuhan ekonominya stabil serta cenderung menuju ke arah yang positif. Perekonomian negara tersebut dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Atau dengan kata lain suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto (PNB, GNP) riil di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan

barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno Sadono, 2002). Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menunjukan adanya kegiatan ekonomi yang mampu memberikan tambahan pendapatan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhannya bisa dilihat dalam skala kuantitatif dan diukur dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam prakteknya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki oleh daerah serta adanya keterkaitan (linkage) kegiatan ekonomi antar daerah sekitarnya.

Menurut Todaro dan Smith (2004) terdapat tiga faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (capital accumulation), pertumbuhan penduduk (growth in population), dan kemajuan teknologi (technological progress). Sedangkan menurut Robert J. Gordon (2016), pertumbuhan Global Gross Domestic Product (GDP) suatu negara dipengaruhi beberapa factor, antara lain faktor akumulasi modal, produktivitas sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan politik, kewirausahaan dan produk baru, perubahan struktur perekonomian, dan factor lingkungan (wabah penyakit, bencana alam, perubahan iklim akibat pemanasan global) serta keterbatasan sumber daya dan energi.

Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian global saat ini yang diwarnai dengan pandemi Covid-19 dan telah menimbulkan dampak luar biasa (extraordinary) terhadap kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Upaya penanganan kesehatan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 telah menyebabkan terbatasnya mobilitas dan kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan dan gelombang pertumbuhan ekonomi yang kontraktif di dunia. Begitu pula dengan keadaan perekonomian nasional saat ini.

Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan masalah yg diselesaikan, ulasan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yg relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 1
Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Kotamobagu Tahun 2011 - 2021

TAHUN	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (%)	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SULAWESI UTARA (%)	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA KOTAMOBAGU (%)
2011	6,17%	6,17%	6,49%
2012	6,03%	6,86%	6,96%
2013	5,56%	6,38%	7,06%
2014	5,01%	6,31%	6,70%
2015	4,88%	6,12%	6,52%
2016	5,03%	6,16%	6,63%
2017	5,07%	6,31%	6,70%
2018	5,17%	6,01%	6,67%
2019	5,02%	5,66%	6,16%
2020	-2,07%	-0,99%	0,20%
2021	3,69%	4,16%	4,20%

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Pemberian otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah tersebut dalam membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah setiap pemerintah daerah perlu memberikan peningkatan terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya secara demokratis, berkeadilan dan berkelanjutan (Firda Monica dkk, 2022).

Seiring dengan adanya pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti pula dengan adanya dana perimbangan yang diberikan kepada daerah yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana perimbangan yang bersumber dari APBN diberikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dana perimbangan yang diberikan kepada daerah terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Perkembangan Dana Perimbangan di Kota Kotamobagu cenderung meningkat setiap tahunnya, sampai dengan adanya penurunan dana transfer secara nasional dari Pemerintah Pusat ke Daerah pada tahun 2020 diakibatkan adanya konsentrasi anggaran kesehatan dan jejaring sosial untuk penanganan Covid-19 yang melanda Indonesia. Dampak dari pandemi yang ditimbulkan sangat luar biasa, tidak hanya berdampak bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan Pemerintah Pusat memiliki peranan penting dalam penanganan dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 terutama dari sisi ekonomi. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Termasuk kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diarahkan untuk penanganan Covid-19 dan PEN. Salah satunya melalui kebijakan melakukan *refocusing* alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam hal penanganan pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya baik dari sisi perekonomian maupun perlindungan social.

Tabel 2
Perkembangan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil di Kota Kotamobagu Tahun 2011 – 2021

Tahun	DAU (Rp)	DAK (Rp)	DBH (Rp)
2011	223.014.565.000	27.506.300.000	17.397.735.776
2012	270.246.978.000	24.267.000.000	16.719.096.991
2013	311.773.832.000	34.342.900.000	18.056.687.061
2014	333.000.351.150	37.428.140.000	18.622.320.508
2015	354.997.037.000	90.603.450.000	13.461.636.883
2016	382.638.269.000	149.256.361.575	16.340.748.409
2017	375.916.545.000	132.935.633.173	15.445.021.658
2018	376.388.719.000	171.048.865.141	16.261.701.610
2019	397.656.494.000	122.847.203.288	14.958.773.479
2020	359.457.903.000	96.063.346.092	15.474.170.754
2021	353.039.596.000	73.752.327.509	30.925.593.137

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

Pembentukan modal juga mempengaruhi kesejahteraan suatu bangsa dalam pemenuhan segala sesuatu yang diperlukan oleh penduduk yang terus menerus bertambah. Pembentukan

modal adalah sumber investasi pemerintah yang dalam pelaksanaannya lebih ditujukan untuk pengelolaan sumberdaya alam secara tepat dan pendirian berbagai jenis industri, maka tingkat pendapatan bertambah dan berbagai macam kebutuhan rakyat terpenuhi. Masyarakat pun dapat menikmati berbagai macam komoditi dengan peningkatan konsumsi, standar hidup meningkat, juga kesejahteraan ekonomi (Jhingan, 2000 : 399). Suatu daerah otonom dapat dikatakan baik apabila mampu melaksanakan investasinya dari belanja yang dianggarkan secara tepat (Koswara dalam Iqba,dkk, 2020).

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal adalah salah satu jenis pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbanyak kapitalisasi asset tertentu dan menambah manfaat dari aset lebih dari satu periode akuntansi dengan ketentuan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Belanja modal di Kota Kotamobagu kurun waktu 11 (sebelas) tahun terakhir cenderung bervariasi. Belanja modal terbesar ada pada tahun 2016 dan belanja modal yang terkecil di Kota Kotamobagu pada tahun 2021.

Tabel 3
Data Belanja Modal di Kota Kotamobagu Tahun 2011-2021

Tahun	Belanja Modal (Rp)
2011	116.579.899.064
2012	87.533.462.069
2013	116.259.282.955
2014	135.515.252.358
2015	140.782.667.079
2016	229.586.038.018
2017	197.781.059.966
2018	172.179.905.946
2019	122.847.203.288
2020	103.502.462.900
2021	86.420.153.185

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

Besaran alokasi Belanja Modal setiap tahun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara akuntansi berakibat pada meningkatnya nilai aset yang tercatat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan kepemilikan sebuah aset bagi pemerintah daerah adalah dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat (bangunan kantor pemerintah) maupun memperlancar aktivitas roda perekonomian (infrastruktur jalan, jembatan, irigasi). Bahkan pada saat belanja modal tersebut direalisasikan anggarannya maka secara langsung memberikan dampak pada bergerakinya sektor riil di masyarakat, yaitu terserapnya tenaga kerja, bahan baku produksi, maupun bergerakinya sektor- sektor jasa di wilayah tersebut.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Belanja Modal secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
2. Apakah Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
3. Apakah Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
5. Apakah Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?

Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
5. Untuk menganalisis apakah Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pihak baik untuk pembangunan maupun untuk dunia pendidikan:

1. Manfaat bagi Pemerintah. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat maupun tambahan ilmu bagi pemerintah dalam membuat keputusan maupun kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu.
2. Manfaat bagi Masyarakat. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu.
3. Manfaat bagi Peneliti. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Teoritis

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Simon Kuznets dalam Todaro (2003) adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang, dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Todaro (2003) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara yaitu:

1. Akumulasi modal (capital accumulation), yang meliputi bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia;
2. Pertumbuhan penduduk (growth in population), yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja;
3. Kemajuan teknologi (technological progress), yang dianggap sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting dan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (a) kemajuan teknologi yang bersifat netral; (b) kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja; (c) kemajuan teknologi yang hemat modal.

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

Definisi Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan data dan informasi dasar tentang kegiatan ekonomi suatu daerah. Menurut Sjafrizal (2014:25) secara definitif, PDRB tersebut pada dasarnya adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada

suatu daerah pada periode tertentu. Dewasa ini, data PDRB ini sudah tersedia hampir seluruh daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setempat di setiap tahunnya. Dalam hal penyusunan PDRB, dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Faktor-Faktor Yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2019) ada beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya; (2) Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja; (3) Barang-Barang Modal dan Tingkat Teknologi; (4) Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat.

Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Menurut Harrod-Domar (R.F. Harrod dan Evsey Domar) perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh (steady growth). Semakin banyak modal maka produksi barang dan jasa juga semakin banyak. Jadi menurut teori ini ada syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang (steady growth).
2. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship). Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.
3. Menurut Robert Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya semakin tinggi tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 (empat) faktor utama yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil (output).

Teori Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, definisi dari Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Menurut Halim (2004:20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik (BUMD).

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Adapun beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan daerah. Konsep Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah, dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat berdiri di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenangnya masing-masing. Hal ini berarti bahwa seiring dengan berjalannya otonomi daerah, maka dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah mulai berkurang dan yang menjadi sumber utama pembiayaan daerah adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas (1) dana bagi hasil (DBH), (2) dana alokasi umum (DAU), (3) dana alokasi khusus (DAK). Ketiga macam dana perimbangan tersebut merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan saling melengkapi dan mengisi. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen Dana Alokasi Khusus untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen Dana Bagi Hasil, kecuali Dana Bagi Hasil perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran Dana Bagi Hasil baik pajak maupun sumber daya alam dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Dana Bagi Hasil terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil sumber daya alam. Dimana Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan serta cukai hasil tembakau merupakan komponen dari Dana Bagi Hasil Pajak. Sedangkan Dana Bagi Hasil sumber daya alam terdiri dari kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi dan perikanan.

Menurut Putra, dkk (2015) Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang. Dana tersebut kemudian dialokasikan kepada daerah-daerah berdasarkan prinsip *by origin*, dimana daerah penghasil mendapat lebih banyak dana.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat Dana Alokasi Umum adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah agar mengurangi ketimpangan kemampuan

keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dimana pembagian Dana Alokasi Umum pada tiap-tiap daerah, dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran yaitu hasil perhitungan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Menurut Halim (2014) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pengertian Belanja Modal

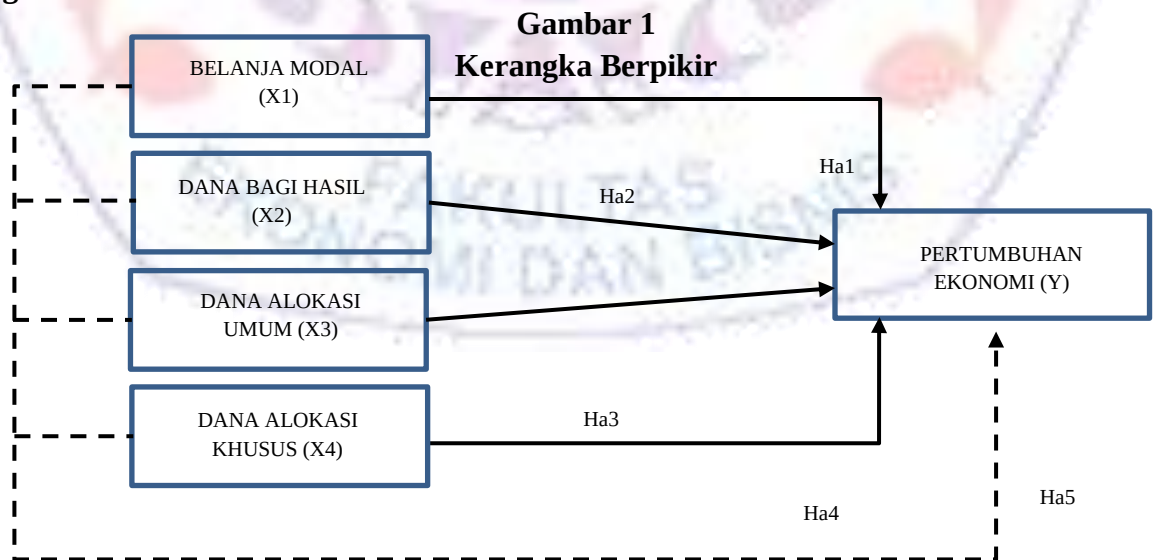
Belanja Modal menurut Halim (2008: 101) merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal adalah bagian dari belanja pemerintah yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tujuan kepentingan masyarakat.

Menurut Darise (2008 : 141), Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Pengertian belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, belanja modal untuk perolehan peralatan dan mesin, belanja modal untuk perolehan gedung dan bangunan, belanja modal untuk perolehan jalan irigasi dan jaringan, serta belanja modal untuk perolehan aset tak berwujud dan fisik lainnya.

Kerangka Pikir



Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang ada, maka dapat disajikan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho1 : Diduga tidak terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.

- Ha1 : Diduga terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
- Ho2 : Diduga tidak terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
- Ha2 : Diduga terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
- Ho3 : Diduga tidak terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
- Ha3 : Diduga terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
- Ho4 : Diduga tidak terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
- Ha4 : Diduga terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
- Ho5 : Diduga tidak terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
- Ha5 : Diduga terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder kuantitatif. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro, 1999). Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan data yang sebenarnya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Kota Kotamobagu dengan waktu penelitian tahun 2011-2021.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis adalah Data Belanja Modal, Data Dana Bagi Hasil, Data Dana Alokasi Umum, dan Data Dana Alokasi Khusus serta Data Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.

Sumber data diperoleh dari berbagai sumber antara lain, Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu serta jurnal-jurnal ilmiah. Penulis juga melakukan studi literature untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian, dimana referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian (Sujarweni, 2019:93). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Studi Pustaka; dan (2) Riset melalui Internet.

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen (X)

1. Belanja Modal (X1) yang digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal pemerintah kota Kotamobagu tahun 2011 sampai dengan 2021 yang diukur dengan rupiah.

2. Dana Bagi Hasil (X2) yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat kepada pemerintah kota Kotamobagu Tahun 2011 sampai dengan 2021 yang diukur dengan rupiah
3. Dana Alokasi Umum (X3) yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum Pemerintah Pusat kepada pemerintah kota Kotamobagu Tahun 2011 sampai dengan 2021 yang diukur dengan rupiah.
4. Dana Alokasi Khusus (X4) yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat kepada pemerintah kota Kotamobagu Tahun 2011 sampai dengan 2021 yang diukur dengan rupiah

Variabel Dependen (Y)

Pertumbuhan Ekonomi (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah total Produk Domestik Regional Bruto Kota Kotamobagu Tahun 2011 sampai dengan 2021 yang diukur dengan satuan rupiah.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu variabel terikat (dependen). Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) yaitu mengestimasi garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Gujarati, 2012).

Model ini mengasumsikan adanya hubungan satu garis lurus/linier antara variabel dependen dengan masing-masing prediktornya. Dalam penelitian ini, rumus yang terbentuk adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon^i$$

Dimana :

Y	=	Pertumbuhan ekonomi (PE)
X ₁	=	Belanja modal (BM)
X ₂	=	Dana Bagi Hasil (DBH)
X ₃	=	Dana Alokasi Umum (DAU)
X ₄	=	Dana Alokasi Khusus (DAK)
α	=	Konstanta / Intercept
β_1 - β_4	=	Koefisien regresi
ε^i	=	error

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan menilai sebaran data pada setiap variabel, baik dependen maupun independent berdistribusi normal atau tidak. Ghazali (2017:145) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi peluang untuk sebaran data yang ideal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengujian secara statistik.

Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah hubungan linier antar variabel bebas. Ghazali (2017:71) menyatakan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi diantara variabel. Bila ada korelasi yang tinggi diantara variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu.

Uji Autokorelasi

Ghazali (2017:121) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi pada umumnya lebih sering

terjadi pada data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Dalam data time series observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu, besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antara dua observasi sangat pendek.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Jika varians dari nilai residual antar pengamatan tetap, maka kondisi ini disebut homoskedastis. Akan tetapi jika berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastis.

Uji Signifikansi

Uji t Statistik

Uji t statistik bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian Uji t dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) sesuai dengan pendapat Nugroho (2009).

Dengan kategori pengujian sebagai berikut :

1. $H_0 : \beta = 0$ artinya tidak ada pengaruh signifikansi variabel independent terhadap variabel dependen
2. $H_0 : \beta \neq 0$ artinya ada pengaruh signifikansi variabel independent terhadap variabel dependen

Adapun keputusan hipotesis bisa diterima atau tidak adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel independen X_1, X_2, X_3 , dan X_4 berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Uji F dalam penelitian ini menggunakan probabilitas dengan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Pengujian dilakukan dengan level signifikansi 5%. Uji statistik yang digunakan dengan F hitung kemudian membandingkan dengan F table, Nugroho (2009). Dengan kategori pengujian sebagai berikut:

1. $H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ artinya semua variabel independen dan variabel dependen tidak ada pengaruh yang signifikan.
2. $H_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 = 0$ artinya semua variabel independen dan variabel dependen saling memiliki pengaruh yang signifikan.

Berikut ini adalah kriteria penentuan uji F :

1. Jika probabilitas (F-statistik) $< 0,05$ maka dikatakan signifikan. Artinya hipotesis diterima yang menunjukkan variabel independen (X_2, X_2, X_3 dan X_4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
2. Jika probabilitas (F-statistik) $> 0,05$ maka dikatakan tidak signifikan atau hipotesis ditolak. Artinya semua variabel independen (X_2, X_2, X_3 dan X_4) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau goodness of fit digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai dari R^2 berada pada rentang 0-1. Semakin tinggi angka tersebut maka semakin baik model yang dibuat dan sebaliknya semakin rendah angka tersebut maka semakin kecil pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Dengan kata lain, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui

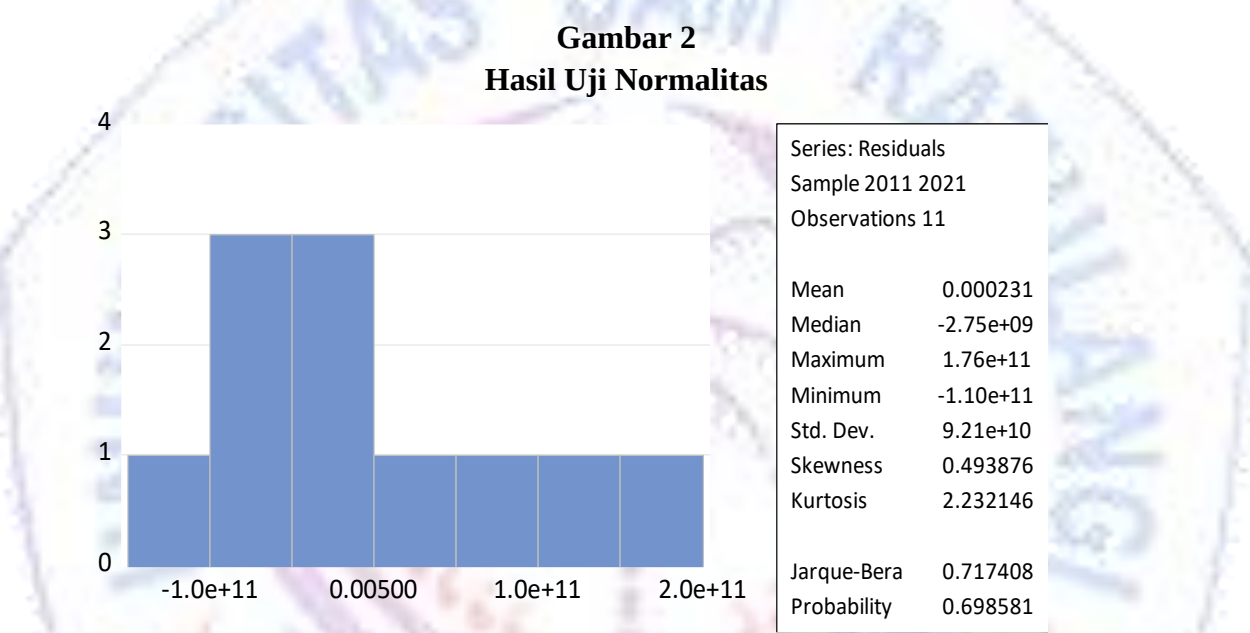
berapa persen pengaruh yang diberikan variabel bebas (X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Asumsi Klasik

Uji Normalitas

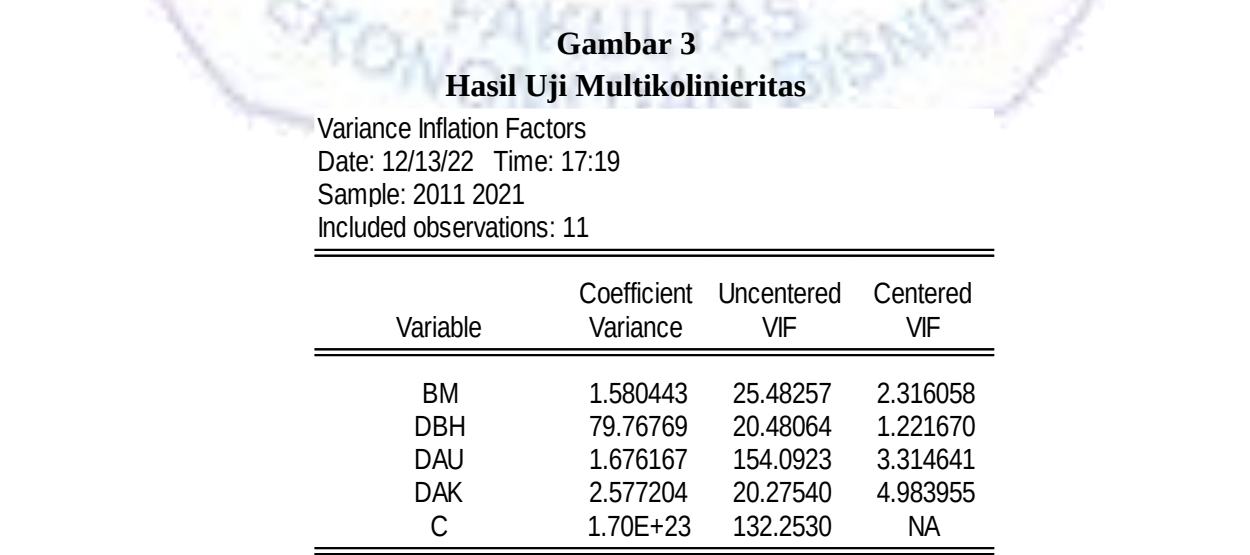
Untuk menguji data pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque Bera test (J-B). Berdasarkan table uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (0,698581) > α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.



Sumber : Hasil olahan evIEWS 12

Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi gejala multikolinieritas dapat melalui uji *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan kriteria pengujian nilai $VIF \geq 10$ terdapat gejala multikolinieritas atau sebaliknya $VIF < 10$ tidak terdapat gejala .



Sumber : Olahan data EViews 12

Dari hasil uji multikolinearitas pada model ini, *Variance Inflation Factor* (VIF) pada variabel independent Belanja Modal (X₁) bernilai 2,316058, Dana Bagi Hasil (X₂) bernilai 1,221670, Dana Alokasi Umum (X₃) bernilai 3,314641, dan Dana Alokasi Khusus (X₄) bernilai 4,983955. Dengan demikian diketahui bahwa setiap variabel independen tidak ada yang memiliki nilai $VIF \geq 10$, artinya dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan Uji Breusch-Godfrey. Dengan dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi menurut Ghozali (2016) adalah sebagai berikut :

- 1. jika hasil Uji Breusch-Godfrey nilai probabilitasnya < 0,05 maka terjadi gejala autokorelasi.
- 2. Jika hasil Uji Breusch-Godfrey nilai probabilitas > 0,05 maka tidak terjadi gejala autokorelasi.

Gambar 4
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag				
F-statistic	0.523247	Prob. F(1,5)	0.5019	
Obs*R-squared	1.042090	Prob. Chi-Square(1)	0.3073	
Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 12/13/22 Time: 17:04 Sample: 2011 2021 Included observations: 11 Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM	-0.608011	1.556718	-0.390573	0.7122
DBH	5.401335	11.93354	0.452618	0.6698
DAU	-0.697146	1.658219	-0.420419	0.6916
DAK	1.070062	2.233379	0.479122	0.6521
C	1.32E+11	4.67E+11	0.282602	0.7888
RESID(-1)	-0.498844	0.689622	-0.723358	0.5019
R-squared	0.094735	Mean dependent var	0.000231	
Adjusted R-squared	-0.810529	S.D. dependent var	9.21E+10	
S.E. of regression	1.24E+11	Akaike info criterion	54.22514	
Sum squared resid	7.67E+22	Schwarz criterion	54.44218	
Log likelihood	-292.2383	Hannan-Quinn criter.	54.08833	
F-statistic	0.104649	Durbin-Watson stat	2.405276	
Prob(F-statistic)	0.986488			

Sumber : Olahan data Eviews 12

Untuk menguji data pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque Bera test (J-B). Berdasarkan table uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (0,698581) > α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi (menggunakan lag 1), dapat dilihat bahwa nilai Breusch-Godfrey probabilitas 0,3073 > 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian ini dan dapat dilanjutkan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini.

Uji Heteroskedasitas

Pada penelitian ini dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier Glejser adalah dengan melihat Nilai Probabilitas F-statistic (F hitung). Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai Probabilitas F hitung lebih kecil dari dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

Gambar 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Heteroskedasticity Test: Glejser				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	1.171490	Prob. F(4,6)	0.4099	
Obs*R-squared	4.823671	Prob. Chi-Square(4)	0.3059	
Scaled explained SS	2.631618	Prob. Chi-Square(4)	0.6212	
Test Equation:				
Dependent Variable: ARESID				
Method: Least Squares				
Date: 12/13/22 Time: 17:26				
Sample: 2011 2021				
Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.19E+11	1.86E+11	2.251651	0.0653
BM	-0.729801	0.567914	-1.285056	0.2461
DBH	-6.594901	4.034654	-1.634564	0.1533
DAU	-0.595885	0.584859	-1.018852	0.3476
DAK	0.797641	0.725216	1.099867	0.3135
R-squared	0.438516	Mean dependent var	7.00E+10	
Adjusted R-squared	0.064193	S.D. dependent var	5.55E+10	
S.E. of regression	5.37E+10	Akaike info criterion	52.55358	
Sum squared resid	1.73E+22	Schwarz criterion	52.73444	
Log likelihood	-284.0447	Hannan-Quinn criter.	52.43957	
F-statistic	1.171490	Durbin-Watson stat	2.943651	
Prob(F-statistic)	0.409890			

Sumber : Olahan data Eviews12

Setelah dilakukan pengujian, maka hasil yang diperoleh menunjukkan nilai Probabilitas F hitung sebesar 0,4099 atau lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) sehingga, berdasarkan uji hipotesis tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Signifikansi

Gambar 6
Hasil Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: PE
Method: Least Squares
Date: 12/13/22 Time: 18:01
Sample: 2011 2021
Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM	-4.951275	1.257157	-3.938471	0.0076
DBH	21.76014	8.931276	2.436398	0.0507
DAU	3.558507	1.294669	2.748584	0.0334
DAK	5.416065	1.605367	3.373723	0.0150
C	5.97E+11	4.12E+11	1.449976	0.1972
R-squared	0.939955	Mean dependent var	1.98E+12	
Adjusted R-squared	0.899925	S.D. dependent var	3.76E+11	
S.E. of regression	1.19E+11	Akaike info criterion	54.14285	
Sum squared resid	8.47E+22	Schwarz criterion	54.32372	
Log likelihood	-292.7857	Hannan-Quinn criter.	54.02885	
F-statistic	23.48122	Durbin-Watson stat	2.295177	
Prob(F-statistic)	0.000827			

Sumber : Hasil Olahan Eviews 12

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 5,974690 + -4,951275 (X_1) + 21,76014 (X_2) + 3,558507 (X_3) + 5,416065 (X_4) + e$$

Dengan persamaan regresi sebagai berikut :

Berdasarkan hasil regresi di atas, maka dapat diinterpretasikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 5,974690 bertanda positif, artinya menunjukkan perubahan pertambahan jika variable Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dianggap konstan maka Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) akan meningkat sebesar 5,974690.
2. Nilai koefisien regresi Belanja Modal sebesar -4,951275 bertanda negatif, artinya menunjukkan perubahan penurunan. Dalam hal Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka akan mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) mengalami penurunan sebesar -4,951275 dengan asumsi variable yang lainnya tetap.
3. Nilai koefisien regresi Dana Bagi Hasil sebesar 21,76014 bertanda positif, artinya menunjukkan perubahan pertambahan jika Dana Bagi Hasil meningkat sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan sebesar 21,76014 dengan asumsi variable lain tetap.
4. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 3,558507 bertanda positif, artinya menunjukkan adanya perubahan pertambahan jika Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan sebesar 3,558507 dengan asumsi variable lain tetap.
5. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 5,416065 bertanda positif, artinya menunjukkan adanya perubahan pertambahan jika Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan sebesar 5,416065 dengan asumsi variable lain tetap.

Uji t statistic

1. Berdasarkan hasil uji t diatas, diperoleh nilai signifikansi Variabel Belanja Modal (X_1) sebesar 0,0076. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, dengan nilai signifikansi X_1 $0,0076 < 0,05$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Variabel bebas X_1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variable terikat Y pada $\alpha = 0.05$, atau dengan kata lain Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
2. Nilai signifikansi Variabel Dana Bagi Hasil (X_2) sebesar 0,0507. Jika $\alpha = 0.05$, dan nilai signifikansi X_2 $0,0507 > 0,05$ berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel bebas X_2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variable terikat Y pada $\alpha = 0.05$, atau dengan kata lain Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
3. Nilai signifikansi Variabel Dana Alokasi Umum (X_3) sebesar 0,0334. Jika $\alpha = 0.05$, dan nilai signifikansi X_3 $0,0334 < 0,05$, yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel bebas X_3 berpengaruh secara signifikan terhadap variable terikat Y pada $\alpha = 0.05$, atau dengan kata lain Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
4. Nilai signifikansi Variabel Dana Alokasi Khusus (X_4) sebesar 0,0150. Jika $\alpha = 0.05$, dan nilai signifikansi X_4 $0,0150 < 0,05$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel bebas X_4 berpengaruh secara signifikan terhadap variable terikat Y pada $\alpha = 0.05$, atau dengan kata lain Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan adanya tingkat signifikansi secara parsial pada Variabel Belanja Modal (X_1), Dana Alokasi Umum (X_3), dan Dana Alokasi Khusus (X_4) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu. Sedangkan Variabel Dana Bagi Hasil (X_2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Uji F

Berdasarkan pada hasil pengolahan data yang menggunakan aplikasi Eviews 12, dapat dilihat Probabilitas (F-statistik) 0,000827. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Probabilitas (F-statistik) $0,000827 < \alpha = 0.05$, yang artinya semua variable independent atau variable bebas (X1, X2, X3 dan X4) secara bersama – sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Y.

Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adj. R²) sebesar 0.899925 atau 89,9925 %. Hal ini menunjukkan bahwa variable – variable independent dalam hal ini Belanja Modal (X1), Dana Bagi Hasil (X2), Dana Alokasi Umum (X3) dan Dana Alokasi Khusus (X4) secara bersama – sama memiliki pengaruh 89,9925% terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil persamaan regresi analisis pengaruh variable independent (X1, X2, X3, dan X4) terhadap variable dependent (Y) sebagai berikut :

Pengaruh secara bersama-sama/simultan variabel bebas Belanja Modal, Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh variabel bebas Belanja Modal, Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.

Pengaruh secara parsial Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Peningkatan pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Selain itu, bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Abimanyu, 2005 dalam Harianto dan Adi, 2007).

Teori menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran dalam bentuk investasi pemerintah dalam membiayai barang – barang publik termasuk belanja modal. Semakin banyak belanja modal akan mempengaruhi peningkatan produktivitas dalam melakukan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Namun dalam penelitian ini diketahui terdapat kejadian luar biasa/*extra ordinary* dimana nilai belanja modal dan pertumbuhan ekonomi yang sedang mengalami kenaikan setiap tahunnya tiba-tiba harus turun drastis disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan berdampak terhadap nilai PDRB Kota Kotamobagu serta alokasi Belanja Modal di Kota Kotamobagu pada dua tahun terakhir penelitian ini. Hal ini yang diduga menjadi penyebab hasil penelitian bertentangan dengan teori. Hasil pengujian hipotesis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukan bahwa angka koefisien Belanja Modal (X1) sebesar -4,951275 artinya jika Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka akan mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar -4,951275. Koefisien bernilai negatif antara Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi yang menyatakan bahwa apabila variabel Belanja Modal naik maka pertumbuhan ekonomi akan menurun.

Adapun secara parsial diperoleh nilai probabilitas t hitung atas Variabel Belanja Modal (X1) sebesar 0,0076. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas $X1\ 0,0076 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

Variabel bebas X1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y pada $\alpha = 0.05$, atau dengan kata lain Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.

Walaupun hasil penelitian diatas dianggap bertentangan dengan teori, namun selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Candra Gunantara dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi di Bali. Penelitian tersebut mencakup 9 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota. Penelitian ini menggunakan data time series, yang digunakan selama periode 2005 - 2011. Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 9 kabupaten/kota x 7 tahun = 63 amatan, kemudian data di outlier sehingga menjadi 58 amatan. Dimana berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara itu, hasil uji parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa Belanja Modal memperlemah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh pengalokasian pendapatan daerah untuk Belanja Modal tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga proyek yang dikerjakan bersifat mubasir.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, dapat dilihat bahwa Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas $0.057 < \alpha (0.05)$ dan nilai koefisien regresi memiliki hubungan positif 21.76014 artinya menunjukkan bahwa jika Dana Bagi Hasil meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan ikut meningkat. Hal tersebut sesuai dengan teori menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif secara signifikan di Kota Kotamobagu disebabkan tepat sasaran dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil di Kota Kotamobagu.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas $0.0334 > \alpha (0.05)$ dan nilai koefisien regresi memiliki hubungan positif 3.558507.

Dalam Penelitian ini, Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan di Kota Kotamobagu disebabkan tepat sasaran dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum di Kota Kotamobagu.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas $0.0150 > \alpha (0.05)$ dan nilai koefisien regresi memiliki hubungan positif 5.416065.

Dalam Penelitian ini, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan di Kota Kotamobagu disebabkan tepat sasaran dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus di Kota Kotamobagu.

Pengaruh Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa secara simultan Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan

secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien determinasi (Adj. R²) sebesar 0.899925 atau 89,9925% menunjukkan bahwa variable – variable independent dalam hal ini Belanja Modal (X1), Dana Bagi Hasil (X2), Dana Alokasi Umum (X3) dan Dana Alokasi Khusus (X4) secara bersama – sama memiliki pengaruh 89,9925% terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel belanja modal, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus jika bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu. Artinya jika variable bebas secara bersama-sama meningkat, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu.
2. Teori menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah termasuk didalamnya belanja modal, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seharusnya semakin banyak belanja modal maka akan mempengaruhi peningkatan produktivitas dalam melakukan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Namun dalam penelitian ini diketahui terdapat kejadian luar biasa/*extra ordinary* akibat pandemic Covid-19 yang berdampak terhadap nilai PDRB Kota Kotamobagu serta alokasi Belanja Modal di Kota Kotamobagu pada dua tahun terakhir penelitian ini. Kejadian luar biasa inilah yang diduga menjadi penyebab penelitian yang dilakukan penulis bertentangan dengan teori dan berbeda dengan hasil yang seharusnya. Hasil penelitian yang didapati menunjukkan bahwa anggaran belanja modal secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu, artinya jika anggaran belanja modal mengalami peningkatan, maka tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu akan mengalami penurunan.
3. Variabel Dana bagi hasil secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu. Artinya jika dana bagi hasil mengalami peningkatan, maka tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu juga akan mengalami peningkatan.
4. Variabel dana alokasi umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu. Artinya jika dana alokasi umum mengalami peningkatan, maka tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu juga akan mengalami peningkatan.
5. Variabel dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu. Artinya jika dana alokasi khusus mengalami peningkatan, maka tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu juga akan mengalami peningkatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan penulis pada penelitian yaitu sebagai berikut;

1. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang diperoleh dari pendapatan transfer pusat ke daerah baik Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus guna membangun infrastruktur publik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, agar pembangunan fasilitas publik tidak terkesan mubasir ketika fasilitas yang dibangun ternyata belum dibutuhkan masyarakat/pengadaannya belum mendesak. Selain itu, Pemerintah Daerah sebelum membangun suatu fasilitas publik, hendaknya melakukan studi kelayakan dan analisis investasi publik, agar pekerjaan pembangunan tersebut tidak mangkrak dan mubasir. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat menjaga dan tetap memperhatikan kelayakan fasilitas publik yang telah dibangun selama ini, agar kualitas fasilitas yang dibangun tetap bagus, terjaga dan terus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pemerintah harus memperhatikan permasalahan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengelola operasional dari fasilitas yang dibangun, hal ini perlu dilakukan agar tujuan dibangunnya fasilitas publik tersebut dapat tercapai. Dengan adanya pengawasan ekstra dalam pengalokasian anggaran untuk belanja modal agar tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal tetap diperhatikan dan lebih diarahkan kepada belanja modal infrastruktur yang nantinya akan berguna dalam percepatan pembanguann fasilitas pelayanan publik serta pelayanan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antara daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Penulis berharap penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga diketahui dapat diketahui perkembangan – perkembangan di tahun – tahun mendatang dengan menggunakan model linie dinamik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] **Arsyad Licolin, 1999**, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Nurlan Darise, 2007**, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT INDEKS Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2010**, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Todaro, Michael P, 2011**, *Pembangunan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Abdul Halim, 2012**, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Buku Beta, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2018**, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Alfabeta, Bandung.
- Rahmat Solling Hamid, Samsul Bahri, Salju, Muhammad Ikbal, 2020**, *Panduan Praktis Ekonometrika Konsep Dasar dan Penerapan Menggunakan Eviews*, Cv. AA Rizky, Serang-Banten.
- [3] **Wyatt, J. C, dan Spiegelhalter, D., 1991**, *Field Trials of Medical Decision-Aids: Potential Problems and Solutions*, Clayton, P. (ed.): *Proc. 15th Symposium on Computer Applications in Medical Care*, Vol 1, Ed. 2, McGraw Hill Inc, New York.
- [2] **Agus Sunarya Sulaeman, 2019**, *Judul Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019.
- Faridi, Muhammad Zahir, 2011**, *Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth : Evidence From Pakistan*, Jurnal of social Sciencess (PJSS) Vol 31. No. 1, pp1-33.
- Feronika, 2017**, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bitung*, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 18, No. 5.
- Ferly Christian Kolinug, 2015**, *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Manado*, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 17, No. 2.
- George W. Hammond and Mehmet S. Tosun, 2009**, *The Impact of Local Decentralization on Economic Growth. Evidence from U.S Counties*, IZA Discussion Paper No. 4574 November 2009.
- Lian Arke Mokorowu, 2020**, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 21, No. 4.
- Putu Candra Gunantara, 2014**, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi di Bali*, E-Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 3 (2014).
- Romi Daniel Tuwo, 2021**, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 21, No. 4 (2021).
- [3] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI BOLAANG MONGONDOW RAYA

Ahmad Affandi Abasi¹, Paulus Kindangen², Een. N Walewangko³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

andixjuveaja@gmail.com, Pkindangen@unsrat.ac.id, eenwalewangko@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah khususnya program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata, program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya, program upaya kesehatan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya. Data yang digunakan antara lain data pertumbuhan ekonomi dan PDRB ADHK di Bolaang Mongondow Raya tahun 2016 – tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan khususnya pada tiga program kesehatan yaitu program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata, program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya, program upaya kesehatan masyarakat di wilayah bolaang mongondow raya pada tahun 2016-2021 secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah, Program Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of government spending, especially the Program for Procurement of Facilities and Infrastructure for Hospitals/Mental Hospitals/Pulmonary Hospitals/Eye Hospitals, Procurement programs, improvement and repair of health center facilities and infrastructure/auxiliary health centers and their networks, programs Public Health Efforts for economic growth in Bolaang Mongondow Raya. The data used includes data on economic growth and GRDP of ADHK in Bolaang Mongondow Raya in 2016 - 2021. The results of the study show that government spending in the health sector, especially in three health programs, namely the Program for Procurement of Facilities and Infrastructure for Hospitals/Mental Hospitals/Pulmonary Hospitals/Eye Hospitals, procurement programs, improvement and repair of health center/puskesmas facilities and infrastructure assistants and their network, the Public Health Effort program in the Bolaang Mongondow Raya area in 2016-2021 simultaneously has a positive and significant effect on economic growth in Bolaang Mongondow Raya.

Keywords : Government Expenditures, Health Programs, Economic Growth

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah mempunyai kewenangan dan kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan, hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2003). Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber-daya-sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu.

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat yang kemudian akan meningkatkan produksi (output). Pertumbuhan ekonomi

sendiri merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan.

Sejak pandemi COVID 19 tahun 2020 dan kebijakan pemerintah untuk bekerja dari rumah dan belajar dari rumah, sangat mempengaruhi kondisi perekonomian daerah. Dilanjutkan dengan kebijakan refocusing anggaran untuk menangani dampak C19, menjadi bagian yang menarik untuk lebih focus pada pengeluaran pemerintah di bidang Kesehatan. Fenomena ini menjadi menarik untuk dianalisis lebih spesifik pada level program kesehatan yang memiliki proporsi anggaran terbesar diantara program-program kesehatan lainnya.

Dalam teori *human capital*, kesehatan merupakan salah satu *human capital* selain pendidikan, pelatihan, dan migrasi tenaga kerja. Kesehatan tidak serta merta dapat diperoleh, tetapi setiap individu harus melakukan investasi. Investasi pada kesehatan dilakukan dengan pengeluaran makanan sehat, vitamin, alat olahraga serta menerapkan gaya hidup sehat. Hasil investasi kesehatan berupa Komplemen dari peningkatan *probability of surviving* dan kualitas hidup sehat seperti tidak sakit-sakitan, tidak stunting, dan lain-lain yang diakumulasi menjadi *wealth* (kesejahteraan). Sumber daya manusia yang berkualitas mendorong pertumbuhan ekonomi sedangkan yang tidak berkualitas justru menjadi beban negara. (Becker, 2007)

Terdapat beberapa program prioritas bidang kesehatan pada perangkat daerah terkait yang berdampak terhadap pemulihan pertumbuhan ekonomi di wilayah BMR, diantaranya : Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru - paru/Rumah Sakit Mata; Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru - Paru/Rumah Sakit Mata; Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya; Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat; Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Program Pengawasan Obat dan Makanan; Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; Program pelayanan kesehatan penduduk miskin; Program Bantuan Operasional kesehatan; Program peningkatan sumber daya kesehatan; Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; Program Peningkatan Mutu Kesehatan; Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan; Program JKN pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman; Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Penelitian ini menjadi menarik setelah pandemi COVID 19 , karena kebijakan refocusing anggaran terbesar untuk bidang kesehatan, bidang sosial dan bidang ekonomi. Tabel 1 menggambarkan pengeluaran pemerintah daerah Bolaang Mongondow Raya di bidang kesehatan selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

Tabel 1
Data Anggaran Bidang Kesehatan Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/ Kota	Tahun Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020
KOTA KOTAMOBAGU	135.637.840.652	136.043.857.364	179.267.990.093	174.380.212.015	211.294.616.036
Kab. BOLMONG	73.102.552.057	61.936.631.458	85.385.884.930	117.675.023.047	84.757.505.568
Kab. BOLSEL	15.414.100.734	30.815.597.706	55.948.894.144	52.440.246.767	84.633.462.161
Kab BOLMUT	71.297.360.510	51.194.326.600	93.611.403.080	97.573.260.050	140.499.476.910
Kab. BOLTIM	29.678.477.060	29.047.615.124	46.642.291.506	32.147.817.979	82.009.531.064

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Total penganggaran bidang kesehatan selama 5 (lima) tahun terakhir di Wilayah Bolaang Mongondow Raya yaitu: Kota Kotamobagu sebesar Rp.836.624.516.160; Kabupaten Bolaang Mongondow Rp. 422. 857.597.060; Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Rp. 239.252.301.512,; Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Rp. 454.175.827.150; Kabupaten Bolaang Mongondow timur Rp. 219.525.732.733. Berdasarkan data pengeluaran bidang Kesehatan di wilayah Bolaang Mongondow Raya, terdapat 3 (tiga) program prioritas yang menopang pertumbuhan ekonomi serta menjadi akselerator ekspansi perekonomian daerah yang terdampak pandemi COVID 19 sejak awal tahun 2020. Program-program tersebut didukung oleh penganggaran yang tercermin dalam Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Adapun ke 3 Program Prioritas tersebut adalah :

1. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/;
2. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
3. Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tabel 2
Rekapan Total Anggaran 3 Program Bidang Kesehatan

PROGRAM	DAERAH				
	KOTAMOBAGU	BOLMONG	BOLSEL	BOLMUT	BOLTIM
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	348.617.572.323	101.563.327.806	33.961.768.873	144.486.876.118	52.102.000.000
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	0	128.874.422.481	41.141.440.881	103.483.370.606	89.456.130.167
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	67.905.465.103	76.923.297.766	85.350.749.630	88.263.582.747	0
TOTAL	416.523.037.426	307.361.048.053	160.453.959.384	336.233.829.471	141.558.130.167

Sumber : Dokumen APBD

Dengan besarnya pengeluaran Pemerintah khususnya bidang kesehatan di Kabupaten Kota yang ada di Wilayah Bolaang Mongondow Raya/ BMR (Kota Kotamobagu, Kabupaten

Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur), maka penelitian ini akan menganalisa pengeluaran Pemerintah di bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah besarnya pengaruh program upaya kesehatan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya?
2. Bagaimanakah besarnya pengaruh Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya terhadap pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya?
3. Bagaimanakah besarnya pengaruh program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata terhadap pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya ?
4. Bagaimanakah besarnya pengaruh program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya dan program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata secara bersamaan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh program upaya kesehatan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya;
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya terhadap pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya;
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata terhadap pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya;
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh program upaya kesehatan masyarakat, program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya dan program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata secara bersamaan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya.

Manfaat Penelitian

1. Dapat menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah di Bolaang Mongondow Raya terkait pengeluaran Pemerintah khususnya di bidang kesehatan;
2. Dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian – penelitian selanjutnya.

Tinjauan Pustaka

Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Mangkosoebroto Guritno (2001), pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Teori Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah pengambilan alternatif yang dianggap alternatif terbaik dengan sumber daya yang tersedia secara tepat. Perencanaan pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, dibuat secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang (Soekartawi, 1990).

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari

tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999: 7)

Penelitian Terdahulu

Penelitian Avicenna S Hidayat, Frederic Winston Nalle (2017) berjudul Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Thn 2010-2015 bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah, tenaga kerja, dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi regional di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2010-2015. Penelitian ini menggunakan data panel dengan Metode analisis menggunakan metode regresi data panel yang menggabungkan data cross section dan time series. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian Ranifial Anugra. Taufiq Marwa, Imelda (2016) berjudul Analisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan uji kualitas granger. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan distribusi pendapatan adalah satu arah dan tidak sebaliknya. Sedangkan dalam jangka panjang tidak ada kointegrasi antar variable.

Penelitian Merri Anitasari, Ahmad Soleh (2015) berjudul Pengaruh Pengeluaran pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan analisis ekonometrik. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu.

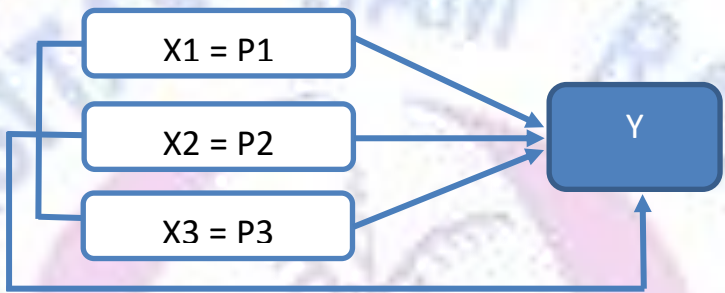
Penelitian Wahyudi (2018) berjudul dampak Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Penduduk Di Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran Pemerintah untuk infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan penduduk di Kabupaten /kota di Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah Metode analisis regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan tidak signifikan, 2) pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat Provinsi, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Ferdinandus Sherly (2020) dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ambon dengan tujuan penelitian untuk a) menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah berupa belanja langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon, b) menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah dalam bentuk tidak langsung pengeluaran untuk Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ambon. Metode yang digunakan adalah Metode analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian adalah: a) Belanja langsung memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Ambon; b) Belanja Tidak Langsung memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Ambon dengan a) Pengeluaran Langsung dan Pengeluaran Tidak Langsung sama-sama berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon dengan tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 96,44%.

Penelitian Ginanjar A Nugroho (2016) Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan IPM di Indonesia dengan tujuan untuk: (1).Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia, (2).Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM, dan (3).Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap IPM, baik secara

langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Sebagai pendukung, juga dilakukan uji beda rata-rata untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata secara statistik terhadap dua kelompok tersebut. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan respon diantara dua kelompok daerah tersebut. Pada kelompok daerah dengan angka IPM tinggi, terlihat bahwa pengeluaran kesehatan dan infrastruktur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada kelompok daerah dengan angka IPM rendah terlihat bahwa hanya pengeluaran pendidikan yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap angka IPM. Adapun pertumbuhan ekonomi, terlihat menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini terjadi pada kedua kelompok daerah, baik kelompok daerah dengan IPM tinggi maupun IPM rendah.

Kerangka Pikir



Gambar 1
Sumber Kajian diolah Penulis

Hipotesis

1. Diduga program Upaya Kesehatan Masyarakat (P1) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Bolaang Mongondow Raya;
2. Diduga Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya (P2) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Bolaang Mongondow Raya;
3. Diduga program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata (P1) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Bolaang Mongondow Raya;
4. Diduga program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya dan program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Bolaang Mongondow Raya;

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Adapun sumber yang diambil antara lain data pertumbuhan ekonomi dan PDRB ADHK di Bolaang Mongondow Raya yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara <https://sulut.bps.go.id> dan data Pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan yang diperoleh dari dokumen APBD Tahun 2016 sampai dengan 2020.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur dan dokumen pemerintah, dimana dalam studi literature peneliti memperoleh data dari membaca, meringkas atau mencatat data yang bersumber dari buku, jurnal, makalah. Adapun sumber data dari dokumen Pemerintah, menggunakan data dalam bentuk tabel, grafik dan gambar.

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

- 1. Pertumbuhan ekonomi (Y) adalah menunjukan pertumbuhan produksi barang dan jasa yang ditandai dengan PDRB ADHK kabupaten/kota di Bolaang Mongondow Raya, diukur dalam rupiah per tahun;
- 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat (X₁) merupakan total anggaran program upaya kesehatan masyarakat yang dianggarkan Pemerintah Bolaang Mongondow Raya, dihitung dalam rupiah per tahun;
- 3. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya (X₂) adalah total anggaran bidang kesehatan pada program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya yang dianggarkan Pemerintah Bolaang Mongondow Raya, dihitung dalam rupiah per tahun;
- 4. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru - paru/Rumah Sakit Mata (X₃) adalah total anggaran bidang kesehatan pada program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru - paru/Rumah Sakit Mata yang di anggarakan Pemerintah Bolaang Mongondow Raya diukur dalam rupiah per tahun.

Metode Analisis

Alat analisa yang dipakai untuk mengetahui pengaruh pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya adalah dengan menggunakan analisis panel data yaitu metode penelitian yang dikumpulkan secara *cross section* (data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu) dan *time series* (data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu) (Nachrowi Dan Hardius, 2006:309).

Persamaan model regresi linier yang digunakan untuk data cross section yang masing-masing adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_i$$

Dimana:

- Y = Pertumbuhan ekonomi/PDRB ADHK
- X₁ = Program 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- X₂ = Program 2 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
- X₃ = Program 3 (Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru - paru/Rumah Sakit Mata)
- e = Error term
- β₀ = Intersep
- β₁- β₄ = koefisien regresi

Estimasi Regresi

Data Panel untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu *Ordinary Least Square*, Model Effect Tetap (*Fixed Effect Model*), dan Model Efek Random (*Random Effect Model*)

Ordinary Least Square

Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data *cross section* atau *time series* sebagaimana telah dipelajari sebelumnya. Akan tetapi, untuk data panel, sebelum membuat regresi maka terlebih dahulu menggabungkan data *cross section* dengan data *time-series (pool data)*. Kemudian data gabungan ini diperlukan sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan untuk mengestimasi model dengan metode OLS (Nachrowi Dan Hardius, 2006:311)

Model Effect Tetap (*Fixed Effect Model*)

Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model

memungkinkan adanya *intercept* yang tidak konstan. Atau dengan kata lain, *intercept* ini memungkinkan berubah untuk setiap individu dan waktu. Inilah yang menjadi dasar pembentukan model efek tetap (*Fixed Effect*) (Nachrowi Dan Hardius, 2006:311).

Model Efek Random (*Random Effect Model*)

Bila pada model efek tetap, perbedaan antarindividu dan atau waktu dicerminkan lewat *intercept*, maka pada model efek random, perbedaan tersebut diakomodasi lewat *error*. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa *error* mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section* (Nachrowi Dan Hardius, 2006:311).

Pemilihan Model Data Panel

Menurut Widarjono (2007: 258), ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel. Pertama, uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode *Commom Effect* atau metode *Fixed Effect*. Kedua, uji *Hausman* yang digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect*. Ketiga, uji *Lagrange Multiplier (LM)* digunakan untuk memilih antara metode *Commom Effect* atau metode *Random Effect*.

Uji Statistik F (Uji Chow)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *Fixed Effect* lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel *dummy* atau metode *Common Effect*. Jika nilai F-hitung > F-tabel, atau nilai probabilitas (PValue) < a 5%, maka H0 ditolak, artinya model panel yang baik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*, dan sebaliknya jika H0 diterima, maka model Pooled Least Square yang dipakai dna dianalisis. Namun jika H0 ditolak, maka model FEM harus diuji kembali untuk memilih apakah memakai model FEM atau REM baru dianalisis

Uji Hausman

Pada dasarnya, Uji *Hausman* digunakan untuk melihat konsistensi pendugaan dengan OLS. Mengingat MER diduga dengan menggunakan metode tersebut, maka dalam pemodelan data panel, uji ini dapat digunakan untuk melihat kelayakan penggunaan model panel. Keputusan penggunaan FEM dan REM dapat pula ditentukan dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan dengan *Hausman*. Spesifikasi ini akan memberikan penilaian dengan menggunakan *Chi-square* statistik sehingga keputusan pemilihan model akan dapat ditentukan secara statistik.

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut :

H0 : *Random Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Setelah dilakukan pengujian ini, hasil dari *Hausman test* dibandingkan dengan Chi-square statistik dengan df = k, dimana k adalah jumlah koefisien variabel yang diestimasi atau nilai probabilitas (P-Value) < a 5%,. Jika hasil dari Hausman test signifikan, maka H0 ditolak, maka *Fixed Effect Model* yang digunakan.

Uji Lagrangge Multiplier (LM)

Uji *Langrangge Multiliper (LM)* dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara *Pooled Least Square Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H0 : *Pooled Least Square Model*

H1 : *Random Effect Model*

Setelah dilakukan pengujian ini, hasil dari *Langrangge Multiplier test* (Breusch-Pagan) dibandingkan dengan nilai probability. Jika nilai Breusch – Pagan < a 5% maka H0 ditolak, artinya model panel yangbaik untuk digunakan adalah *Random Effect Model (REM)*. Namun jika H0 diterima maka model data panel yang baik digunakan adalah *Pooled Least Square (PLS)*.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model Regresi Data Panel

Model regresi data panel terdiri dari 3 yaitu common effect, fixed effect, dan random effect. Model common effect menyamaratakan setiap unit dalam analisis. Pada model fixed effect terdapat perbedaan pada efek individu. Sedangkan pada model random effect, perbedaan antar individu diakomodasi oleh error. Untuk memilih model yang tepat, kita dapat melakukan serangkaian uji dengan membandingkan satu model dengan model yang lain.

Uji Chow

Tabel 3

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	278.438035	(4,17)	0.0000
Cross-section Chi-square	104.935624	4	0.0000

Sumber : Hasil Olahan Eviews 12

Hasil analisis menggunakan evIEWS diperoleh nilai prob cross section chi square = 0.0000 (lebih kecil dari 5%). Sehingga keputusan yang diambil adalah tolak H_0 atau model Fixed Effect lebih baik dibanding Common Effect. Pengujian akan dilanjutkan ke uji Hausman.

Sumber : Hasil Olahan Eviews 12

Uji Hausman

Tabel 4

Hasil Uji Hausman

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test period fixed effects

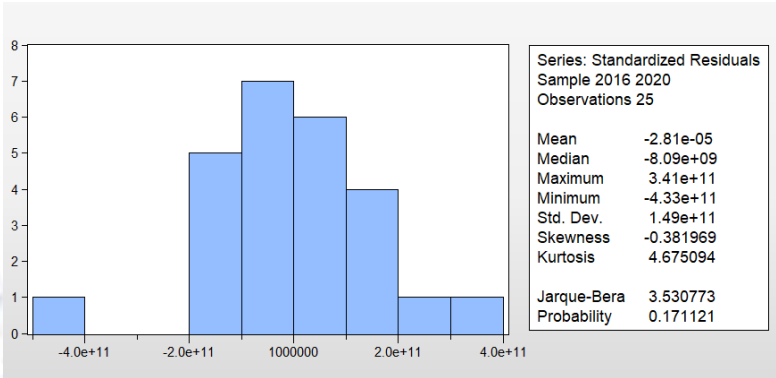
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	2.880541	(4,17)	0.00545

Sumber : Hasil Olahan Eviews 12

Hasil olahan data menggunakan evIEWS diperoleh p-value = 0.0054 (lebih kecil dari 5%). Sehingga keputusan yang diambil adalah Tolak H_0 atau dapat disimpulkan bahwa model Fixed Effect lebih baik dibanding random Effect. Dengan demikian, dari tiga model yang ada, kita akan menggunakan model Fixed Effect untuk analisis regresi data panel dengan Eviews

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil Olahan Eviews 12

Nilai statistik uji Jarque Bera adalah 3.530773 dengan p-value = 0.171121. Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (0,171121) > α (0,05) maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Uji Homoskedastisitas

Tabel 5
Uji Glesjer

Variabel	Koefisien	Probabilitas
C	1.25E+11	0.0409
X1	-1.125441	0.6749
X2	0.665001	0.7598
X3	-0.411323	0.6432
Prob(F-statistic)		0.871223

Sumber : Hasil Olahan Eviews 12

Dari output dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan karena p-value > 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi

Uji Multikolinieritas

Tabel 6
Uji Multikolinieritas

Correlation				
	X1	X2	X3	
X1	1.000000	-0.026958	0.270694	
X2	-0.026958	1.000000	-0.138167	
X3	0.270694	-0.138167	1.000000	

Sumber : Hasil Olahan Eviews 12

Hasil analisis eviews menggunakan analisis nilai correlations menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel yang memiliki korelasi > 0.8 sehingga dapat kita katakan tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi. Jika nilai DW berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. Dari hasil uji dapat dilihat nilai Durbin Watson Statistik adalah 2,189537 berarti ada autokorelasi. Alokasi anggaran program kesehatan

di Dinas Kesehatan tahun ini memiliki korelasi dengan anggaran program yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 7
Hasil Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien	Probabilitas
D(X1)	9.104215	0.0283
D(X2)	3.109912	0.0449
D(X3)	2.785539	0.0494
C	9.90E+10	0.0002
Prob(F-statistic)		0.004813

Sumber : Hasil Olahan Eviews 12

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap variabel independent. Dari hasil pengolahan menggunakan eviews dapat dilihat Prob (F-statistik) 0,004813 atau signifikansi $\alpha = 0.01$. Artinya secara bersama-sama ketiga variable bebas yaitu program kesehatan yang menjadi prioritas dalam 5 (lima) tahun terakhir, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan uji t pada tabel analisis panel data menggunakan aplikasi eviews menunjukkan bahwa semua variabel terikat signifikan mempengaruhi variabel bebas secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Variabel Program 1 (Program Upaya Kesehatan Masyarakat) (X_1) memiliki koefisien regresi 9,104215 dengan probabilitas sebesar 0,0283. Artinya pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, peningkatan anggaran Program1 (X1) secara signifikan meningkatkan (Y) pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow Raya.
2. Variabel Program 2 (Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya) (X_2) memiliki koefisien regresi 3,109912 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0449. Artinya dengan tingkat signifikansi $\alpha < 0.05$, peningkatan anggaran Program 2 (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Y (Pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow Raya)
3. Variabel Program 3 (Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru - paru/Rumah Sakit Mata) (X₃) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0494. Tingkat signifikansi $\alpha < 0.05$ maka peningkatan anggaran Program 3 (X3) meningkatkan Y (Pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow Raya)

Dilihat dari nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa pengaruh X1 lebih besar dari X2 dan X3 terhadap Y.

Koefisien Determinasi

Diperoleh nilai koefisien determinasi Adj R-squared sebesar 0.627687. Ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model serta efek individu masing-masing kabupaten mampu menjelaskan sebesar 62.76% variasi pertumbuhan ekonomi (Y) di Bolaang Mongondow Raya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran di Dinas Kesehatan (Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) untuk 3 (tiga) program prioritas (Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya dan Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru - paru/Rumah Sakit Mata) secara parsial dan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya.

Terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia dengan pertumbuhan ekonomi artinya bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan mampu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat yang merupakan faktor penentu bagi pertumbuhan ekonomi. Hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi seperti yang dikemukakan Wagner dan Keynes adalah dengan membandingkan nilai koefisien pertumbuhan ekonomi pada model pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia dengan koefisien pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia pada model pertumbuhan ekonomi.

Majunya infrastruktur kesehatan suatu daerah akan membuat penduduk di daerah tersebut dapat dengan mudah menjangkau pelayanan kesehatan yang baik ketika dibutuhkan. Mudah-mudahan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan akan membuat kesehatan masyarakat selalu dalam kondisi yang prima, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu akibat banyaknya masyarakat yang terserang penyakit karena tidak mendapat penanganan medis. Selanjutnya dengan tersedianya infrastruktur kesehatan yang mencukupi, ketahanan kesehatan masyarakat akan terjaga, sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital memiliki peran ganda yaitu kesehatan sebagai input dan output dalam pembangunan ekonomi menyebabkan variabel ini sangat penting pengaruhnya. Dan implikasinya produktivitas masyarakat akan bertambah sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya.
2. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya.
3. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru - paru/Rumah Sakit Mata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya.
4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya, dan Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru - paru/Rumah Sakit Mata secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya.

Saran

1. Kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID 19 akan menjadi salah satu motor penggerak percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi di BMR jika diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi terprogram pada penerima manfaat.
2. Ketiga program tersebut harus di dukung dengan kegiatan produktif menopang peningkatan kualitas SDM daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2003**, *Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi dan Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Bandung
- Mangkosoebroto, Guritno, 2000**, *Ekonomi Publik* Edisi ketiga, BPFE UGM, Yogyakarta
- Sokartawi, 1990**, *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan daerah*, Rajawali Press, Jakarta
- Arsyad, Lincoln, 1999**, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah* Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Avicenna S H & Frederic WN, 2017**, *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015*, Vol.15.No.1, Jurnal Ekonomi Pembangunan

- Ranifial Anugra, Taufiq Marwa, Imelda., 2016**, *Analisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan*, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/article/view/8773>
- Merri Anitasari. Ahmad Soleh, 2015**, *Pengaruh Pengeluaran pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/139/131>
- Ferdinandus Sherly, 2020**, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ambon*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/citaekonomika/article/view/2621/2237>
- Ginanjari A Nugroho, 2016**, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan IPM di Indonesia*. Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/57/57>
- Wahyudi , 2018**, *Dampak Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Penduduk Di Provinsi Kalimantan Barat*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia. <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/10.-Wahyudi.pdf>
- Nachrowi, Djalal Nachrowi, Hardius Usman 2006**, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta : Badan Penerbit Universitas Indonesia

ANALISIS SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DI KOTA KOTAMOBAGU

Mohamad F. Mamonto¹, Anderson G. Kumenaung², Ita Pingkan F. Rorong³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email: mohamadferdinandmamonto@gmail.com, andersonkumenaung@unsrat.ac.id,
itapingkan@unsrat.ac.id.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis sektor basis dan non-basis yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan perekonomian, menganalisis perubahan dan pergeseran sektor perekonomian serta menemukan sektor unggulan di Kota Kotamobagu selama tahun 2010-2021.

Sumber data menggunakan data sekunder berupa data tahun 2010-2021, yaitu data PDRB Kotamobagu dan data PDRB Provinsi Sulawesi Utara. data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kotamobagu dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ), analisis *Shift Share*, dan *Typologi Klassen*.

Hasil Analisis *Location Quotient* menunjukkan, sektor basis meliputi Pengadaan Listrik dan gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa lainnya. Hasil Analisis *Shift Share*, menunjukan Pergeseran Proporsional Sektor di Kota Kotamobagu semua bernilai positif, sehingga semua sektor pertumbuhannya relatif cepat. Hasil Analisis *Typologi Klassen* menunjukan sektor maju dan tumbuh pesat, meliputi: Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.

Kata kunci : PDRB, *Location Quotient*, *Shift Share*, *Typologi Klassen*, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

This study aims to analyze the base and non-base sectors that have the potential to affect economic growth, analyze changes and shifts in the economic sector and find leading sectors in Kotamobagu City during 2010-2021.

The data source uses secondary data in the form of data for 2010-2021, namely Kotamobagu PDRB data and North Sulawesi Province PDRB data. data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) Kotamobagu City and the Central Statistics Agency (BPS) North Sulawesi Province. This study uses the Location Quotient (LQ) analysis method, Shift Share analysis, and Klassen Typology.

The results of the Location Quotient Analysis show that the base sector includes electricity and gas procurement, water supply, waste management, waste and recycling, construction, wholesale and retail trade, financial services and insurance, government administration. Compulsory Defense and Social Security, Education Services, Health Services and Social Activities, Other Services. The results of the Shift Share Analysis show that the Sector Proportional Shifts in Kotamobagu City are all positive, so that all sectors grow relatively fast. The results of the Klassen Typology Analysis show that the sectors are advanced and growing rapidly, including: Construction, Wholesale and Retail Trade, Education Services, Health Services and Social Activities and other Services.

Keywords: PDRB, *Location Quotient*, *Shift share*, *Klassen Typology*, *Economic Growth*.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami perubahan akan perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai sebelumnya. Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan disuatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi

kelangsungan pembangunan ekonomi karena penduduk yang terus bertambah sehingga dibutuhkan pertambahan pendapatan setiap tahunnya (Todaro, 2004).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan (Arsyad, 1999:107).

Pola kebijakan pembangunan yang diambil oleh suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah yang bersangkutan. Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dirancang untuk menyajikan peristiwa-peristiwa ekonomi dalam eksploitasi sumber daya tersebut dan lebih lanjut memahami keterkaitan transaksi-transaksi yang terjadi di antaranya.

Kota Kotamobagu adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) di sebelah Utara, Barat dan Selatan serta Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) di sebelah Timur, Kotamobagu merupakan ibukota dari Kabupaten Bolmong dengan total 16 kelurahan. Namun, sejak diresmikannya Kotamobagu sebagai daerah otonom pada tanggal 2 Januari 2007 berdasarkan UU No. 4 Tahun 2007, Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu secara Administrasi terbagi kedalam 4 kecamatan dan 33 desa/kelurahan. Kecamatan Kotamobagu Selatan memiliki luas 62,97 km²; Kecamatan Kotamobagu Timur dengan luas 23,69 km²; Kecamatan Kotamobagu Barat dengan luas 12,20 km²; Kecamatan Kotamobagu Utara dengan luas 10,04 km². Kota Kotamobagu merupakan kota terkecil di Provinsi Sulawesi Utara dengan luas wilayah sebesar 108,89 km². Kota Kotamobagu terletak pada jarak $\pm$ 180 km di selatan ibu kota Provinsi (Kota Manado) berada pada posisi geografis antara 0° 41' 16,29" dan 0° 46' 14,88" Lintang Utara, serta antara 124° 15' 9,56" dan 124° 21' 1,93" Bujur Timur. Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah penduduk di Kotamobagu mencapai 123.722 jiwa. Pertumbuhan penduduk antara tahun 2019 dan 2020 tercatat berada di angka 6%. Kepadatan penduduk di Kotamobagu sebesar 1.136 jiwa per km². Pendapatan Domestik Regional Bruto tercatat pada angka 2,397,215.40 Juta Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 0,2% di tahun 2020, dengan kontributor terbesar dari sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor konstruksi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kotamobagu dalam periode 2010 - 2021 terdapat beberapa sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB Kota kotamobagu. Yaitu, Sektor Jasa Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kota Kotamobagu pada tahun 2021 sebesar 387,648.00 juta rupiah, Kemudian diikuti dengan Sektor Jasa Perdagangan Besar dan Eceran Pada tahun 2021 sebesar 371,804.40 juta rupiah dan selanjutnya Sektor Jasa konstruksi pada tahun 2021 sebesar 355,382.90 juta rupiah. Struktur perekonomian Kota Kotamobagu menurut lapangan usaha pada Tahun 2020 didominasi oleh lapangan usaha utama yaitu: Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor; dan Konstruksi menjadi sandaran utama PDRB Kota Kotamobagu. Jika dirasiokan, nilai kontribusi tersebut dapat menunjukkan struktur ekonomi Kota Kotamobagu sebagai Struktur perekonomian yang bercirikan Jasa.

Tabel 1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Kotamobagu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021.

Komponen PDRB Lapus	PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Kotamobagu (Juta Rupiah)											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	121833.7	124542.48	130553.3	137760.53	142852.83	144459.33	151995.48	160463.33	168981.44	180385.16	180216.01	178812.70
B. Pertambangan dan Penggalian	45484.52	47027.87	48970.27	51126.25	53489.7	57318.29	60746.14	64615.67	69479.38	75418.48	73173.80	76049.50
C. Industri Pengolahan	63567.01	64388.2	69130	72795.42	74817.33	76983.79	75010.61	80863.51	89439.36	92838.42	95442.70	100093.30
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3002.63	3024.24	3349.66	3773.99	4460.9	5155.15	6104.28	6170.76	6243.94	6889.06	7368.69	7925.60
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2444.51	2533.88	2637.4	2796.49	2938.22	3054.33	3118.09	3123.22	3236.18	3393.24	3381.36	3423.30
F. Konstruksi	156658.01	163095.92	181524.51	212842.3	235570.64	258421.87	275610.3	299261.62	321163.88	338749.80	324681.27	355382.90
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	192824.71	211854.51	222366.15	240920.89	263099.22	275788.61	291372.6	310226.82	331164.67	362254.30	358267.09	371804.40
H. Transportasi dan Pergudangan	55504.81	57917.08	62984.01	68204.84	74142.11	79604.44	85631.58	91586.12	99562.57	108344.22	98175.22	98975.20
I. Pengediaan Akomodasi dan Makan Minum	21025.41	22029.66	23718.19	25776.61	27680.95	30210.33	33146.71	35834.19	38764.84	41767.99	41863.57	43631.90
J. Informasi dan Komunikasi	30803.11	32324.95	35721.26	39285.18	43400.64	47411.22	52045	56583.92	62046.54	68052.64	74060.72	75445.70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	126813.48	139022.78	150333.08	159239.19	162623.35	166646.66	195284.93	209971.84	213916.41	217403.34	232722.99	242132.00
L. Real Estate	43279.91	46194.62	49596.54	52658.77	56070.21	60231.02	64196.67	69681.62	75501.62	81006.44	80432.16	79571.50
M.N. Jasa Perusahaan	1015.28	1071.31	1135.3	1201.35	1274.74	1348.33	1440.92	1554.68	1709.28	1879.26	1809.72	1839.20
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	258192.74	278903.34	296673.43	303124.86	322226.45	350512.99	362543.21	373408.63	383005.31	382948.62	376672.31	387648.00
P. Jasa Pendidikan	60962.8	64601.72	68491.83	72016.43	75507.25	80852.46	85774.4	91107.85	100156.47	110011.40	112466.64	114097.40
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129418.61	139643.72	148502.07	157342.6	167409.75	180601.29	195294.04	215600.67	240659.78	264540.45	285465.60	309014.30
R.S.T.U. Jasa lainnya	26340.16	27912.42	29593.22	32023.44	34784.72	37363.35	39791.11	43354.8	49120.83	56500.54	51015.55	52071.60
Produk Domestik Regional Bruto	1339171.39	1426088.68	1525280.22	1632889.15	1742349.03	1855963.46	1979106.07	2113409.26	2254152.5	2392383.37	2397215.40	2497918.60

(Sumber BPS Kota Kotamobagu, diolah)

Pada PDRB provinsi sulawesi utara sebagai PDRB pembanding Dalam Sepuluh tahun terakhir menunjukkan perekonomian di Sulawesi Utara mulai secara berangsur ke sektor tersier atau jasa, pola perekonomian kembali menunjukkan pergeseran dimana sektor primer penyumbang 25,90 persen pada tahun 2019, kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 26,94 persen. Begitupula denga sektor sekunder yang meningkat menjadi sebesar 21,11 persen pada tahun 2020 dari yang sebelumnya sebesar 20,72 persen pada tahun 2019.

Tabel 2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021.

Komponen PDRB Lapus	PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Sulawesi Utara (Juta Rupiah)											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,281,007	12,154,188	12,918,081	13,754,380	14,230,585	14,605,520	15,141,887	15,814,316	16,367,259	17,320,482	17,705,449	17,994,184
B. Pertambangan dan Penggalian	2,483,774	2,687,953	2,868,258	3,022,999	3,234,154	3,503,755	3,859,303	3,991,183	4,344,225	4,694,004	4,650,508	4,876,170
C. Industri Pengolahan	5,711,852	6,116,248	6,562,011	6,904,807	7,140,672	7,338,083	7,417,069	8,010,190	8,362,167	8,411,598	8,764,756	9,546,947
D. Pengadaan Listrik dan Gas	45,210	47,773	53,703	62,299	68,821	80,507	94,610	99,137	102,620	112,051	119,828	128,173
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	75,081	79,759	85,585	91,761	94,749	97,046	100,025	100,831	104,147	108,748	113,292	113,846
F. Konstruksi	6,296,245	6,947,714	7,324,263	7,933,964	8,400,756	9,219,900	9,862,174	10,593,031	11,346,939	12,039,440	11,518,351	12,321,288
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,227,521	6,899,099	7,250,163	7,811,064	8,528,451	9,037,800	9,587,905	10,119,446	10,701,922	11,634,920	11,445,858	11,839,704
H. Transportasi dan	4,173,610	4,438,279	4,749,998	5,059,981	5,585,990	6,006,603	6,552,877	6,922,865	7,466,819	7,909,269	6,790,329	6,911,909
I. Pengediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,034,086	1,101,929	1,192,722	1,285,411	1,425,029	1,543,969	1,736,046	1,848,842	1,958,951	2,013,893	1,491,170	1,680,778
J. Informasi dan Komunikasi	2,127,935	2,307,958	2,486,363	2,698,253	2,948,475	3,210,496	3,505,986	3,753,807	4,046,717	4,369,734	4,836,156	4,951,192
K. Jasa Keuangan dan	1,800,407	1,981,032	2,208,805	2,354,899	2,421,542	2,506,806	2,986,973	3,187,945	3,203,612	3,323,855	3,520,446	3,705,996
L. Real Estate	1,791,270	1,944,458	2,087,886	2,225,737	2,421,972	2,605,499	2,790,025	2,991,486	3,218,628	3,372,685	3,329,613	3,317,983
M.N. Jasa Perusahaan	38,969	42,655	45,790	49,534	53,569	57,912	61,889	67,490	73,591	78,927	74,745	76,376
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,661,523	3,836,540	4,210,914	4,258,466	4,639,202	5,056,200	5,293,650	5,581,654	5,889,031	5,889,611	5,806,035	5,973,748
P. Jasa Pendidikan	1,329,150	1,418,717	1,508,664	1,586,533	1,650,377	1,767,208	1,876,574	1,982,364	2,162,437	2,377,244	2,451,117	2,480,204
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,859,992	2,045,619	2,198,488	2,338,158	2,485,135	2,680,959	2,894,963	3,115,678	3,442,498	3,693,477	3,999,186	4,322,967
R.S.T.U. Jasa lainnya	783,702	860,975	925,893	984,387	1,029,285	1,107,067	1,202,705	1,303,761	1,458,158	1,650,326	1,509,536	1,549,463
Produk Domestik Regional Bruto	51,721,334	54,910,897	58,677,587	62,422,633	66,358,765	70,425,330	74,764,660	79,484,025	84,249,720	89,009,265	88,126,374	91,790,927

(Sumber BPS Sulawesi Utara, di Olah)

Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah (Sambodo 2002 dalam Usya, 2006: 18). Perencanaan pembangunan pada era otonomi daerah akan lebih berhasil jika ia dilakukan dengan memprioritaskan potensi dan sektor yang menjadi unggulan daerah (Sutiyo dan Maharjan, 2017.) Oleh karena itu, dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan yang berada di Kota Kotamobagu dapat menjadi prospek dan dijadikan sebagai modal dasar dalam rangka pembangunan perekonomian khususnya dalam merangsang terciptanya kesempatan kerja dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Kotamobagu di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kota Kotamobagu”.

Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Apa sajakah sektor basis dan sektor non basis lapangan usaha yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Kota Kotamobagu selama tahun 2010 sampai dengan 2021?
- 2) Bagaimana perubahan dan Pergeseran sektor perekonomian di Kota Kotamobagu selama tahun 2010 sampai dengan 2021?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Menemukan sektor basis dan sektor non basis lapangan usaha yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Kota Kotamobagu selama tahun 2010 sampai dengan 2021;
- 2) Menganalisis perubahan dan Pergeseran sektor perekonomian di Kota Kotamobagu selama tahun 2010 sampai dengan 2021

Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah Bagi Pemerintah diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kota Kotamobagu. untuk masyarakat diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi informasi bagi seluruh masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu. Dan untuk peneliti diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan terutama sektor lapangan usaha unggulan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu.

Landasan Teori

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara singkat diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya dititik beratkan pada tiga aspek, yaitu proses, peningkatan output per kapita dan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (*one shoot*). Di sini dapat dilihat adanya aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat perekonomian sebagai sesuatu yang berkembang dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perkembangan itu sendiri (Budiono, 1992) .

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli

Mazhab Klasik

Gagasan-gagasan Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus menunjukkan bahwa para pemikir mazhab Klasik menganut pandangan yang luas tentang kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat (Djojohadikusumo, 1994: 27-35) . Mereka menempatkan fenomena ekonomi dalam suatu sistem ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Lagi pula pengamatannya tentang perkembangan ekonomi biasanya menjangkau jangka waktu yang cukup panjang. Walaupun mempunyai pandangan dan haluan pemikiran yang mengandung banyak persamaan, tentu saja para pemikir mazhab Klasik ini mempunyai perbedaan dalam hal pendekatan maupun model kajiannya.

Adam Smith

Adam Smith sering kali disebut sebagai “bapak” dari ilmu ekonomi modern. Dia sebenarnya lebih dikenal dengan Teori Nilai yaitu teori yang menyelidiki faktor-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Dalam bukunya yang monumental “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*”, dapat dilihat tema pokoknya mengenai bagaimana perekonomian kapitalis tumbuh. Pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith di bagi menjadi 5 tahapan yang berurutan, yaitu dimulai dari tahap perburuan, tahap beternak, tahap bercocok tanam, tahap perdagangan dan yang terakhir adalah tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi (Kuncoro, 1997: 38-41) .

Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut (Tarigan, 2005). Teori basis ini digolongkan kedalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar di daerah tersebut maupun luar daerah. Secara tidak langsung daerah mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain. Sektor non basis adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat di dalam batas wilayah perekonomian tersebut. Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keunggulan kompetitif yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis (Sjafrizal , 2008:94)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Menurut Todaro (2002) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut).

Ruang Lingkup PDRB menurut Lapangan Usaha

Uraian PDRB menurut lapangan usaha yang disajikan mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya. masing-masing kategori tersebut yaitu :

- 1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan (*Agriculture, Livestock, Forestry And Fishery*)
- 2) Pertambangan dan Penggalian (*Mining and Quarrying*)
- 3) Industri Pengolahan (*Manufacturing*)
- 4) Pengadaan Listrik dan Gas (*Electricity and Gas Supply*)
- 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (*Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remedial Activities*)
- 6) Konstruksi (*Construction*)
- 7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*)
- 8) Transportasi dan Pergudangan (*Transportation and Warehousing*)
- 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (*Accommodation and Food Service Activities*)
- 10) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
- 11) Jasa Keuangan dan Asuransi (*Financial and Insurance Activities*)
- 12) Real Estat (*Real Estate*)
- 13) Jasa Perusahaan (*Business Activities*)
- 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*)
- 15) Jasa Pendidikan (*Education*)
- 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (*Human Health and Social Work Activities*)
- 17) Jasa Lainnya (*Other Services Activities*). Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu (2021)

Penelitian Terdahulu

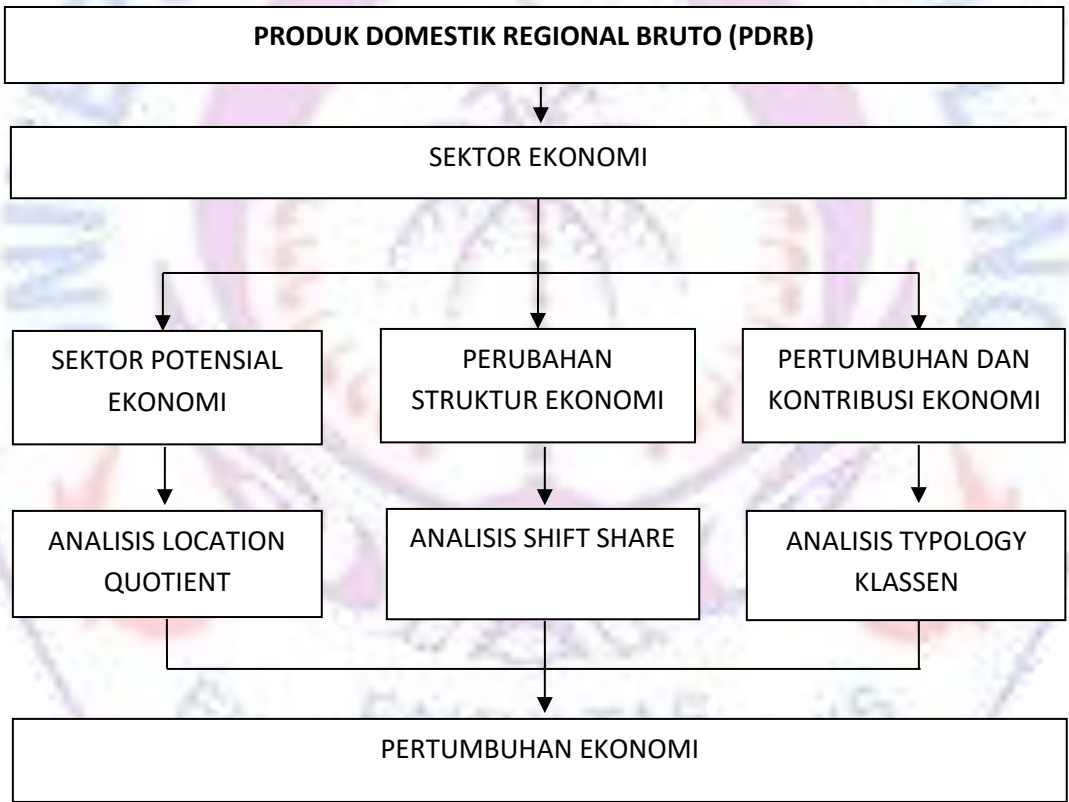
Penelitian Faisal Ramadan Sajab (2021) berjudul Analisis Sektor-Sektor Unggulan Dalam Perekonomian Di Kota Manado, bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan dan sektor non unggulan dalam perekonomian Kota Manado menggunakan metode analisis LQ dan Shift Share, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor-sektor unggulan adalah: Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Grosir dan Eceran; Bengkel Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Sektor jasa lainnya. Dan sektor berpengaruh yang memiliki daya saing terbesar di Kota Manado yaitu: Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Sektor Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minuman.

Penelitian Yuna Hutapea (2020) berjudul Analisis Sektor Basis Dan Non Basis Serta daya saing Ekonomi Dalam Peningkatan pertumbuhan Ekonomi Kota Medan, dengan Tujuan penelitian untuk menganalisis sektor-sektor apa saja yang termasuk sektor basis dan non basis dan bagaimana daya saing ekonomi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan alat analisis Location Quotient (LQ), *Shift Share* dan Klassen Tipologi. dengan Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis Location Quotient terdapat 12 sektor basis yaitu: sektor pengadaan air, pengolahan sampah,

limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya dan 5 sektor perekonomian lainnya menjadi sektor non basis Kota Medan. Hasil penelitian dari analisis Shift Share didapatkan hasil secara sektoral maka hampir semua sektor ekonomi di Kota Medan memiliki nilai *Differential Shift* yang positif yang berarti sektor-sektor ekonomi tersebut memiliki daya saing yang kuat atau memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian Sumatera Utara. Hasil penelitian dari analisis Tipologi Klassen terdapat sembilan sektor maju dan tumbuh pesat di Kota Medan diantaranya ialah : sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; real estate; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya.

KERANGKA PIKIR

Gambar Kerangka Konseptual



Sumber: Kajian teori (diolah penulis)

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari buku, catatan dan majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data tahun 2010-2021, yaitu data PDRB Kotamobagu dan data PDRB Provinsi Sulawesi Utara data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kotamobagu dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian (Sujarweni, 2019:93). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi Pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian (Widodo, 2017:75).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang di gunakan pada Penelitian ini yaitu Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dirancang untuk menyajikan peristiwa-peristiwa ekonomi dalam eksploitasi sumber daya tersebut dan lebih lanjut memahami keterkaitan transaksi-transaksi yang terjadi di antaranya.

Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Yang berdasarkan atas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Kotamobagu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Sulawesi Utara 2010 sampai dengan tahun 2021.

Metode Analisis

Untuk Menjawab Permasalahan yang telah di tetapkan maka penelitian ini menggunakan alat dengan metode analisis *Location Quotient* (LQ), analisis *Shift Share*, dan *Typologi Klassen*.

Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) adalah teori basis ekonomi yang intinya adalah karena industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah. Secara umum metode analisis LQ dapat diformulasikan sebagai berikut (Widodo, 2006).

Analisis LQ di gunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis maupun non basis.

$$LQ = \frac{V_1^R / V^R}{V_1 / V}$$

Dimana

- LQ = Jumlah PDRB Suatu sektor i Kota Kotamobagu
- V_1^R = Jumlah PDRB Suatu sektor i Kota Kotamobagu
- V^R = Jumlah PDRB Seluruh sektor Kota Kotamobagu
- V_1 = Jumlah PDRB Suatu sektor i tingkat Provinsi Sulawesi Utara
- V = Jumlah PDRB Seluruh sektor tingkat Provinsi Sulawesi Utara

Kriteria pengukuran LQ yaitu:

- a. $LQ > 1$ berarti menunjukkan sektor basis, artinya dimana sektor I di Kota Kotamobagu memiliki kontribusi lebih besar daripada sektor yang sama di Kota Kotamobagu dalam pembentukan PDRB. Sehingga sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan barang dan jasa yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
- b. $LQ < 1$ berarti menunjukkan sektor non basis, artinya dimana komoditas I di Kota Kotamobagu memiliki kontribusi yang lebih kecil daripada komoditas yang sama di Kota Kotamobagu dalam pembentukan PDRB. Sehingga komoditas tersebut tidak mampu untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
- c. $LQ = 1$ berarti menunjukkan komoditas I yang merupakan daerah self sufficient, artinya daerah itu mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa dengan hasil kegiatan ekonomi yang ada di daerah tersebut.

Analisis Shift Share

Analisis *Shift-Share* menggambarkan kinerja sektor-sektor pada suatu daerah dibandingkan dengan perekonomian wilayah provinsi (yang lebih besar). Apabila dalam suatu daerah memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian provinsi, sehingga dapat ditemukan adanya shift atau pergeseran hasil pembangunan perekonomian daerah. Laju pertumbuhan sektorsektor dalam suatu wilayah dibandingkan dengan laju pertumbuhan perekonomian provinsi dengan sektor-sektor lainnya. Suatu daerah yang memiliki banyak sektor yang tingkat pertumbuhannya lamban maka sektor tersebut pertumbuhannya secara nasional juga akan lamban. Hal ini terjadi karena daerah-daerah lain tumbuh lebih cepat (Putra, 2011:165). Analisis shift share memiliki tiga komponen yaitu:

- National share untuk mengetahui pergeseran struktur perekonomian suatu daerah yang dipengaruhi oleh pergeseran perekonomian nasional.
- Proportional shift adalah pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor dibandingkan total sektor di tingkat nasional
- Differential shift atau competitive position adalah perbedaan pertumbuhan perekonomian satu daerah dengan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat nasional.

Teknik analisis shift share merupakan Teknik analisis yang mengkaji hubungan antara struktur ekonomi dan pertumbuhan wilayah, pertama-tama dikembangkan oleh Daniel B. Creamer (1943) dan dipakai sebagai suatu alat analitik pada permulaan tahun 1960-an oleh Ashby (1964) sampai sekarang.

Analisis *shift share* membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) variabel penyerapan tenaga kerja di wilayah dalam kurun waktu tertentu menjadi pengaruh pertumbuhan nasional (N), bauran industri (M), dan keunggulan kompetitif (C). Pengaruh pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa (share).

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan:

Dij: perubahan variabel penyerapan PDRB sektor i di Kota Kotamobagu dalam kurun waktu 2010-2021

Nij: komponen pertumbuhan sektor i di Sulawesi Utara (*National Share*) diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.

Mij : pergeseran proporsional sektor i di Kota Kotamobagu (*Proportional Shift*) mengukur perubahan relatif pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini bertujuan apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor atau industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan. Komponen pengukuran ini biasa juga disebut dengan bauran industri atau industrial mix dimana jika hasilnya positif berarti sektor perekonomian di daerah tersebut tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang ada di atasnya yang dijadikan acuan, demikian pula jika sebaliknya.

Cij : keunggulan kompetitif atau daya saing sektor i di Kota Kotamobagu (*Differential Shift*) menentukan seberapa jauh daya saing sektor atau industri daerah dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Jika pergeseran diferensial dari suatu sektor atau industri adalah positif maka sektor atau industri tersebut memiliki daya saing yang lebih tinggi terhadap sektor atau industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan

Untuk memperoleh nilai dari ketiga komponen tersebut maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$N_{ij} = E_{ij} \cdot r_n \text{ dimana } r_n = E_n t - E_n to / E_n to$$

$$M_{ij} = E_{ij} \cdot (r_{in} - r_n) \text{ dimana } r_{in} = E_{in} t - E_{in} to / E_{in} to$$

$$C_{ij} = E_{ij} \cdot (r_{ij} - r_{in}) \text{ dimana } r_{ij} = E_{ijn} t - E_{ij} to / E_{ij} to$$

Keterangan :

E_{ij} = nilai sektor i pada perekonomian daerah

r_n = nilai pertumbuhan ekonomi daerah acuan

r_{in} = nilai pertumbuhan sektor i pada perekonomian acuan
 r_{ij} = nilai pertumbuhan sektor i pada perekonomian daerah
 Ent = nilai total sektor ekonomi pada perekonomian acuan di tahun akhir
 $Ento$ = nilai total sektor ekonomi pada perekonomian acuan tahun awal
 E_{ijnt} = nilai sektor i pada perekonomian daerah di tahun akhir
 E_{ijto} = nilai sektor i pada perekonomian daerah tahun awal

Typologi Klassen

Menurut Sjafrizal (1997), *Typologi Klassen* merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah. Alat analisis ini dapat digunakan melalui dua pendekatan, yang pertama adalah dengan pendekatan sektoral sedangkan pendekatan yang kedua adalah dengan pendekatan wilayah/daerah seperti yang untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita daerah. Hasil dari *typology klassen* akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa pasar, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah tersebut (Tarigan, 2010). *Typology klassen* dengan pendekatan secara sektoral dapat menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda yaitu sebagai berikut:

1. Kuadran I/ Sektor yang Maju dan Tumbuh dengan Pesat.

Pada kuadran ini sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih besar apabila dibandingkan dengan pertumbuhan daerah yang telah menjadi sebuah acuan atau secara nasional (g) dan memiliki kontribusi terhadap PDRB (s_i) yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi sebuah acuan secara nasional (s). Hasil dari klasifikasi ini biasanya dilambangkan dengan tanda ' g_i ' lebih besar dari ' g ' dan ' s_i ' lebih besar dari ' s '. sektor yang ada didalam kuadran I bisa diartikan sebagai sektor yang memiliki potensi karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan atau secara nasional.

2. Kuadran II / Sektor Maju Tapi Tertekan.

Pada sektor ini berada pada kuadran ini dengan memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi sebuah acuan atau secara nasional (g), akan tetapi telah memiliki nilai kontribusi terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). hasil klasifikasi ini bisa digambarkan dengan ' g_i ' lebih kecil dari ' g ' dan ' s_i ' lebih besar dari ' s '. Kedudukan sektor dalam kategori ini dapat dikatakan sebagai sektor yang telah lama atau bisa dikatakan pada posisi yang jenuh.

3. Kuadran III / Sektor Potensial atau Masih Dapat Berkembang dengan Pesat.

Pada kuadran ini sektor yang telah memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (s_i) harus lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi nilai kontribusi suatu sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasanya digambarkan dengan ' g_i ' lebih besar dari ' g ' dan ' s_i ' lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap nilai PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). hasil klasifikasi ini dilambangkan dengan ' g_i ' yang lebih besar dari ' g ' dan ' s_i ' akan lebih kecil dari s . Setiap sektor yang termasuk dalam kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang sedang menjadi trend/sedang booming di kalangan masyarakat. Walaupun pangsa pasar daerahnya tersebut relative lebih kecil apabila dibandingkan dengan rata-rata tingkat nasional.

4. Kuadran IV / Sektor Relatif Tertinggal

Kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai pertumbuhan PDRB daerah yang telah menjadi sebuah acuan atau secara nasional (g) selain itu juga telah memiliki nilai kontribusi tersebut terhadap PDRB (s_i) yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional. (Widodo, 2006).

Tabel 3 Alat Analisis *Typologi Klassen*

TYPOLOGI KLASSEN		PERTUMBUHAN SEKTORAL	
		$gi \geq g$	$gi < g$
KONTRIBUSI SEKTORAL	$si \geq s$	KUADRAN I Sektor maju dan tumbuh pesat	KUADRAN II Sektor maju tapi tertekan
	$si < s$	KUADRAN III Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat	KUADRAN IV Sektor relatif tertinggal

Berdasarkan alat analisis digunakan melalui pendekatan sektoral, Menurut Sjafrizal (1997), *Typologi Klassen* merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah. Alat analisis ini dapat digunakan melalui dua pendekatan, yang pertama adalah dengan pendekatan sektoral sedangkan pendekatan yang kedua adalah dengan pendekatan wilayah/daerah.

Makalah hendaknya memuat tulisan yang berisi 1.Pendahuluan, 2. Metode Penelitian (bisa meliputi analisa, arsitektur, metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah, implementasi), 3. Hasil dan Pembahasan, 4. Kesimpulan dan5. Saran (future works) yg berisi penelitian lanjut di masa mendatang. Pada setiap paragraph bisa terdiri dari beberapa subparagraph yang dituliskan dengan penomoran angka arab seperti yang ditunjukkan section berikut ini. Jumlah halaman minimum 10 halaman dan maksimum 25 halaman ukuran A4.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis LQ (*Location Quotient*)

Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) dapat di lihat pada tabel 4 Hasil Analisis Location Quotient PDRB Lapangan Usaha ADHK Kota Kotamobagu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 4

Hasil Analisis Location Quotient PDRB Lapangan Usaha ADHK Kota Kotamobagu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021

Komponen PDRB Lapus	Analisis Location Quotient PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Kotamobagu terhadap PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sulawesi Utara (Juta Rupiah)												rata rata	Sektor basis/se ktor non basis
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,38	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,37	0,37	0,382	Sektor Non Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	0,71	0,67	0,66	0,65	0,63	0,62	0,63	0,61	0,60	0,60	0,58	0,57	0,626	Sektor Non Basis
C. Industri Pengolahan	0,43	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,40	0,41	0,40	0,39	0,4	Sektor Non Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,57	2,44	2,40	2,32	2,47	2,43	2,44	2,34	2,27	2,29	2,26	2,27	2,374	Sektor Basis
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,26	1,22	1,19	1,17	1,18	1,19	1,18	1,16	1,16	1,16	1,10	1,10	1,173	Sektor Basis
F. Konstruksi	0,96	0,90	0,95	1,03	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,05	1,04	1,06	1,025	Sektor Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,20	1,18	1,18	1,18	1,17	1,16	1,15	1,15	1,16	1,16	1,15	1,15	1,166	Sektor Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	0,51	0,50	0,51	0,52	0,51	0,50	0,49	0,50	0,50	0,51	0,53	0,53	0,509	Sektor Non Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,79	0,77	0,77	0,77	0,74	0,74	0,72	0,73	0,74	0,77	1,03	0,95	0,793	Sektor Non Basis
J. Informasi dan Komunikasi	0,56	0,54	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,58	0,56	0,56	0,561	Sektor Non Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,72	2,70	2,62	2,59	2,56	2,52	2,47	2,48	2,50	2,43	2,43	2,40	2,534	Sektor Basis
L. Real Estate	0,93	0,91	0,91	0,90	0,88	0,88	0,87	0,88	0,88	0,89	0,89	0,88	0,892	Sektor Non Basis
M.N. Jasa Perusahaan	1,01	0,97	0,95	0,93	0,91	0,88	0,88	0,87	0,87	0,89	0,89	0,88	0,91	Sektor Non Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,72	2,80	2,71	2,72	2,65	2,63	2,59	2,52	2,43	2,42	2,38	2,38	2,579	Sektor Basis
P. Jasa Pendidikan	1,77	1,75	1,75	1,74	1,74	1,74	1,73	1,73	1,73	1,72	1,69	1,69	1,731	Sektor Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,69	2,63	2,60	2,57	2,57	2,56	2,55	2,60	2,61	2,66	2,62	2,63	2,607	Sektor Basis
R.S.T.U. Jasa lainnya	1,30	1,25	1,23	1,24	1,29	1,28	1,25	1,25	1,26	1,27	1,24	1,23	1,258	Sektor Basis

(Sumber BPS Kota Kotamobagu, diolah)

Sehingga hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) :

Sektor lapangan usaha yang termasuk dalam Sektor Basis dimana $LQ > 1$ ada 9 (Sembilan), Lapangan Usaha yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan Listrik dan gas dengan rata rata hasil nilai LQ 2,374
2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan rata rata hasil nilai LQ 1,173
3. Konstruksi dengan rata rata hasil nilai LQ 1,025
4. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan rata rata hasil nilai LQ 1,166
5. Jasa Keuangan dan Asuransi dengan rata rata hasil nilai LQ 2,534
6. Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan rata rata hasil nilai LQ 2,579
7. Jasa Pendidikan dengan rata rata hasil nilai LQ 1,731

8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan rata rata hasil nilai LQ 2,607
9. Jasa lainnya dengan rata rata hasil nilai LQ 1,258
- Sektor lapangan usaha yang termasuk dalam Sektor non Basis dimana $LQ < 1$. terdapat 8 (Delapan), Lapangan Usaha yaitu sebagai berikut :
1. Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan dengan rata rata hasil nilai LQ 0,382
2. Pertambangan dan Penggalian dengan rata rata hasil nilai LQ 0,626
3. Industri Pengolahan dengan rata rata hasil nilai LQ 0,400
4. Transportasi dan Pergudangan dengan rata rata hasil nilai LQ 0,509
5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan rata rata hasil nilai LQ 0,793
6. Informasi dan Komunikasi dengan rata rata hasil nilai LQ 0,561
7. Real Estate dengan rata rata hasil nilai LQ 0,892
8. Jasa Perusahaan dengan rata rata hasil nilai LQ 0,91

Hasil Analisis Shift Share

Hasil Analisis *Shift-Share* dimana analisis menggambarkan kinerja sektor-sektor pada daerah Kota Kotamobagu dibandingkan dengan perekonomian wilayah provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2010 sampai dengan 2021.

Tabel 5
Hasil Analisis *Shift Share* sektor lapangan Usaha antara daerah Kota Kotamobagu dengan Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2010 sampai dengan 2021

KOMPONEN PDRB LAPUS	KOTA KOTAMOBAGU		PROVINSI SULAWESI UTARA		HASIL ANALISIS SHIFT SHARE			
	2010	2021	2010	2021	Nij	Mij	Cij	Dij
A. Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	121833.7	178812.70	12,281,007	17,994,184	94,387	43909.28	301.4415	138,597.83
B. Pertambangan dan Penggalian	45484.52	76049.50	2,483,774	4,876,170	35,238	33941.41	-13246.2	55,933.05
C. Industri Pengolahan	63567.01	100093.30	5,711,852	9,546,947	49,247	33065.58	-6154.35	76,157.92
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3002.63	7925.60	45,210	128,173	2,326	4268.713	-587.032	6,007.88
E. Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	2444.51	3423.30	75,081	113,846	1,894	977.7927	-283.333	2,588.27
F. Konstruksi	156658.01	355382.90	6,296,245	12,321,288	121,366	116138.5	48814.71	286,319.47
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	192824.71	371804.40	6,227,521	11,839,704	149,385	134624.6	5207.886	289,217.84
H. Transportasi dan Pergudangan	55504.81	98975.20	4,173,610	6,911,909	43,001	28212.71	7053.771	78,267.22
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21025.41	43631.90	1,034,086	1,680,778	16,289	10186.63	9457.715	35,933.17
J. Informasi dan Komunikasi	30803.11	75445.70	2,127,935	4,951,192	23,864	31661.53	3774.285	59,299.62
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	126813.48	242132.00	1,800,407	3,705,996	98,245	103984.6	-18903.6	183,326.12
L. Real Estate	43279.91	79571.50	1,791,270	3,317,983	33,530	28577.74	-596.205	61,511.38
M.N. Jasa Perusahaan	1015.28	1839.20	38,969	76,376	787	755.0308	-150.664	1,390.92
O. Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	258192.74	387648.00	3,661,523	5,973,748	200,027	126315.8	-33591.6	292,751.49
P. Jasa Pendidikan	60962.8	114097.40	1,329,150	2,480,204	47,229	40900.8	340.352	88,470.30
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129418.61	309014.30	1,859,992	4,322,967	100,263	132767.2	8221.404	241,251.92
R.S.T.U. Jasa lainnya	26340.16	52071.60	783,702	1,549,463	20,406	19939.12	-5.72446	40,339.66
Produk Domestik Regional Bruto	1339171.4	2497918.60	51,721,334	91,790,927	1,037,484	803760.4	121263.3	1,962,507.63

(Sumber BPS Kota Kotamobagu, diolah)

Berdasarkan Tabel 5 Hasil Analisis *Shift Share* sektor lapangan Usaha antara daerah Kota Kotamobagu dengan Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2010 sampai dengan 2021, dimana:

- **Mij** (Pergeseran Proporsional Sektor i di Kota Kotamobagu/Proporsional Shift) menunjukkan ke 17 (tujuh belas) Sektor Lapangan Usaha semua bernilai positif, sehingga menunjukkan bahwa Semua Sektor Lapangan Usaha pertumbuhan sektornya relatif cepat.
- **Cij** (keunggulan kompetitif atau daya saing sector di Kota Kotamobagu/Differential Shift)
 - sektor lapangan usaha di Kota Kotamobagu yang bernilai positif adalah sektor lapangan usaha yang memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing sektor yang lebih tinggi yaitu: Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan dengan nilai 301,4415, Konstruksi dengan nilai 48.814,71, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai 5207,886, Transportasi dan Pergudangan dengan nilai 7053,771, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai 9457,715, Informasi dan Komunikasi dengan nilai 3774,285, Jasa Pendidikan dengan nilai 340,35195, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan nilai 8221,404
 - Sektor lapangan usaha di Kota Kotamobagu yang bernilai Negatif adalah sektor lapangan usaha yang tidak memiliki keunggulan kompetitif atau tidak mempunyai daya saing sektor yaitu :
 - 1) Pertambangan dan Penggalian dengan nilai (-13246,2)
 - 2) Industri Pengolahan dengan nilai (-6154,35)
 - 3) Pengadaan Listrik dan gas dengan nilai (-587.032)
 - 4) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai (-288.333)
 - 5) Jasa Keuangan dan Asuransi dengan nilai (-18903.6)
 - 6) Real Estate dengan nilai (-596.205)
 - 7) Jasa Perusahaan dengan nilai (-150,664)
 - 8) Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai (-33591,57)
 - 9) Jasa lainnya dengan nilai (-5,72446)
- **Dij** (Pergeseran Struktur Ekonomi/ perubahan variable) pada penyerapan PDRB sektoral di Kota Kotamobagu terhadap PDRB sektoral di Provinsi Sulawesi utara dari tahun 2010 sampai dengan 2021, dimana hasil dari ke 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha semuanya bernilai positif sehingga ini menunjukkan bahwa Pergeseran struktur ekonomi di kota kotamobagu memiliki nilai positif.

Hasil Analisis typologi Klassen

Analisis typology klassen ini digunakan untuk melihat tentang suatu pola dan struktur pertumbuhan dari masing-masing sektor ekonomi.

Tabel 6
Hasil Analisis Typologi Klassen provinsi Sulawesi Utara dan Kota Kotamobagu dari Tahun 2010 sampai dengan 2021

Komponen PDRB Lapus	Provinsi Sulawesi Utara		Kota Kotamobagu		Keterangan	kuadran
	rata rata pertumb uhan	rata rata kontrib usi	rata rata pertu mbuha n	rata rata kontrib usi		
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.0356	0.2090	0.0358	0.0798	Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat	3
B. Pertambangan dan Penggalan	0.0636	0.0502	0.0483	0.0314	Sektor relatif tertinggal	4
C. Industri Pengolahan	0.0481	0.1044	0.0427	0.0418	Sektor relatif tertinggal	4
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.1004	0.0011	0.0940	0.0027	Sektor maju tapi tertekan	2
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.0388	0.0014	0.0313	0.0016	Sektor maju tapi tertekan	2
F. Konstruksi	0.0636	0.1298	0.0785	0.1331	Sektor maju dan tumbuh pesat	1
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.0606	0.1270	0.0619	0.1480	Sektor maju dan tumbuh pesat	1
H. Transportasi dan Pergudangan	0.0491	0.0831	0.0554	0.0423	Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat	3
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.0511	0.0210	0.0690	0.0165	Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat	3
J. Informasi dan Komunikasi	0.0800	0.0466	0.0852	0.0261	Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat	3
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.0689	0.0378	0.0614	0.0958	Sektor maju tapi tertekan	2
L. Real Estate	0.0582	0.0366	0.0574	0.0327	Sektor relatif tertinggal	4
M.N. Jasa Perusahaan	0.0639	0.0008	0.0562	0.0007	Sektor relatif tertinggal	4
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.0461	0.0692	0.0381	0.1787	Sektor maju tapi tertekan	2
P. Jasa Pendidikan	0.0586	0.0258	0.0589	0.0447	Sektor maju dan tumbuh pesat	1
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.0798	0.0397	0.0825	0.1035	Sektor maju dan tumbuh pesat	1
R.S.T.U. Jasa lainnya	0.0655	0.0163	0.0658	0.0205	Sektor maju dan tumbuh pesat	1
Produk Domestik Regional Bruto	0.0538	1.0000	0.0585	1.0000	Sektor maju dan tumbuh pesat	1

(Sumber BPS Kota Kotamobagu, diolah)

Berdasarkan Tabel 5 Hasil Analisis Typologi Klassen Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Kotamobagu dari Tahun 2010 sampai dengan 2021 dari ke 17 (tujuh belas) Sektor Lapangan Usaha terbagi dalam empat kuadran, yaitu:

- 1) Kuadran I adalah sektor maju dan tumbuh pesat
- Kuadran I dimana Pertumbuhan sektoral daerah Kota Kotamobagu Lebih besar sama dengan Pertumbuhan sektoral daerah Provinsi Sulawesi Utara (Regional), dan Kontribusi daerah Kota Kotamobagu lebih besar sama dengan kontribusi sektoral daerah Provinsi Sulawesi Utara (Regional). Pada kuadran 1 Hasil menunjukkan bahwa dari 17 (tujuh belas) Sektor Lapangan Usaha, yang termasuk dalam kuadran I (sektor maju dan tumbuh pesat), yaitu : Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa lainnya
- 2) Kuadran II adalah sektor maju tapi tertekan
- Kuadran II dimana Pertumbuhan sektoral daerah Kota Kotamobagu Lebih Kecil sama dengan Pertumbuhan sektoral daerah Provinsi Sulawesi Utara (Regional), dan Kontribusi daerah Kota Kotamobagu lebih besar sama dengan kontribusi sektoral daerah Provinsi Sulawesi Utara (Regional). Pada Kuadran II Hasil menunjukkan bahwa dari 17 (tujuh belas) Sektor Lapangan Usaha, yang termasuk dalam kuadran II (sektor maju tapi tertekan), yaitu :

Pengadaan Listrik dan gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

- 3) Kuadran III adalah sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat Kuadran III dimana Pertumbuhan sektoral daerah Kota Kotamobagu lebih besar sama dengan Pertumbuhan sektoral daerah Provinsi Sulawesi Utara (Regional), dan Kontribusi daerah Kota Kotamobagu lebih kecil dari kontribusi sektoral daerah Provinsi Sulawesi Utara (Regional).
Pada kuadran III Hasil menunjukkan bahwa dari 17 (tujuh belas) Sektor Lapangan Usaha, yang termasuk dalam kuadran III (sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat), yaitu : Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi.
- 4) Kuadran IV adalah sektor relatif tertinggal Kuadran IV dimana Pertumbuhan sektoral daerah Kota Kotamobagu lebih kecil dari Pertumbuhan sektoral daerah Provinsi Sulawesi Utara (Regional), dan Kontribusi daerah Kota Kotamobagu lebih kecil dari kontribusi sektoral daerah Provinsi Sulawesi Utara (Regional). Pada kuadran IV Hasil menunjukkan bahwa dari 17 (tujuh belas) Sektor Lapangan Usaha, yang termasuk dalam kuadran IV (sektor relatif tertinggal), yaitu : Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan, Real Estate, Jasa Perusahaan

Pembahasan

Berdasarkan Hasil Analisis Location Quotient PDRB Lapangan Usaha ADHK Kota Kotamobagu terhadap Lapangan Usaha ADHK Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan, bahwa sektor lapangan usaha di Kota Kotamobagu yang termasuk dalam sektor basis dimana $LQ > 1$ ada 9 (Sembilan), Lapangan Usaha meliputi Pengadaan Listrik dan gas dengan rata rata hasil nilai LQ 2,374, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan rata rata hasil nilai LQ 1,173, Konstruksi dengan rata rata hasil nilai LQ 1,025, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan rata rata hasil nilai LQ 1,166, Jasa Keuangan dan Asuransi dengan rata rata hasil nilai LQ 2,534, Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan rata rata hasil nilai LQ 2,579, Jasa Pendidikan dengan rata rata hasil nilai LQ 1,731, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan rata rata hasil nilai LQ 2,607, Jasa lainnya dengan rata rata hasil nilai LQ 1,258.

Selanjutnya Sektor lapangan usaha di Kota Kotamobagu yang termasuk dalam Sektor non Basis dimana $LQ < 1$. terdapat 8 (Delapan), Lapangan Usaha meliputi: Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan dengan rata rata hasil nilai LQ 0,382, Pertambangan dan Penggalan dengan rata rata hasil nilai LQ 0,626, Industri Pengolahan dengan rata rata hasil nilai LQ 0,400, Transportasi dan Pergudangan dengan rata rata hasil nilai LQ 0,509, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan rata rata hasil nilai LQ 0,793, Informasi dan Komunikasi dengan rata rata hasil nilai LQ 0,561, Real Estate dengan rata rata hasil nilai LQ 0,892, Jasa Perusahaan dengan rata rata hasil nilai LQ 0,91.

Hasil Analisis *Shift Share* sektor lapangan Usaha antara daerah Kota Kotamobagu dengan Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2010 sampai dengan 2021, dimana Pergeseran Proporsional Sektor i di Kota Kotamobagu/Proporsional *Shift*, menunjukkan ke 17 (tujuh belas) Sektor Lapangan Usaha, semua bernilai positif, sehingga menunjukkan bahwa Semua Sektor Lapangan Usaha pertumbuhan sektornya relatif cepat.

Sektor lapangan usaha di Kota Kotamobagu yang memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing sektor yang lebih tinggi meliputi: Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan dengan nilai 301,4415, Konstruksi dengan nilai 48.814,71, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai 5207,886, Transportasi dan Pergudangan dengan nilai 7053,771, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai 9457,715, Informasi dan Komunikasi dengan nilai 3774,285, Jasa Pendidikan dengan nilai 340,35195, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan nilai 8221,404.

Sektor lapangan usaha di Kota Kotamobagu yang bernilai Negatif atau tidak memiliki keunggulan kompetitif meliputi : Pertambangan dan Penggalan dengan nilai (-13246,2), Industri Pengolahan dengan nilai (-6154,35), Pengadaan Listrik dan gas dengan nilai (-587.032),

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai (-288.333), Jasa Keuangan dan Asuransi dengan nilai (-18903.6), Real Estate dengan nilai (-596.205), Jasa Perusahaan dengan nilai (-150,664), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai (-33591,57), dan Jasa lainnya dengan nilai (-5,72446).

Pergeseran Struktur Ekonomi/ perubahan *variable* pada penyerapan PDRB sektoral di Kota Kotamobagu terhadap PDRB sektoral di Provinsi Sulawesi utara dari tahun 2010 sampai dengan 2021, dimana hasil dari ke 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha semuanya bernilai positif sehingga ini menunjukkan bahwa Pergeseran struktur ekonomi di Kota Kotamobagu memiliki nilai positif.

Berdasarkan Hasil Analisis Typologi Klassen dari ke 17 (tujuh belas) Sektor Lapangan Usaha terbagi dalam empat kuadran, yaitu:

- Kuadran I (sektor maju dan tumbuh pesat), dimana Pertumbuhan sektoral daerah Kota Kotamobagu Lebih besar sama dengan Pertumbuhan sektoral daerah Provinsi Sulawesi Utara (*Regional*), dan Kontribusi daerah Kota Kotamobagu lebih besar sama dengan kontribusi sektoral daerah Provinsi Sulawesi Utara (*Regional*);
- Kuadran II (sektor maju tapi tertekan), dimana Pertumbuhan sektoral daerah Kota Kotamobagu Lebih Kecil sama dengan Pertumbuhan sektoral daerah Provinsi Sulawesi Utara (*Regional*), dan Kontribusi daerah Kota Kotamobagu lebih besar sama dengan kontribusi sektoral daerah Provinsi Sulawesi Utara (*Regional*);
- Kuadran III (sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat), dimana Pertumbuhan sektoral daerah Kota Kotamobagu lebih besar sama dengan Pertumbuhan sektoral daerah Provinsi Sulawesi Utara (*Regional*), dan Kontribusi daerah Kota Kotamobagu lebih kecil dari kontribusi sektoral daerah Provinsi Sulawesi Utara (*Regional*); dan
- Kuadran IV (sektor relatif tertinggal), dimana Pertumbuhan sektoral daerah Kota Kotamobagu lebih kecil dari Pertumbuhan sektoral daerah Provinsi Sulawesi Utara (*Regional*), dan Kontribusi daerah Kota Kotamobagu lebih kecil dari kontribusi sektoral daerah Provinsi Sulawesi Utara (*Regional*).

Daerah Kota Kotamobagu memiliki sektor basis unggulan yang pertumbuhan sektornya relatif cepat dan juga memiliki daya saing yang tinggi yaitu : sektor jasa konstruksi dengan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, jasa pendidikan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dan perlu untuk menjadi perhatian bagi pemerintah yaitu sektor lapangan usaha yang masih tertinggal meliputi : Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Real Estate dan Jasa Perusahaan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian ini yaitu:

1. Perekonomian Kota Kotamobagu Memiliki sektor basis meliputi Pengadaan Listrik dan gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa lainnya. Dan Sektor non basis meliputi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Perusahaan.
2. Dengan adanya hasil analisis *shift share* yang menunjukkan nilai positif pada sektor lapangan usaha di Kota Kotamobagu, sehingga Sektor Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu dinyatakan dengan berkembang relatif cepat. Sektor lapangan usaha di Kota Kotamobagu yang memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing sektor yang lebih tinggi meliputi: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

3. Hasil Analisis *Typologi Klassen* menunjukkan sektor maju dan tumbuh pesat, meliputi: Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya. kemudian sektor relatif tertinggal meliputi, Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan, Real Estate dan Jasa Perusahaan.
4. Pergeseran Struktur Ekonomi/ perubahan variable pada penyerapan PDRB sektoral di Kota Kotamobagu terhadap PDRB sektoral di Provinsi Sulawesi utara dari tahun 2010 sampai dengan 2021, dimana hasil dari semua sektor lapangan usaha bernilai positif sehingga ini dapat menunjukkan bahwa Pergeseran struktur ekonomi di Kota Kotamobagu memiliki nilai positif.

Rekomendasi Kebijakan

- 1) Pemerintah Kota Kotamobagu agar dapat memperhatikan pengalokasian anggaran dalam rangka untuk optimalisasi pertumbuhan sektor unggulan yang akan berdampak pada peningkatan kontribusinya terhadap PDRB.
- 2) sektor jasa konstruksi dengan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, jasa pendidikan dan jasa kesehatan dan kegiatan social, sebagai sektor unggulan yang memiliki kontribusi cukup besar dalam perekonomian di daerah Kota Kotamobagu sehingga perlu untuk mendapatkan prioritas pengembangan sehingga memberikan dampak yang positif bagi peningkatan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat serta pengaruh pada lapangan pekerjaan.
- 3) Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu pemerintah wajib memprioritaskan ke Sembilan sektor basis yaitu Pengadaan Listrik dan gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa lainnya, yang tujuannya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Todaro, Michael. 2004.** Pembangunan ekonomi Dunia Ketiga, Erlangga: Jakarta
- Arsyad Lincoln, 1999.** Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Sambodo, M. T. 2002.** Analisis Sektor Unggulan Di Kalimantan Barat. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Sutiyo dan Maharjan K.L. 2017.** Decentralization and Rural Development in Indonesia, Singapore: Springer.
- Boediono, 1992,** Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi 1, Penerbit BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Djojohadikusumo Sumitro, 1994,** Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES.
- Kuncoro, Mudrajad, 1997.** Ekonomi Pembangunan, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Tarigan, Robinson, 2005.** Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sjafrizal. 2008.** Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, Jakarta : Baduouse Media.
- Todaro, Michael P Todaro. 2002.** *Pembangunan Ekonomi* (Kesembilan). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu.2021.** Produk Domestik Regional Bruto Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha 2017-2021.Kotamobagu. Badan Pusat Statistik.
- Sujarweni.V.W. 2019.** Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Widodo. 2017.** Metodologi Penelitian Populer & Praktis. Jakarta: Rajawali Pers.

- Widodo, Tri. 2006.** Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). UUP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Putra, M. F. 2011.** Studi Kebijakan Publik dan Pemerintahan dalam Perspektif Kuantitatif (Cetakan Pe). Universitas Brawijaya (UB) Press.
- Sjafrizal. 1997.** Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. Prisma, Maret 1997, hal 27-38. Yogyakarta: LP3ES.



DAMPAK PERTAMBANGAN BATUAN TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DISEKITAR KAWASAN PERTAMBANGAN (Desa Kobo Kecil dan Desa Bungko)

Hamka Dilapanga¹, Vecky A.J. Masinambow², George M.V. Kawung³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email : dilapangahamka84@gmail.com, vajmasinambow@unsrat.ac.id, georgekawung@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penambangan batuan merupakan salah satu tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk menggali atau memanfaatkan segala bentuk sumber daya alam batuan yang ada, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai dampak dan isu muncul akibat kegiatan pertambangan batuan ini, baik isu sosial ekonomi dan isu lingkungan hidup. Hal yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah dampak pertambangan batuan terhadap pendapatan dan dampak pertambangan batuan terhadap kualitas lingkungan. Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian dengan melakukan observasi, kuisioner sejumlah 60 (enam puluh) responden dan wawancara. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa penambangan batuan dapat menambah pendapatan masyarakat terutama penambang akan tetapi tambahan pendapatan tersebut hanya dapat digunakan untuk biaya hidup kesehariannya, juga pertambangan batuan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan. Jika pertambangan batuan mendapat perhatian khusus oleh pemerintah Kota Kotamobagu maka ini akan menjadi pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan pertambangan. Pemerintah Kota Kotamobagu dalam hal ini dinas lingkungan hidup harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batuan agar supaya kelestarian lingkungan sekitar pertambangan tetap terjaga.

Kata Kunci : Pertambangan Batuan, Pendapatan, Kualitas Lingkungan

ABSTRACT

Rock mining is one of the actions or activities aimed at excavating or utilizing all forms of existing rock natural resources, aiming to meet the needs of life. Various impacts and issues arise due to this rock mining activity, both socio-economic issues and environmental issues. The thing that will be raised in this writing is the impact of rock mining on income and the impact of rock mining on Environmental Quality. In this study used research methods by conducting observations, questionnaires of 60 (sixty) respondents and interviews. From the results of this study it was found that rock mining can increase the income of the community, especially miners, but the additional income can only be used for daily living expenses, rock mining also results in a decrease in Environmental Quality. If rock mining gets special attention by the Kotamobagu city government then this will be the original regional income from the mining sector and can improve the economy of the people around the mining area. Kotamobagu city government in this case the Department of environment must supervise the activities of rock mining so that environmental sustainability around mining is maintained.

KeyWord : Rock Mining, Income, Environmental Quality

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang begitu besar. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 ayat 3 telah diatur bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Isi ayat tersebut menjelaskan bahwa kekayaan alam di Indonesia sepenuhnya dikuasai oleh negara serta dikelola dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi sumber daya alam di Indonesia diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi rakyat melalui pola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang mengacu pada upaya-upaya konservasi sebagai landasan dari proses

tercapainya keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan dari sumber daya alam yang terbentang luas di Indonesia.

Aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia disekelilingnya baik untuk di konsumsi sendiri maupun untuk dijual. Keadaan lingkungan disekitar dapat berubah yang disebabkan tindakan manusia yang dilakukan kepada alam sekitar. Keadaan perubahan lingkungan sekitar dapat menyebabkan berubahnya aktivitas yang dilakukan masyarakat tersebut.

Pertambangan Batuan adalah salah satu mata pencaharian sebahagian kecil masyarakat Kota Kotamobagu. Dampak sosial ekonomi akibat pertambangan Batuan perlu pengkajian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap penambang dan bukan penambang terutama yang berada disekitar kawasan pertambangan, serta pengaruh terhadap pemerintah Kota Kotamobagu.

Pertanyaan yang sangat mendasar untuk penulis adalah apakah kegiatan pertambangan Batuan ini dapat dijadikan sebagai mata pencaharian tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari bahkan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang atau untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari saja tidak cukup terlebih untuk kebutuhan jangka panjang. Karena dilihat secara kasat mata terdapat perbedaan kehidupan sosial ekonomi diantara sesama pekerja penambang Batuan.

Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian adalah Desa Kobo Kecil dan Desa Bungko. Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur berbatasan dengan Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan yang dilintasi oleh sungai Ongkag Moayat terdapat banyak bahan Batuan berupa batu kali, dan batu pasangan pondasi, sedangkan di Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow juga dilintasi oleh sungai Ongkag Moayat adalah penghasil bahan Batuan berupa pasir, tras dan sirtu olehnya sebagian masyarakat kedua Desa tersebut memiliki mata pencaharian sebagai penambang. Desa kobo kecil oleh Sungai Ongkag Moayat berada pada bagian hulu sungai sedangkan Desa Bungko berada pada bagian hilir sungai Ongkag Moayat.

Sumber mata pencaharian masyarakat Desa Kobo Kecil dan Desa Bungko sebagian besar adalah petani dan lokasi pertambangan Batuan berbatasan langsung dengan lahan pertanian. Adapun jenis pertanian yang berdekatan dengan kawasan Batuan adalah kebun kelapa, jagung, cabe, kedelai dan tanaman tumpang sari lainnya.

Menindaklanjuti dengan adanya kegiatan usaha pertambangan Batuan ini perlu adanya penelitian secara ilmiah terhadap usaha pertambangan bahan Batuan, yang berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada disekitarnya.

Rumusan Masalah

Penambangan Batuan memiliki dampak positif dan negatif terhadap sosial ekonomi terutama masyarakat yang berada disekitar lokasi pertambangan yaitu di Desa Kobo Kecil dan di Desa Bungko. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana dampak pertambangan Batuan terhadap sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Batuan. Adapun hal yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa besar pengaruh pertambangan Batuan terhadap pendapatan masyarakat sekitar kawasan pertambangan;
2. Berapa banyak unit – unit usaha yang berkembang dari penambang.
3. Berapa besar pengaruh pertambangan Batuan terhadap kualitas lingkungan sekitar kawasan pertambangan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pertambangan Batuan terhadap sosial ekonomi masyarakat Desa Kobo Kecil dan Desa Bungko yang berada disekitar kawasan Batuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertambangan Batuan terhadap pendapatan masyarakat sekitar kawasan pertambangan;
2. Untuk mengetahui unit – unit usaha yang berkembang dari penambang;
3. Untuk mengetahui pengaruh pertambangan Batuan terhadap kualitas lingkungan hidup.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Informasi terhadap masyarakat pengaruh Pertambangan Batuan baik itu pengaruh sosial ekonomi, dan juga dampak terhadap kualitas lingkungan.
2. Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) kepada pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Informasi dasar kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dengan isu penelitian ini.

Pembatasan Masalah

1. Variabel yang dipilih : Masyarakat penambang dan masyarakat yang bukan penambang yang berada disekitar pertambangan.
2. Proksi data yang digunakan : Observasi minimal 30 (tiga puluh) responden masyarakat sekitar tambang Batuan.
3. Unit analisa yang ditetapkan : analisis pengaruh.

Tinjauan Pustaka**Landasan Teori**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah memberikan izin penambangan bahan-bahan galian. Salah satu bahan galian yang ditambang adalah bahan Batuan yang terdiri dari batu kali, kerikil, pasir, batu mangga, koral dan tanah urug. Penambangan bahan Batuan secara terencana akan meningkatkan pendapatan/penghasilan masyarakat yang diawali tersedianya lapangan pekerjaan.

Konsep teori pembangunan ekonomi daerah sangat tepat untuk salah satu sektor yang akan diakan dikaji yaitu di sektor pertambangan. Pembangunan ekonomi daerah merupakan serangkainya kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dan membentuk satu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan satu lapangan kerja yang baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat setempat. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah harus mampu membuat prediksi bersama – sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.

Penambangan batuan juga berdampak pada lingkungan yaitu bentang sungai yang semakin melebar dan dalam, longsor di sekitar tepi sungai, jalan desa yang mengalami kerusakan dan pencemaran udara. Olehnya pengaruh kegiatan pertambangan terhadap lingkungan juga menjadi pokok bahasan yang akan dieksplorasi secara mendalam pada penelitian ini.

Penelitian Terdahulu

Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Area Pertambangan Batu Granit Di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, Ridha Maulidyah¹, Eviliyanto², Dian Equanti³ (2022), tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi demografi daerah, kondisi sosila kemasyarakata, metode yang diambil analisis kuantitatif deskriptif, hasil adalah keberadaan pertambangan batu granit berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat akan tetapi berdampak negatif terhadap lingkungan.

Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten, Arief K. Saifulloh (2021) Universitas Muhamaddiyah, tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir, hasil adalah mengganggu resapan air, ekologi serta rawan longsor.

Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Pertambangan Pasir Di Desa Luragung Landeuh Kuningan, Jawa Barat, oleh Wina Winiarti, Muslihudin dan Sri Lestari, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses penambangan pasir dan mengetahui dampak negatif pertambangan pasir terhadap lingkungan, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, hasil penelitian adalah pertambangan pasir menyebabkan kerusakan lingkungan diantaranya kebisingan, sebaran debu dan kerusakan infrastruktur jalan.

Dampak Pertambangan Pertambangan Batuan Terhadap Lingkungan Alam Dan Sosial Budaya Masyarakat Desa Peringsari Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, I Wayan Sudarma (2012), tujuan penelitian adalah mengetahui dampak pertambangan batuan terhadap

lingkungan dan sosial budaya kemasyarakatan, metode yang digunakan adalah observasi lapangan wawancara dan kuisioner, hasil adalah penambangan sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan akan tetapi penambangan menambah pendapatan masyarakat.

Analisis Pengaruh Pertambangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dikabuoaten Ngawi, Ivan Ardianto (2020), tujuan penelitian adalah menganalisis peran pertambangan batuan terhadap kesejahteraan masyarakat, metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif di dukung dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitian bahwa pertambangan batuan berdampak positif pada pendapatan masyarakat akan tetapi berdampak negatif bagi kelestarian lingkungan.

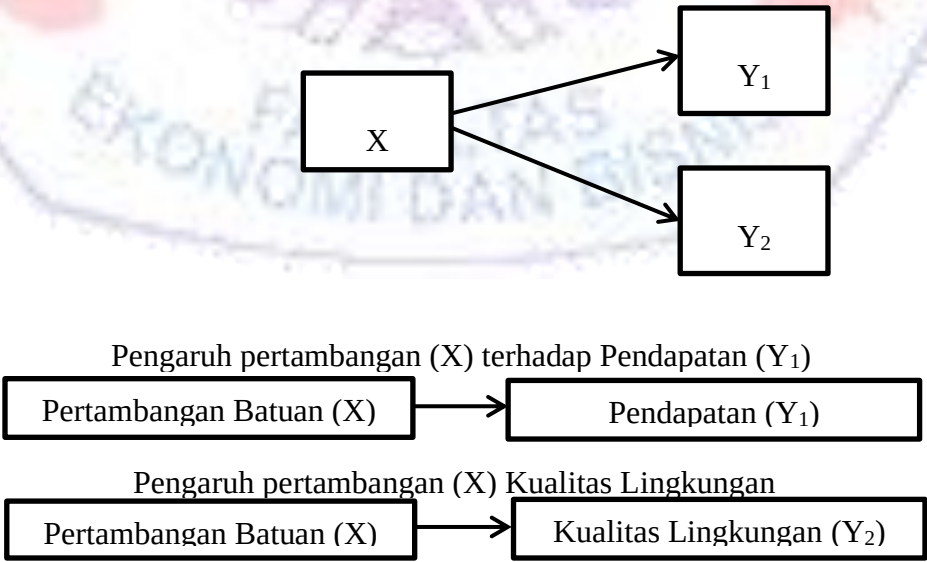
Dampak Penambangan Pertambangan batuan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Dan Lingkungan Di Desa Tuwuna Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat, Putra Sareoli Zebua (2021), penelitian ini bertujuan mengetahui dampak dari penambangan batuan terhadap sosial ekonomi masyarakat, metode yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil yang diperoleh adalah penambangan batuan berdampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatnya pendapatan dan terbukanya.

Pengaruh Tambang Bahan Batuan Terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang, M. Risal (2015), tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh pertambangan batuan yang dilakuakn oleh PT. Usaha Pulibu terhadap pendapatan per kapita masyarakat Kecamatan Cendana, metode penelitian yaitu wawancara, observasi, angket, dokumentasi serta angket buku, hasil penelitian yang diperoleh terdapat pengaruh yang signifikan dan searah adanya galian tambang yang dilakukan oleh PT. Usaha Pulibu.

Dampak Pengelolaan Batuan Terhadap Kehidupan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Di Desa Tibubiu Kecamatan Karambitan Kabupaten Tabanan, Putu Agung Wijaksana (2018), tujuan penelitian adalah mengetahui seberapa besar pengaruh pertambangan batuan terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Tibubiu Kecamatan Krambitan, metode analisis yang di gunakan adalah analisa deskriptif dengan observasi lapangan, hasil yang di dapat adalah pengelolaan batuan di Desa Tibubiu berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Kerangka Konseptual

Faktor penyebab atau pediktor adalah pertambangan batuan Pendapatan dilambangkan dengan dilambangkan (X), sedangkan variabel akibat adalah (Y₁) dan Kualitas Lingkungan (Y₂). Berikut adalah kerangka konseptual atau struktur teori yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan.



- Ket:
- X = Pertambangan Batuan
 - Y₁ = Pendapatan
 - Y₂ = Penurunan Kualitas Lingkungan

Hipotesis

Diduga dapat menambah pendapatan masyarakat Desa Kobo Kecil dan Desa Bungko terutama penambang yang berada disekitar lokasi pertambangan, juga dari sisi lingkungan hidup pertambangan batuan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN**Data dan Sumber Data**

Lokasi penelitian ditetapkan pada Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur dan Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan. Desa Kobo Kecil yang terletak di hulu sungai Moayat mengandung bahan batuan batu kali sedangkan Desa Bungko terletak di hilir sungai mengandung bahan Pasir, tras dan sirtu.

Waktu penelitian akan dilakukan selama ± 30 (tiga puluh) hari terbagi : 30 (tiga puluh) hari observasi lapangan 10 (sepuluh) hari di Desa Kobo Kecil dan 10 (sepuluh) di Desa Bungko, sedangkan 10 (sepuluh) hari adalah analisis data.

METODE PENGUMPULAN DATA

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

- Observasi

Pengumpulan data akan dilakukan dengan observasi langsung ke lokasi penelitian dengan meninjau langsung lokasi kegiatan penambangan bahan Batuan di Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur dan di Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan.

- Kuisisioner

Kuisisioner adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan membagikan lembaran kuisisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian (Santosa dan Ashari, 2004). Untuk memudahkan perolehan data, selanjutnya kuisisioner atau angket disebarkan kepada responden untuk mengetahui tentang dampak penambangan bahan Batuan terhadap sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan di Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur dan di Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan. Penyebaran kuisisioner akan dilakukan secara langsung kepada responden dengan menentukan secara langsung responden yang akan diteliti.

- Wawancara

Selain observasi dan kuisisioner, dilakukan wawancara mendalam (depth interview) yang dilakukan dengan cara diskusi dengan nara sumber baik dari masyarakat Desa Kobo Kecil dan Desa Bungko.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagian besar didapatkan dari pemerintah Desa Kobo Kecil dan Desa Bungko.

Populasi dan Sampel

Kegiatan penambangan Batuan di Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur pada awalnya adalah penambangan non komersil atau digunakan sendiri untuk pembangunan. Setelah dibukanya akses jalan perkebunan oleh pemerintah, pertambangan Batuan pun ikut merasakan dampak positif dari akses jalan perkebunan tersebut. Dampak tersebut dimanfaatkan oleh beberapa pemilik lahan perkebunan untuk mengkomersilkan bahan Batuan di Sungai Ongkag Moayat (batu dan kerikil), kemudian berkembang ke beberapa pemilik lahan lainnya yang berbatasan langsung dengan sungai Ongkag Moayat untuk melakukan penambangan Batuan.

Desa Kobo Kecil berada di Kecamatan Kotamobagu Timur dengan luas wilayah 1,81 km² dan jumlah penduduk 3063 jiwa terdiri dari 1048 kepala keluarga.

Desa Bungko berada di Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan luas wilayah 3,07 km² dan jumlah penduduk 1672 jiwa terdiri dari 524 kepala keluarga (*daftar isian tingkat perkembangan desa dan keluarahan Desa Bungko tahun 2021*).

Lokasi penelitian ditetapkan pada Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur dan Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan. Desa Kobo Kecil yang terletak di hulu sungai Moayat mengandung bahan batuan batu kali sedangkan Desa Bungko terletak di hilir sungai mengandung bahan Pasir, tras dan sirtu.

DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

Operasional dan pengukuran variabel adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. Definisi operasional variabel ditemukan item – item yang dituangkan dalam instrumen penelitian (sigiarto, 2016:38).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertambangan Batuan terhadap pendapatan masyarakat sekitar kawasan pertambangan diuji dengan memberikan penilaian berdasarkan kuesioner yang dibagikan pada responden, sebanyak 5 (lima) pertanyaan yang setiap pertanyaan dilengkapi dengan 5 (lima) jawaban. Jawaban “Sangat Setuju” bernilai 5, jawaban “Setuju” bernilai 4, jawaban “Cukup Setuju” bernilai 3 dan jawaban “Tidak Setuju” bernilai 2, jawaban “Sangat Tidak Setuju” bernilai 1. Maka untuk setiap responden akan memperoleh nilai maksimum 5 x 5 = 25 dan nilai minimum 1 x 5 = 5. Kriteria penilaian untuk menentukan kategori jawaban dampak penambangan Batuan terhadap sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Kriteria penilaian untuk menentukan kategori jawaban dampak penambangan Batuan terhadap sosial ekonomi masyarakat

No	Kriteria Penelitian	Skor	Nilai
1	Sangat	21 – 25	5
2	Setuju	16 – 20	4
3	Cukup Tidak Setuju	11 – 15	3
4	Tidak setuju	06 – 10	2
5	Sangat Tidak Setuju	01 – 05	1

Metode Analisa

Analisis data dilakukan dengan mengukur pengaruh variabel independen terhadap dependen, dengan menggunakan analisi Regresi Linier Sederhana. Regresi linear sederhana adalah merode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan (X) atau disebut juga dengan prediktor sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan (Y) atau disebut juga dengan response. Persamaannya dari regresi linear adalah sebagai berikut :

$$Y = f (X_1, X_2)$$
$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Y = Variabel Kriterium (Independen)
X = Variabel Prediktor (dependen)

$$Y = ax + b$$
$$a = \frac{\sum Y(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$B = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

β_0 dan β_1 merupakan parameter
Model matematis Y atas X sampel

$$Y = b_0 + b_1 X + e$$

b_0 merupakan estimator untuk β_0
 b_1 merupakan estimator untuk β_1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Secara statistik dijelaskan bahwa ukuran sampel yang semakin besar diharapkan akan memberikan hasil yang semakin baik. Dengan sampel yang semakin besar, mean standar deviasi yang diperoleh mempunyai probabilitas yang semakin tinggi untuk menyerupai mean dan standar deviasi populasi. Hal ini karena jumlah sampel ada kaitannya dengan pengujian hipotesis statistika. Meskipun sampel yang besar akan semakin baik.

Membahas masalah ukuran sampel, maka dapat dikemukakan sebuah teorema tentang variabel tunggal atau univariat, yaitu teorema limit sentral, yang menyatakan statistik rata – rata mempunyai distribusi normal untuk ukuran sampel yang mendekati tak berhingga. Akan tetapi dalam praktek, teorema limit sentral telah dapat diterapkan untuk ukuran sampel minimal 30. Bahkan dinyatakan dalam ukuran sampel lebih besar dari 20, distribusi normal telah dapat di pakai untuk mendekati distribusi binomial (Agung, 2006 : 83).

1. Karateristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keadaan penduduk yang menjadi responden berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Kobo Kecil dan Desa Bungko dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persen (%)
1.	Tidak Sekolah	0	0
2.	SD	37	61,7
3.	SMP	12	20
4.	SMA	10	16,7
5.	Diploma /Strata 1	1	1,6
Jumlah		60	100

Sumber data : observasi lapangan diperoleh dari kuisisioner dan wawancara

Persentase terbanyak adalah responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 61,6 %, persentase kedua terbanyak adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 20 %, persentase ketiga terbanyak adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 16,6 %. Keadaan ini selaras dengan dominasi pekerjaan utama responden yang umumnya sebagai penambang dan petani, yaitu jenis pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan tinggi.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah dan karakteristik penduduk menurut umur mempunyai pengaruh yang penting terhadap tingkah laku demografis maupun sosial ekonomi. Secara demografis jumlah penduduk menentukan seberapa besar potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk. Secara ekonomi, komposisi penduduk dengan usia kerja (usia produktif) menentukan produktivitas dalam menghasilkan barang dan jasa. Keadaan penduduk yang menjadi responden berdasarkan kelompok umur 20 tahun sampai lebih dari 50 tahun di Desa Kobo Kecil dan Desa Bungko.

Tabel 3			
Responden Berdasarkan Kelompok Umur			
No	Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persen (%)
1.	< 20	0	0
2.	21 – 30	9	15
3.	31 – 40	28	46,7
4.	41 – 50	18	30
5.	> 51	5	8,3
Jumlah		60	100

Sumber data : observasi lapangan diperoleh dari kuisisioner dan wawancara

Berdasarkan hasil tabulasi kuisisioner secara keseluruhan di Desa Kobo Kecil dan Desa Bungko diketahui bahwa kelompok umur yang dominan adalah 31 – 40 tahun sebanyak 28 orang (46,7 %), disusul dengan kelompok umur 41 – 50 tahun sebanyak 18 orang (30 %). Keadaan ini menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini kebanyakan adalah masyarakat yang memiliki pengalaman serta memiliki tingkat pertimbangan yang lebih tinggi. Selanjutnya responden dengan umur > 51 sebanyak 5 orang (8,3 %), selain memiliki pengalaman serta tingkat pertimbangan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Responden seperti ini dianggap sangat dibutuhkan karena dianggap sebagai tetua penambang. Perbedaan umur yang beragam responden yang beragam dalam penelitian ini menunjukkan bahwa responden dapat sebagai bentuk keterwakilan seluruh golongan umur masyarakat dengan berbagai tingkatan, dan kemampuan analisis yang berbeda – beda.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bermukim

Karakteristik responden berdasarkan lama bermukim di Desa Kobo Kecil dan Desa Bungko terdiri dari lama bermukim kurang dari 3 tahun sampai lebih dari 15 tahun.

Tabel 4			
Responden Berdasarkan Lama Bermukim			
No	Lama Bemukim (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persen (%)
1.	< 3	0	0
2.	3 – 7	0	0
3.	8 – 11	3	5
4.	12 – 15	5	8,3
5.	> 15	52	86,7
Jumlah		60	100

Sumber data diperoleh dari kuisisioner dan wawancara

Komposisi responden tertinggi berdasarkan lama bermukim adalah > 15 tahun sebanyak 52 orang (86,7 %). Responden yang telah lama bermukim di daerah penelitian selama lebih dari 15 tahun sebagian besar mengatakan mereka lahir dan mencari nafkah di daerah tersebut.

Karakteristik responden terendah berdasarkan lama bermukim 8 – 11 tahun sebanyak 3 orang (5 %). Responden ini adalah masyarakat pendatang.

4. Karakteristik Reponden Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan sebagai berikut :

Tabel 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persen (%)
1.	Petani	7	11,67
2.	Petani/Penambang	25	41,7
3.	Penambang	14	23,3
4.	Buruh	6	10
5.	Pedagang	4	6,7
6.	Lain – lain	3	5
Jumlah		60	98,37

Sumber data : observasi lapangan diperoleh dari kuisisioner dan wawancara

Berdasarkan hasil tabulasi kuisisioner secara keseluruhan di Desa Kobo Kecil dan Desa Bungko, karakteristik responden tertinggi adalah penambang dengan jumlah 39 oang (65 %). Sementara jenis pekerjaan dengan karakteristik terendah adalah pekerjaan lain – lain dalam hal ini responden pensiunan.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh kesimpulan bahwa responden telah mewakili masyarakat dengan berbagai jenis pekerjaan di daerah penelitian.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendapatan setiap bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

No	Pendapatan (rupiah)	Jumlah (Orang)	Persen (%)
1.	1.000.000 – 1.500.000	7	11,7
2.	1.600.000 – 2.000.000	13	21,7
3.	2.100.000 – 2.500.000	28	46,7
4.	> 2.500.000	12	20
Jumlah		60	100

Sumber data : observasi lapangan diperoleh dari kuisisioner dan wawancara

Berdasarkan hasil tabulasi kuisisioner secara keseluruhan di Desa Kobo Kecil dan Desa Bungko, di ketahui bahwa pendapatan dominan responden adalah 2.100.000 – 2.500.000 yaitu sebanyak 28 orang (46,7 %). Adadun pendapatan terkecil sebesar 1.000.000 – 1.500.000 sebanyak 7 orang (11,7 %). Dari hasil tabulasi dan berdasarkan pengamatan diketahui bahwa pekerjaan ke 7 orang tersebut adalah petani dengan karakteristik umurdi atas 50 tahun menyebabkan produktivitas dalam bekerja menjadi berkurang dan petani yang menggarap lahan bukan milik sendiri sehingga hasil yang didapat akan berbagi sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan, sehingga hasil yang di dapat tidak seutuhnya.

Jumlah pengangkutan bahan batuan dari lokasi pengangkutan berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dilokasi kegiatan.

Tabel 7			
Jumlah Pengangkutan Bahan batuan			
No	Hari	Kubikasi (M ³)	Persen (%)
1.	Senin	66	146,7
2.	Selasa	66	146,7
3.	Rabu	66	146,7
4.	Kamis	66	146,7
5.	Jumat	15	33,3
6.	Sabtu	21	46,7
7.	Minggu	15	33,3
Jumlah		315	701%

Sumber data : observasi lapangan diperoleh dari kuisisioner dan wawancara

Dari hasil pengamatan sebanyak, sebanyak 105 dump truck/ dalam seminggu setara dengan 45 M³/hari, 315 M³/minggu, 1.350 M³/bulan dan 16.200 M³/tahun. Kapasitas angkutan batuan dalam 1 dump truck adalah 3 M³ dan rata – rata 15 dump truck dalam satu hari.

Bahan batuan yang paling banyak ditambang sesuai urutan yaitu sirtu, pasir halus, batu dan kerikil. Bahan galian ini pada umumnya digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan (rumah atau gedung), pembangunan jalan dan lain – lain.

Pengamatan dilakukan dari tanggal 6 November s/d 20 November 2022. Dari hasil pengamatan dilokasi kegiatan dapat dilihat bahwa aktivitas pengangkutan bahan gali C dari areal pertambangan sedang mengalami peningkatan permintaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden permintaan batuan sangat tinggi mulai dari pertengahan tahun sampai akhir tahun.

Tabel 8		
Volume Bahan batuan yang di Keruk		
NO	Waktu	Volume (M ³)
1.	Perhari	45
2.	Perminggu	315
3.	Perbulan	1.350
4.	Pertahun	16.200

Sumber data : observasi lapangan diperoleh dari kuisisioner dan wawancara

Hasil Analisis

- Hasil Penelitian

Regression

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Keberadaan Pertambangan ^b		Enter

a. Dependent Variable: Ekonomi

c. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.980 ^a	.961	.960	.20221

a. Predictors: (Constant), Keberadaan Pertambangan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	57.902	1	57.902	1416.072	.000 ^b
	Residual	2.372	58	.041		
	Total	60.274	59			

a. Dependent Variable: Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Keberadaan Pertambangan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.322	.095		-3.395	.001
	Keberadaan Pertambangan	.324	.009	.980	37.631	.000

a. Dependent Variable: Ekonomi

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Keberadaan Pertambangan ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Lingkungan

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.874 ^a	.763	.759	.33377

a. Predictors: (Constant), Keberadaan Pertambangan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.853	1	20.853	187.183	.000 ^b
	Residual	6.461	58	.111		
	Total	27.314	59			

a. Dependent Variable: Lingkungan

b. Predictors: (Constant), Keberadaan Pertambangan

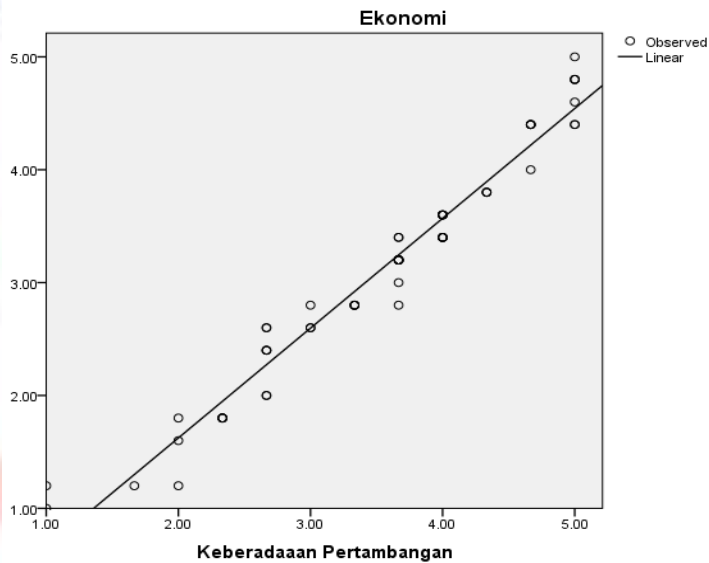
Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.650	.157		4.153
	Keberadaan Pertambangan	.195	.014	.874	13.681

a. Dependent Variable: Lingkungan

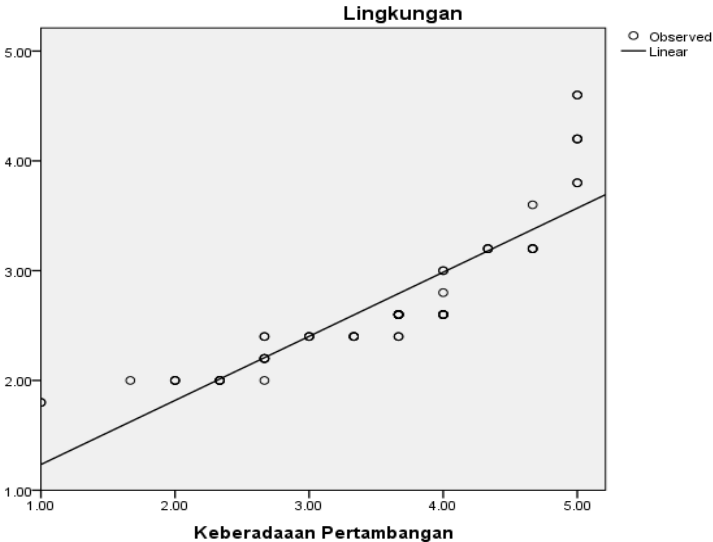
Berdasarkan analisa dengan menggunakan SPSS maka, uji untuk mengetahui apakah variabel pendapatan (X_1) dan Lingkungan (X_2) secara parsial berpengaruh terhadap variabel pertambangan (Y). Adapun hipotesis yang akan kita ajukan dalam penelitian ini adalah H1 atau hipotesisi pertama, ada pengaruh pendapatan (X_1) terhadap pertambangan (Y), H2 atau hipotesis kedua, ada pengaruh lingkungan (X_2) terhadap pertambangan (Y).

Nilai signifikan (sig) yang didapat adalah H1 nilai signifikan (sig) 0,00 atau < probabilitas 0,05 maka ada pengaruh pendapatan (X_1) terhadap pertambangan (Y) untuk H2 nilai signifikan (sig) 0,00 atau < probabilitas 0,05 maka ada pengaruh lingkungan (X_2) terhadap pertambangan (Y).

Gambar 1 Grafik pengaruh pertambangan terhadap ekonomi



Gambar 2 grafik pengaruh pertambangan terhadap lingkungan



Grafik observasi pengaruh pertambangan terhadap ekonomi pula terlihat bahwa keberadaan pertambangan batuan berpengaruh terhadap pendapatan dan pada penurunan kualitas lingkungan. Seperti pula yang terlihat pada grafik diatas bahwa pertambangan dapat meningkatkan pendapatan terlihat bahwa titik tertinggi mendekati angka 5 atau sangat setuju, sedangkan poin terendah adalah sangat tidak setuju, ini disebabkan oleh ada beberapa responden yang sangat tidak setuju dengan kuisioner bahwa kegiatan pertambangan dapat membuka peluang usaha lainnya dan hasil menambang sebagian dapat di tabung. Pengaruh pertambangan terhadap lingkungan juga terlihat pada grafik diatas bahwa poin tertinggi mendekati angka 4 yaitu setuju bahwa pertambangan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, sedangkan poin terendah yaitu mendekati poin 1 yaitu sangat setuju. Hal ini disebabkan ada beberapa responden yang tidak setuju bahwa pertambangan batuan dapat menyebabkan longsor.

Pembahasan

Pertambangan batuan memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat terutama bagi penambang. Hasil dari penambangan batuan dapat memenuhi kebutuhan dalam 1 bulan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan responden bahwa berkurangnya masyarakat yang membeli kebutuhan pokok dengan menghutang di warung – warung. Akan tetapi sebagian besar penambang, pendapatan dari pertambangan belum dapat disimpan sebagai tabungan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan selain dari kebutuhan pokok, seperti biaya sekolah anak dan kehidupan sosial bermasyarakat. Demikian halnya dengan Pertambangan batuan belum dapat menambah usaha baik disekitar kawasan maupun dari pekerja tambang, hal ini disebabkan oleh modal yang masih kurang untuk membuka usaha dan juga belum ada yang berani membuka usaha seperti warung di lokasi pertambangan. Pengangguran berkurang dengan kegiatan pertambangan, terlihat juga pada berkurangnya tingkat kekerasan (premanisme kampung) yang sering mabuk – mabukan.

Dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pertambangan batuan ini adalah menyebabkan aliran sungai Moayat semakin melebar dan semakin dalam, juga dapat menyebabkan longsor. Akan tetapi sesuai dengan hasil pengamatan dan wawancara dengan responden demikian juga dengan analisis data bahwa, penambangan batuan kurang atau kecil terjadi longsor. Sejauh ini belum pernah terjadi longsor yang berakibat buruk maupun fatal bagi lingkungan sekitar. Hal ini diakibatkan oleh cara pengambilan material batuan yang direncanakan dan ditata sedemikian agar supaya pekerjaan penambangan dapat meminimalisir longsor.

Desa Bungko jalan menuju lokasi pertambangan tidak melewati area pemukiman penduduk olehnya tidak ada permasalahan terkait rusaknya jalan desa yang mengakibatkan sebaran debu pada musim kemarau dan lumpur pada musim penghujan dikarenakan pertambangan, sedangkan di Desa Kobo Kecil jalan menuju lokasi pertambangan melewati kawasan pemukiman, akan tetapi warga tidak mengeluh akibat debu dan lumpur karena jalan desa di aspal dengan Hotmix. Masyarakat mengeluhkan Desa Kobo Kecil terganggu dengan kebisingan kendaraan olehnya dilarang kendaraan pengangkut menggunakan knalpot racing dan laju kendaraan dibatasi jika melewati pemukiman penduduk.

Analisis Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dalam bentuk peraturan daerah terkait dengan kegiatan pertambangan saat ini sudah selesai pada pembahasan tahap satu di DPRD Kota Kotamobagu yaitu revisi RTRW Kota Kotamobagu tahun 2014 – 2034 terkait dengan penetapan wilayah pertambangan batuan. Olehnya izin lingkungan terkait dengan batuan belum ada yang di rekomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu. Hal ini juga sesuai dengan wawancara dengan responden yaitu pemilik lahan, bahwa sampai saat ini juga kegiatan pertambangan batuan milik bersangkutan belum dapat mengurus izin dikarenakan peraturan daerah terkait dengan revisi RTRW Kota Kotamobagu belum ada.

Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi keberlangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Karena kehidupan di muka bumi akan berlangsung secara wajar jika lingkungan fisik tetap terjaga keseimbangannya. Kerusakan lingkungan fisik akan mengakibatkan banyak bencana yang dapat mengancam keselamatan manusia seperti banjir, tanah longsor, perubahan musim yang tidak teratur dan munculnya berbagai penyakit. Menurut

Najib dan Junaedi (2009), untuk menangani permasalahan yang banyak muncul sebagai dampak dari kegiatan penambangan bahan batuan, perlu segera dilakukan kebijakan dalam membangun dasar – dasar yang kuat untuk menyusun regulasi yang efektif dan aplikatif serta mampu mewujudkan keseimbangan optimal antara ekonomi, sosial dan lingkungan fisik dari kegiatan batuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Jika pertambangan batuan telah mendapatkan izin pertambangan maka perputaran perekonomian di Kota Kotamobagu akan meningkat dari sektor pertambangan terlebih khusus masyarakat sekitar kawasan pertambangan.

Sumber daya alam di Kota Kotamobagu terutama batuan sangat banyak, hal ini dikarenakan Kota Kotamobagu dilintasi oleh 9 (sembilan) sungai dengan sungai terpanjang dan lebar adalah Ongkag Moayat olehnya sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Saran

1. Pertambangan batuan harus mendapat perhatian dari pemerintah Kota Kotamobagu terutama dari segi perizinan. Banyaknya sumberdaya alam berupa batuan yang ada di Kota Kotamobagu terutama di Sungai Ongkag Moayat tidak dapat dikelola dikarenakan tidak memiliki izin pertambangan, dan jika apabila izin pertambangan batuan ini diurus memakan waktu dan biaya yang mahal.
2. Dilihat dari segi pendapatan masyarakat, pertambangan batuan dapat menambah pendapatan bagi penambang dan masyarakat sekitar akan tetapi tambahan pendapatan tersebut hanya dapat digunakan untuk biaya hidup kesehariannya. Olehnya untuk meningkatkan pendapatan dari penambang maka pemerintah dapat memberikan bantuan pinjaman modal untuk dapat membuat usaha baik di rumah maupun di sekitar lokasi pertambangan.
3. Pertambangan batuan di Desa Kobo Kecil dan Bungko belum signifikan terhadap penurunan kualitas lingkungan, hal ini harus dipertahankan dengan pengawasan pemerintah Kota Kotamobagu lewat instansi/dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung (2006 : 83)** : Teorema Limit Sentral Telah Dapat Diterapkan Untuk Ukuran Sampel Minimal 30. Bahkan Dinyatakan Dalam Ukuran Sampel Lebih Besar Dari 20, Distribusi Normal Telah Dapat Di Pakai Untuk Mendekati Distribusi Binomial;
- Arief K. Saifulloh (2021)**, Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi Di Klaten; Universitas Muhamaddiyah
- Ivan Ardianto S421508009** Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2013 : Analisis Pengaruh Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Ngawi;
- I Wayan Sudarma (2012)** : Dampak Galian C Terhadap Lingkungan Alam Dan Sosial Budaya Masyarakat Desa Peringsari Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem;
- M. Risal** Universitas Muhamadiyah Makassar (2015) Pengaruh Tambang Bahan Batuan Terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang;
- Najib Dan Junaedi (2009)** : Untuk Menangani Permasalahan Yang Banyak Muncul Sebagai Dampak Dari Kegiatan Penambangan Bahan Batuan, Perlu Segera Dilakukan Kebijakan Dalam Menbangun Dasar – Dasar Yang Kuat Untuk Menyusun Regulasi Yang Efektif Dan Aplikatif Serta Mampu Mewujudkan Keseimbangan Optimal Antara Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan Fisik Dari Kegiatan Batuan;
- Putu Agung Wijaksana (2018)** : Dampak Pengelolaan Batuan Terhadap Kehidupan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Di Desa Tibubiu Kecamatan Karambitan Kabupaten Tabanan; Jurnal Kewarganegaraan Undiksha

- Putra Saroeli Zebua** 147004011/Psl Tesis : Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Dan Lingkungan Di Desa Tuwuna Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat;
- Ridha Maulidyah, Eviliyanto, Dian Equanti (2021)**, Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Area Pertambangan Batu Granit Di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, *Geo Khatulistiwa*, Vol 1 No 1, Hal 1-6;
- Santosa Dan Ashari (2004)** : Kuisioner Adalah Cara Untuk Mendapatkan Informasi Dengan Membagikan Lembaran Kuesioner Yang Berisi Pertanyaan-Pertanyaan Yang Berhubungan Dengan Penelitian;
- Sigiarto (2016:38)** : Definisi Operasional Variabel Ditemukan Item – Item Yang Dituangkan Dalam Instrumen Penelitian;
- Wina Winiarti, Muslihudin Dan Sri Lestari, (2020)**, Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Pertambangan Pasir Di Desa Luragung Landeuh Kuningan, Jawa Barat; Universitas Jenderal Soedirman



OPTIMALISASI PEMANFAATAN BMD SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN DAERAH

Dean Salomo Kumenaung, Arvan Carlo Djohansjah

Dosen Stei Rawamangun Jakarta dan Widyaiswara Ahli Madya pada BDK Manado,
BPPK Kementerian Keuangan

Email: salomodean@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid 19 merupakan “bencana” dunia yang telah merusak sendi-sendi perekonomian negara dan masyarakat di seantero dunia.

Pembangunan ekonomi negara wajib menjaga momentum pertumbuhan demi menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) merupakan salah satu daerah yang dinilai mampu melewati masa sulit paska pandemi covid 19.

SULUT mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 5% selama 2020-2022. Selain itu mampu meredam inflasi dengan belanja negara (Daerah), sehingga belanja daerah berperang sebagai *shock absorber* meredam dampak inflasi. Meningkatnya belanja daerah membutuhkan sumber penerimaan, termasuk dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga telah diatur dalam PP No. 22 Tahun 2020; sehingga kerja sama dimaksud diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai.

Kata Kunci : Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Penerimaan Daerah

ABSTRACT

The Covid 19 pandemic is a world "disaster" that has damaged the joints of the economies of countries and people around the world.

The country's economic development is obliged to maintain the momentum of growth in order to ensure the welfare of its people.

North Sulawesi Province (North Sulawesi) is one of the areas considered capable of going through difficult times after the Covid-19 pandemic.

North Sulawesi is able to maintain economic growth above 5% during 2020-2022. Apart from that, it is able to reduce inflation with state (regional) spending, so that regional spending acts as a shock absorber to reduce the impact of inflation. Increased regional spending requires a source of revenue, including from the utilization of Regional Property (BMD). Regional cooperation with other regions and regional cooperation with third parties have been regulated in PP no. 22 of 2020; so that the intended cooperation is expected to be one of the sources of local revenue that has.

Key Word : Utilization of Regional Property, Regional Revenue

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia era 2020 an telah merubah struktur penerimaan negara dan daerah dalam membiayai program pembangunan ekonomi di seantero Negara-Negara di dunia. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mampu merestruktur sektor-sektor ekonomi, termasuk sektor perdagangan. PPKM bahkan ”mematikan” model perdagangan dan model bisnis konvensional, menjadi model perdagangan dan model bisnis dengan

pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pemanfaatan media sosial dalam transaksi. Dampak dari pemberlakuan PPKM antara lain menyebabkan, turunnya kinerja sektoral perekonomian negara dan perekonomian daerah. Kondisi ini terlihat dari menurunnya indikator makro ekonomi antara lain; Meningkatnya angka inflasi, bertambahnya angka pengangguran, naiknya angka kemiskinan dan menurun drastis laju pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara-negara di dunia.

Bencana pandemi covid 19 juga berdampak pada krisis energi, ancaman krisis pangan dunia, inflasi yang tinggi, naiknya angka pengangguran, serta kelesuan ekonomi dunia. Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia, termasuk daerah-daerah maka berbagai upaya kebijakan negara, dilakukan mempertahankan dan mendorong pemulihan ekonomi.

PENDEKATAN PEMBANGUNAN

Mengacu pada logika teoritis, ada dua pendekatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Negara dan Daerah. Pertama, Secara regional perlu ditata konektivitas antar Lembaga Negara dan Institusi bisnis agar tercapai efisiensi dan efektivitas bisnis. Ketika terjadi efisiensi “Biaya” bisnis, akan meningkatkan Profit. Perolehan profit di sektor bisnis akan menambah pendapatan negara (Daerah) melalui pajak dan retribusi.

Kedua, Pendekatan Sektoral, dimana sektor-sektor ekonomi utama pembentuk Produk Domestik Bruto / Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB), didorong dan difasilitasi agar mencapai tingkat pertumbuhan optimal. Pertumbuhan ekonomi identik dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui kementerian keuangan dalam menjaga stabilitas makro ekonomi adalah mempertahankan belanja negara, memperkuat daya beli masyarakat melalui pemberian Bayar Langsung Tunai (BLT) ternyata mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan yang memadai. Sejak 2020-2022, upaya Pemerintah dalam memulihkan ekonomi Nasional dilakukan dengan berbagai kebijakan, misalnya restrukturisasi kredit, pembebasan pajak bagi beberapa sektor, mendorong dan memfasilitasi UMKM, mendorong dan memfasilitasi sektor Pertanian Pangan lokal untuk substitusi Impor Pangan, mendorong sektor Pariwisata Daerah dan upaya pemanfaatan Barang Milik Negara / Daerah. Dalam proses pembangunan fungsi negara antara lain menjamin stabilitas ekonomi nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil. Fungsi lainnya berkaitan dengan distribusi pendapatan adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa publik. Pengadaan barang dan jasa publik dalam kategori Social Overhead Capital (SOC) tidak dapat diproduksi oleh pihak swasta. Barang dimaksud seperti jembatan, jalan raya, air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas keamanan serta ketertiban negara. Belanja publik dibiayai oleh anggaran negara bersumber dari APBN dan APBD melalui pajak dan retribusi. Pengertian barang publik yaitu sekali diproduksi dapat digunakan oleh masyarakat luas secara berulang tanpa pembayaran langsung (kontra prestasi).

DANA PEMBANGUNAN

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, pembagian dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan dilaksanakan dengan melihat pada sumber pendapatannya sebagai berikut:

a. Penerimaan Dari Pajak Dana Kukan Pajak

Penerimaan atau pendapatan daerah yang berasal dari pajak hanya diperoleh dari pajak bumi dan bangunan serta pungutan atau bea yang dibayar dalam perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Dana Alokasi Umum

Sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah berasal dari dana alokasi yang berasal dari pemerintah pusat yang dulunya disebut sebagai dana subsidi atau ganjaran. Dana ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan. Dana alokasi ini dibedakan menjadi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum yang dibagikan kepada daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin dalam APBN. Dana ini dialokasikan 10% untuk Provinsi dan 90% untuk Kabupaten Kota.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus juga berasal dari APBN dan dialokasikan ke Kabupaten/Kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersediannya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Sebagai contoh dari kebutuhan khusus ini adalah kebutuhan di kawasan transmigrasi yang tidak sama dengan kebutuhan di daerah lain, pembangunan jalan di kawasan terpencil, pembangunan saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer. Kebutuhan yang merupakan prioritas nasional contohnya adalah proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan juga proyek-proyek yang dibiayai oleh donor baik nasional maupun internasional. Disamping itu terdapat jenis dana lain seperti dana reboisasi yang dibagi dengan perimbangan 60% untuk pemerintah pusat dan 40 % untuk pemerintah daerah penghasil dana reboisasi tersebut. Dana ini digunakan khusus untuk membiayai program reboisasi dan penghijauan di daerah. Ditegaskan pula bahwa untuk dana alokasi khusus ini harus ada dana pendamping yang berasal dari APBD guna menyatakan komitmen dan tanggung jawab dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

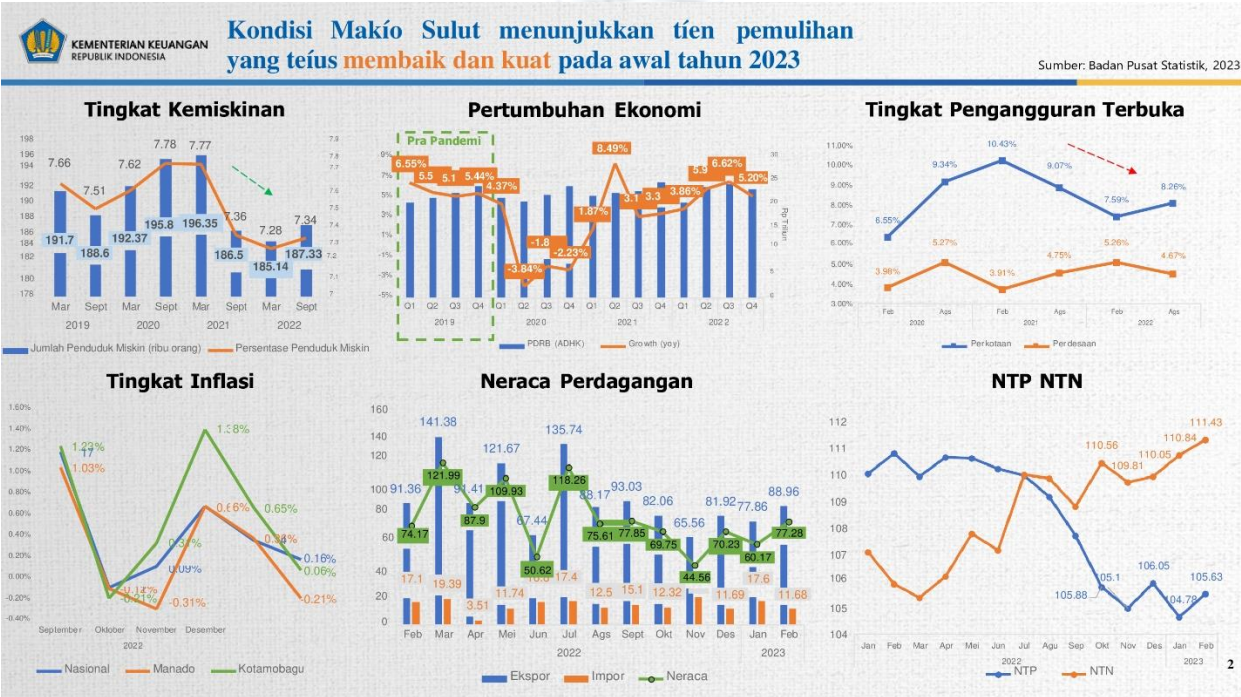
Perimbangan keuangan tidak hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (DBH, DAU, DAK). Dana bagi hasil adalah dana bagi hasil pajak (PBB) antara pusat provinsi dan kabupaten/kota. Selain dana bagi hasil, maka pemerintah provinsi pemerintah kabupaten/kota juga menerima dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Penerimaan negara dari sumber tersebut jauh menurun pada masa pandemi covid 19. Oleh karena itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota wajib mencari sumber penerimaan daerah bekerja sama dengan daerah lain dan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan barang milik daerah

EVALUASI EKONOMI SULUT 2022

Perekonomian suatu Negara atau suatu Daerah sudah seharusnya mampu menjamin kesejahteraan relative dari semua penduduknya **Pengalaman** hampir seantero Dunia, kesejahteraan ekonomi hanya dicapai jika terjadi pertumbuhan (growth) dalam jangka Panjang secara berkesinambungan. Pertumbuhan berkesinambungan (**sustainable**) dimungkinkan jika variabel kunci dalam kondisi ideal. Adapun Variabel kunci, antara lain ; Investasi, baik autonomous Investment maupun Induced **Investment** juga dalam jangka Panjang bertambah signifikan. Autonomous Investment atau Investasi Otonom adalah Investasi yang berasal dari Kas Negara, lebih dikenal sebagai Belanja Modal utamanya Belanja Infrastruktur, yaitu pembangunan sarana Pendidikan, Kesehatan, Jembatan, Jalan raya dan Barang Publik lainnya. Investasi Otonom akan berkesinambungan jika sumber penerimaan Negara dari Pajak, Retribusi, Cukai dan pendapatan lainnya yang sah, juga terpelihara dengan baik. Naik turunnya perekonomian adalah sesuatu yang sudah seharusnya karena secara teoritis Business Cycle

adalah keniscayaan. Perumbuhan Ekonomi Sulut stabil 2021-2022 pada kisaran 5,42% Angka pengangguran turun dibandingkan tahun 2021 mencapai 7,06% menjadi 6,61% pada tahun 2022, sedangkan angka Inflasi Sulut pada tahun 2021 rata-rat 2,64%, naik menjadi 4,00% pada Tahun 2022. April 2023 turun menjadi 1,16%.

Indikator Ekonomi Makro Sulut terkendali stabil, Produk Regional Bruto Sulut menunjukkan pertumbuhan pada beberapa sektor ekonomi di tunjukan oleh table 1.



Tulisan ini membahas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam konteks Keuangan Negara atau Daerah. Dalam kondisi pembiayaan yang terbatas dan defisit APBD, daerah dituntut untuk mencari alternatif pendapatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pemanfaatan BMD menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga penilai dan biaya proses penilaian yang tinggi. Tanpa solusi yang tepat, investor akan mundur dan menyebabkan masalah seperti aset yang terbengkalai dan penurunan iklim investasi daerah. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui pengaturan dalam Permendagri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Melalui permendagri ini, proses penilaian dapat dilakukan oleh jasa KJPP tanpa membebani anggaran daerah. Selain itu, persetujuan DPRD juga menjadi hal penting yang melibatkan akuntabilitas dan transparansi. Permendagri ini memberikan kepastian hukum dan tenggat waktu dalam setiap tahapan kerja sama pemanfaatan BMD. Penatausahaan dan pelaporan juga menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban atas kerja sama tersebut.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah topik yang sangat menarik dalam konstelasi Keuangan Negara atau Daerah belakangan ini. Di tengah kondisi pembiayaan atau Transfer Ke Daerah (TKD) yang makin terbatas karena pemekaran wilayah dan makin beratnya beban APBN, Daerah dituntut memiliki alternatif pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain beban pembiayaan per Pemerintah Daerah (Pemda) makin rumit karena banyak kebutuhan yang membuat Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) defisit. Kondisi defisit ini tentunya tidaklah mungkin dibiarkan, karena akan menimbulkan eksekusi terkait pembiayaan pembangunan termasuk kejadian di salah satu Kabupaten di kepulauan Riau.

Masalah penting lain yang mendorong pemda dalam situasi yang sulit adalah pemberlakuan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan pengejawantahan dari PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah. Dalam bab mengenai pemanfaatan barang, diatur bahwa pemda diminta untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah (BMD) namun diberikan batasan bahwa sebelum dimanfaatkan, BMD yg dimanfaatkan tersebut harus melalui prosedur salah satunya dinilai terlebih dahulu potensi pemanfaatan, Sebagaimana dimaklumi, skema pemanfaatan yang tersedia dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tersebut adalah : Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan KSPI (Kerjasama Penyediaan Infrastruktur). Masing masing skema pemanfaatan ini memiliki kompensasi sebagai nilai atas pemanfaatan BMD kecuali Pinjam Pakai. Di sini lah awal pangkal masalahnya yaitu tidak ada pemda yang siap dengan penganggaran terkait penilaian atas pemanfaatan BMD sebagai akibat sangat sedikitnya ketersediaan tenaga Penilai Pemerintah atau Penilai BMD. Ketergantungan yang sangat nyata dengan Penilai Pemerintah dibawah Direktrat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, sementara pastinya DJKN akan memprioritaskan terlaksananya tugas pokok fungsi menyebabkan antrian panjang permintaan penilaian atas pemanfaatan BMD dari pemda-pemda. Adapun alternatif lain yaitu Penilai KJPP atau Penilai publik tapi terkendala biaya proses penilaian yang mahal rata rata tidak disediakan penganggarnya di APBD.

Bila tidak segera dicarikan solusi, maka jangan heran investor yang berminat investasi melalui kerja sama BMD akan mundur teratur dan akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks yaitu asset yang mangkrak, tidak terurus, tidak ada biaya pemeliharaan maupun pengamannya serta iklim investasi daerah merosot drastis. Hal ini harus segera dicaikan solusi tuntasnya.

Artikel ini membahas solusi atas permasalahan tersebut, melalui pengaturan teknis Permendagri No. 22 Tahun 2020. Permendagri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Awalnya Permendagri ini bertujuan untuk menjawab pemenuhan infrastruktur daerah melalui kerja sama daerah yang ternyata juga bisa menjawab soal kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).

Permendagri No. 22 Tahun 2020 merupakan penjelasan atau turunan peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018 tentang kerja sama daerah. Pasal 15 ayat 1 huruf b. mengatur tentang kerja sama daerah dengan pihak ketiga (KSDPK) sebagai berikut :

1. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
2. Kerja Sama Dalam Pengelolaan Aset Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Yang Memberikan Pendapatan Bagi Daerah ;
3. Kerja sama investasi;
4. Kerja sama lainnya

Esensi pengaturan dalam PP No. 28 Tahun 2018, pasal 15 Ayat 1 huruf b sejalan dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 pasal 15 ayat 1 huruf b sehingga diusulkan pengaturan dalam Permendagri No. 22 Tahun 2020 yang merupakan penjelasan PP No. 28 Tahun 2018. Intinya adalah keterkaitan antara PP No. 28 Tahun 2018, Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang merupakan penjelasan atau turunan Permendagri No. 22 Tahun 2020 merupakan alternatif solusi dalam pemanfaatan barang milik daerah.

Permendagri No. 22 Tahun 2020, merupakan penjelasan (jawaban) terhadap penganggaran dana APBD terhadap permasalahan anggaran dan APBD melalui penilaian jasa oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Hal ini mampu mengatasi keterbatasan tenaga penilai BMD. Pemerintah daerah tidak perlu lagi menganggarkan biaya jasa penilaian publik, karena dapat dilakukan melalui Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga melalui peroposal. Pemerintah daerah seharusnya mampu menyusun skala Prioritas atas Urusan Pemerintahan Wajib (tidak wajib) tentang Pelayanan Dasar, termasuk urusan pemerintahan pilihan. Selanjutnya Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah bertujuan mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dalam pemenuhan Kebutuhan Layanan Publik. Pemenuhan layanan publik dan mewujudkan kesejahteraan adalah bagian dari rencana strategis diundangnya investor untuk mengelola BMD melalui skema Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Selanjutnya Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa, harus menyusun penawaran yang akan dikaji oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

Pengkajian atas penawaran Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dengan mempertimbangkan paling sedikit : kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis sektor terkait dan kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta keterkaitan antar sektor dan antar wilayah. Hal ini bila dilihat dari kacamata pemanfaatan BMD, sinergi dengan kepentingan daerah terbukti dari sisi pembahasan Analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik sebagai syarat pemanfaatan BMD, harus memenuhi unsur legalitas dengan segala aspek teknisnya terkait perijinan.

Permendagri No. 22 Tahun 2020 juga mengatur hal terkait kelayakan biaya dan manfaatnya serta dampak terhadap pembangunan Daerah. Setidaknya ada hal menarik terkait pembangunan Daerah terkait pemenuhan aspek dasar dari kota atau kabupaten yang layak huni seperti keberadaan hotel, restoran atau pusat belanja yang pastinya punya dampak terhadap pembangunan Daerah.

Hal penting yang juga patut dipertimbangkan terkait bonafiditas calon mitra KSDPK dan pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan, yang dalam banyak kasus pemanfaatan, pihak investor mundur dari proses pemanfaatan setelah berjalan, beberapa lama karena tidak bonafid atau tidak layak nya proyek pemanfaatan atau investor tidak punya pengalaman yang cukup dalam bisnis yg diminati. Bonafiditas calon mitra KSDPK dapat dilacak dari rekam jejak investor dimasa lalu. yang merupakan unsur penting tahapan yang harus dilalui agar dimensi akuntabilitasnya tetap terjaga. Rekam jejak serta pengalaman ini penting karena indikator untuk melihat masa depan sangat terbatas. Merujuk pengalaman negeri ini yang pernah mengalami Pandemi Covid-19 terbukti bahwa investor yang punya rekam jejak masa lalu yang lebih baik akan pulih lebih cepat karena kemampuan bertahan yang lebih baik dari berbagai aspek seperti permodalan dan managerial.

Selanjutnya terkait penyusunan Kesepakatan Bersama maka dilakukan oleh TKKSD yang dibahas secara intensif dengan pihak ketiga, yang kemudiann bila disepakati oleh para pihak maka dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama. Jangka waktu Kesepakatan Bersama adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama. Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Kepala Daerah dan pimpinan Pihak Ketiga, Terkait penandatanganan oleh Kepala Daerah bukan kepala pemerintahan untuk memperkuat sisi legalitas bahwa yang terikat adalah daerah sehingga lebih memberi kepastian hukum terutama bila dibanding dengan ditandatangani oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang dalam ranah pemanfaatan BMD yang dijabat oleh maksimal Sekretaris Daerah setempat.

Bahasan menarik selanjutnya terkait persetujuan DPRD. Hal yang melatarbelakanginya adalah bahwa setiap rencana kerja sama investasi yang bersumber dari manapun terutama dari pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan maka wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD. Hal ini sangat selaras dari sisi akuntabilitas dan transparansi yang bahkan ketika terjadi pemanfaatan BMD, hal ini luput dari pembahasan. Sehingga menunjukkan satu lagi sisi baik dan keunggulan Permendagri 22 Tahun 2020 dibanding aturan lain seperti Permendagri No.19 Tahun 2016 yg didalamnya mengatur secara implisit mengenai pemanfaatan BMD. Proses persetujuan DPRD juga memiliki mekanisme seperti adanya surat permohonan, lampiran

Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani, rancangan Perjanjian Kerja Sama serta profil perusahaan mitra kerja sama/pihak ketiga. Adanya mekanisme rapat paripurna DPRD serta yang terpenting adanya kepastian hukum terkait persetujuan atau tidak dari DPRD terkait tenggat waktu. Hal ini menunjukkan sisi positif lain yang sebagai pembandingnya adalah praktik di dunia pemanfaatan BMD yang sering terkandung katung dan tidak jelas nasibnya setelah setengah jalan diproses. Kami menilai bahwa salah satu keunggulan dari Permendagri No. 22 Tahun 2020 adalah disetiap tahapannya diberi tenggat waktu yang terukur sehingga lebih memberi kepastian terkait setiap rencana kerja sama pemanfaatan BMD.

Selanjutnya penyusunan kontrak atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli serta dibahas bersama dengan pihak ketiga. Kontrak atau PKS yang telah disepakati maka ditandatangani oleh para pihak. Penandatanganan PKS ini oleh Kepala Daerah dan boleh di delegasikan berdasarkan surat kuasa beserta pimpinan pihak ketiga.

Tahapan berikut setelah Penandatanganan PKS adalah pelaksanaan yang dilakukan para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK. Pada fase pelaksanaan ini ujian yang sebenarnya dihadapi oleh pihak ketiga bersama Perangkat Daerah. Banyak dinamika yang akan dihadapi, terutama unsur ketidakpastian di masa yang akan datang dan untuk mengantisipasi hal tersebut maka para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak. Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi kontrak atau PKS. Materi perubahan disiapkan oleh Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan TKKSD serta diatur bahwa bila materi perubahan menyebabkan penambahan beban kepada masyarakat dan daerah maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pada tahap berikutnya yang juga tidak kalah penting sebagai bentuk pertanggungjawaban adalah penatausahaan dan pelaporan. Penatausahaan dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dimana TKKSD menyimpan satu eksemplar dokumen asli naskah KSDPK. Sementara pelaporan dilakukan secara berjenjang tergantung lokus Kerja sama dibuat, dengan paling sedikit memuat : judul KSDPK, bentuk naskah KSDPK, para pihak, maksud dan tujuan, obyek, jangka waktu, permasalahan, upaya penyelesaian masalah serta hal lain yang disepakati.

Artikel ini merupakan sumbangsih pemikiran terkait kendala besar yang dialami dalam pemanfaatan BMD serta alternatif solusi untuk mengatasinya. Pemanfaatan barang milik negara maupun barang milik daerah merupakan alternatif penerimaan negara / daerah yang potensial. Upaya mengefektifkan potensi penerimaan negara dari sumber-sumber potensial sebaiknya diawali dengan proses perencanaan. Secara teknis perencanaan dapat dilakukan dengan indentifikasi akurat terhadap keseluruhan Barang Milik Daerah (BMD) yang menganggur atau tidak dimanfaatkan selayaknya aset negara. Tahap berikutnya adalah melakukan rencana pemanfaatan seluruh aset negara termasuk BMD melalui kerja sama antara daerah termasuk kerja sama dengan pihak ketiga (swasta). Setelah dimanfaatkan melalui kerja sama dimaksud, maka perlu diadministrasikan, dipertanggungjawabkan, melalui proses pelaporan yang akurat. Selanjutnya setelah proses pelaporan diperiksa oleh pihak otoritas lembaga maka, dilakukan proses audit internal maupun audit eksternal.

KESEIMPULAN

Pandemi Covid 19 merupakan Bencana Dunia yang telah merubah drastis tatanan perekonomian dan tatanan bisnis di seantero negara di dunia.

Model bisnis konvensional dalam waktu singkat telah tergantikan dengan model bisnis digital, yang juga mampu merubah perilaku bisnis seluruh masyarakat dunia. Upaya Indonesia dalam mempertahankan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakatnya dilakukan melalui berbagai kebijakan termasuk berkonsekuensi membengkaknya pengeluaran negara. Kondisi ini mengharuskan pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara, melalui pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah. Upaya optimalisasi pemanfaatan BMD, telah diatur melalui PP No. 22 Tahun 2020, tentang kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga merupakan salah satu peluang dalam optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) untuk meningkatkan penerimaan negara (daerah) *political will* pejabat daerah sangat dibutuhkan dalam mencari sumber-sumber potensial dalam mempertahankan kesejahteraan masyarakat di masa sulit karena pandemi Covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Aribowo, H., Wirapraja, A., & Wijoyo, I. (2019). *Mudah Memahami dan Mengimplementasikan Ekonomi Makro*. Yogyakarta: ANDI.
- Case, K. E., & Fair, R. C. (2005). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Indonesia: PT INDEKS Kelompok GRAMEDIA.
- Falianty, T. A. (2019). *Teori Ekonomi Makro dan Penerimaan di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasanah, E. U., & Sunyoto, D. (2012). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: CAPS.
- Hasanah, E. U., & Sunyoto, D. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: CAPS.
- Noor, H. F. (2015). *Ekonomi Publik*. Jakarta: Indeks.
- PP No. 22 Tahun 2020. *Tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga*
- Permendagri No. 19 Tahun 2016. *Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*
- PP No. 27 Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah*
- PP No. 28 Tahun 2018. *Tentang Kerja Sama Daerah*
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sambodo, M. T., Tenrini, R. H., & Akbar, R. (2021). *Membangun Ketangguhan Ekonomi Era Pandemi*. Jakarta: PT Gramedia .
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah* . Yogyakarta: ANDI.
- Ubaidillah. (2007). *Meletakkan Kembali Dasar-Dasar Pembangunan Ekonomi Yang Kokoh*. Jakarta Selatan: PP-ISEI.